

KOTA BOGOR



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KOTA BOGOR TAHUN 2022



DR. H. BIMA ARYA

WALI KOTA BOGOR

Drs. H. DEDIE A. RACHIM, M. A.

WAKIL WALI KOTA BOGOR



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas selesainya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2022. Proses penyusunan telah melalui tahapan penyusunan yang berlangsung lancar, sehingga kami dapat menyampaikan LPPD Kota Bogor Tahun 2022 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh substansi LPPD dan EKPPD Kota Bogor Tahun 2022 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Buku laporan ini terdiri atas 5 bab, masing-masing adalah Bab Pendahuluan, Bab Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan terakhir Bab Penutup.

Pada keseluruhan bab tersebut diuraikan tentang kebijakan pembangunan Kota Bogor tahun 2022 yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 - 2024, realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2022, pelaksanaan dan hasil dari upaya menangani 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, Urusan Pemerintah Daerah Fungsi Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum serta penanganan kegiatan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam laporan ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan pada upaya kami mengatasi begitu banyak permasalahan yang muncul di dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Namun demikian isi laporan ini hendaknya dapat ditelaah dan dikaji secara mendalam serta dikritisi secara proporsional.




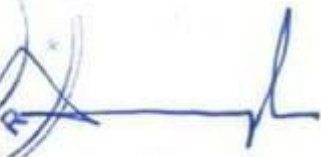
Dengan demikian, kami akan mendapatkan berbagai bahan masukan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai azas otonomi daerah, serta untuk terus mendorong terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat warga Kota Bogor yang lebih baik.

Berbagai sukses dan capaian-capaian yang telah diraih itu, tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang terbangun antara Pemerintah Kota Bogor dengan berbagai instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, kepada semua pihak yang telah mengulurkan kerjasama kami ucapkan terimakasih dan kami sampaikan penghargaan atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Akhirnya, kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kota Bogor Tahun 2022 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu membimbing dan melindungi kami semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Wassalam

Bogor , Maret 2023


WALIKOTA BOGOR,

Dr. BIMA ARYA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
A.Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	2
B.Data Geografis Wilayah	5
C. Jumlah Penduduk	8
D.Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	8
E.Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	10
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	20
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	20
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	25
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	25
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	25
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	48
A. LATAR BELAKANG	48
B. DASAR HUKUM	50
C. KEBIJAKAN UMUM.....	51
D. ARAH KEBIJAKAN	52
E. FOKUS LAYANAN.....	53
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	54
2.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO	54
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	57



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	107
2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	107
2.3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	109
MISI 1 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT	112
Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	112
Sasaran 2 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	117
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	127
Sasaran 4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan / atau kerusakan lingkungan.....	142
Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	147
MISI 2 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS	150
Sasaran 6 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (Smart People).....	150
Sasaran 7 Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	157
Sasaran 8 Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, Toleransi dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat	160
Sasaran 9 Tercapainya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	167
Sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City). 173	
MISI 3 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEJAHTERA	178
Sasaran 11 Menurunnya Tingkat Pengangguran	178
Sasaran 12 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	181
Sasaran 13 Meningkatnya Ketahanan Keluarga	186
Sasaran 14 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	189
Sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	204
Sasaran 16 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	212
Analisis Efisiensi	219
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 221	
3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA	221
3.1.1. Target Kinerja	222
3.1.2. Realisasi	222



3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA	222
3.2.1. Target Kinerja	222
3.2.2. Realisasi	222
3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA	222
3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT	222
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	223
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	223
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	223
2. Target Pencapaian SPM	223
3. Alokasi Anggaran	224
4. Dukungan Personil	224
5. Hasil Capaian SPM Urusan	225
6. Permasalahan Dan Solusi	228
4.2 URUSAN KESEHATAN	229
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	229
2. Target Pencapaian SPM	229
3. Alokasi Anggaran	231
4. Dukungan Personil	232
5. Hasil Capaian SPM Urusan	233
6. Permasalahan Dan Solusi	241
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	242
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	242
2. Target Pencapaian SPM	242
3. Alokasi Anggaran	243
1. Urusan Air Minum:.....	244
2. Urusan Air Limbah :.....	246
4. Dukungan Personil	248
5. Hasil Capaian SPM Urusan	248
6. Permasalahan Dan Solusi	250
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	250
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	251
2. Target Pencapaian SPM	251
3. Alokasi Anggaran	252
4. Dukungan Personil	253

5. Hasil Capaian SPM Urusan	253
6. Permasalahan Dan Solusi	255
4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS	257
1. SUB URUSAN TRANTIBUM	257
1. Jenis Pelayanan Dasar	257
2. Target Pencapaian SPM	257
3. Alokasi Anggaran	258
4. Dukungan Personil	258
5. Hasil Capaian SPM Urusan	259
6. Permasalahan Dan Solusi	260
2. SUB URUSAN BENCANA	261
1. Jenis Pelayanan Dasar	261
2. Target Pencapaian SPM	261
3. Alokasi Anggaran	262
4. Dukungan Personil	263
5. Hasil Capaian SPM Urusan	264
6. Permasalahan Dan Solusi	266
3. SUB URUSAN KEBAKARAN	267
1. Jenis Pelayanan Dasar	267
2. Target Pencapaian SPM	268
3. Alokasi Anggaran	268
4. Dukungan Personil	269
5. Hasil Capaian SPM Urusan	269
6. Permasalahan Dan Solusi	270
4.6 URUSAN SOSIAL	271
1. Jenis Pelayanan Dasar	271
2. Target Pencapaian SPM	271
3. Alokasi Anggaran	273
4. Dukungan Personil	273
5. Hasil Capaian SPM Urusan Sosial	274
6. Permasalahan Dan Solusi	277
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN	278
4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN	278
4.7.2 URUSAN KESEHATAN	283
4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	284
4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	286
4.7.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS	289



1. SUB URUSAN TRANTIBUM	289
2. SUB URUSAN KEBENCANAAN	290
3. SUB URUSAN KEBAKARAN	291
4.7.6 URUSAN SOSIAL	292
BAB V P E N U T U P	294



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.3 1 Angka Harapan Hidup Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022	113
Grafik 2.3 2 Tren Rata-Rata Lama Sekolah	151
Grafik 2.3.3 Tren Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2021	155
Grafik 2.3 4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 – 2021.....	162
Grafik 2.3 5 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....	169
Grafik 2.3.6 Tren Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	171
Grafik 2.3.7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	172
Grafik 2.3 8 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022	179
Grafik 2.3.9 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2022.....	182
Grafik 2.3 10 Tren Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022	182
Grafik 2.3 11 Tren Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2022.....	183
Grafik 2.3.12 Tren Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018-2022	184
Grafik 2.3.13 PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	191
Grafik 2.3.14 PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	195
Grafik 2.3.15 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Bogor Tahun 2022.....	199
Grafik 2.3 16 Tren Pengeluaran Per Kapita Tahun 2018-202.....	200
Grafik 2.3 17 Realisasi Anggaran	218

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Bogor	6
Gambar 2.3.1 Capaian Angka Harapan Hidup.....	112
Gambar 2.3.2 Capaian Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.....	117
Gambar 2.3.3 Kegiatan Ngariung Sehat	121
Gambar 2.3.4 Kegiatan Promosi Kesehatan.....	122
Gambar 2.3.5 Kegiatan Promosi Kesehatan.....	122
Gambar 2.3.6 Capaian Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga.....	125
Gambar 2.3.7 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Layak.....	127
Gambar 2.3.8 Kegiatan Pengembangan Pipa.....	129
Gambar 2.3.9 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Aman	130
Gambar 2.3.10 Kegiatan Pengembangan Jaringan Pipa.....	131
Gambar 2.3.11 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Layak.....	132
Gambar 2.3.12 Kegiatan Pembangunan SPALDT	134
Gambar 2.3.13 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Aman	135
Gambar 2.3.14 Capaian Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota..	137
Gambar 2.3.15 Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan dan Perbaikan Drainase.....	138
Gambar 2.3.16 Capaian Persentase Reduksi Sampah	139
Gambar 2.3.17 Kegiatan Pengolahan Sampah di TPS 3R	140
Gambar 2.3.18 Aktivitas di Bank Sampah.....	140
Gambar 2.3.19 Kegiatan Green Leadership	141
Gambar 2.3.20 Capaian Indeks Kualitas Air	142
Gambar 2.3.21 Kegiatan Pengujian Kualitas Air	143
Gambar 2.3.22 Capaian Indeks Kualitas Udara.....	145
Gambar 2.3.23 Kegiatan Pengujian Kualitas Udara.....	146
Gambar 2.3.24 Capaian Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	147
Gambar 2.3.25 Pembangunan Taman di Tahun 2022	149
Gambar 2.3.26 Capaian Rata-rata Lama Sekolah	150
Gambar 2.3.27 Kegiatan Rehabilitasi Sekolah dan Penambahan Ruang Kelas Baru	152
Gambar 2.3.28 Capaian Harapan Lama Sekolah	154
Gambar 2.3.29 Kegiatan Rehabilitasi Sekolah.....	156
Gambar 2.3.30 Capaian Kategori Inovasi Daerah	157
Gambar 2.3.31 Kegiatan Bogor Innovation Award.....	158
Gambar 2.3.32 Sinovik Menerima Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik ..	160
Gambar 2.3.33 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	161
Gambar 2.3.34 Kegiatan Sosialisasi Perempuan Berpolitik.....	163
Gambar 2.3.35 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	164
Gambar 2.3.36 Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).....	166
Gambar 2.3.37 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	167
Gambar 2.3.38 Penyerahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ..	168
Gambar 2.3.39 Capaian Level Kematangan Smart City	173
Gambar 2.3.40 Implementasi Smart City Kota Bogor	177
Gambar 2.3.41 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka	178
Gambar 2.3.42 Kegiatan Pelatihan Kerja	180



Gambar 2.3.43	Capaian Angka Kemiskinan	181
Gambar 2.3.44	Capaian Indeks Ketahanan Keluarga.....	186
Gambar 2.3.45	Kegiatan Pembinaan Posyandu	188
Gambar 2.3.46	Capaian PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	189
Gambar 2.3.47	Capaian PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	194
Gambar 2.3.48	Capaian Pengeluaran Per Kapita.....	198
Gambar 2.3.49	Capaian Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit.....	202
Gambar 2.3.50	Capaian Realisasi Rencana Struktur Ruang	204
Gambar 2.3.51	Capaian Realisasi Pola Ruang.....	208
Gambar 2.3.52	Capaian Jalan Berkondisi Mantap.....	212
Gambar 2.3.53	Kegiatan Perbaikan Jalan	213
Gambar 2.3.54	Capaian Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	214
Gambar 2.3.55	Kegiatan Reduksi, Konversi, dan Kompensasi Angkutan Umum.....	215



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor	5
Tabel 1. 2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022.....	8
Tabel 1.3	Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor	9
Tabel 1.4	Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai	11
Tabel 1.5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli	18
Tabel 1.6	Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	19
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Belanja	19
Tabel 1.8	Target dan Realisasi Pembiayaan.....	19
Tabel 1.9	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2022 .	26
Tabel 2.1.1	Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2021 dan 2022	55
Tabel 2.3.1	Target Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat	107
Tabel 2.3.2	Target Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas	108
Tabel 2.3 3	Target Misi III : Mewujudkan Bogor Kota yang Sejahtera	109
Tabel 2.3 4	Capaian Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat	109
Tabel 2.3 5	Capaian Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas	110
Tabel 2.3 6	Capaian Misi III : Mewujudkan Bogor Kota yang Sejahtera	111
Tabel 2.3.7	Realisasi Presentase Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan Tahun 2022	118
Tabel 2.3.8	Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2019 s/d 2022	120
Tabel 2.3.9	Rumah Tangga yang Dilayani Air minum yang Layak per Kecamatan Tahun 2022	128
Tabel 2.3.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (miliar rupiah) Tahun 2018-2022	191
Tabel 2.3.11	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (persen) Tahun 2018-2022	192
Tabel 2.3 12	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (miliar rupiah) Tahun 2018-2022.....	195
Tabel 2.3 13	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2018-2022	196
Tabel 2.3.14	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Bogor Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	200
Tabel 2.3.15	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Bogor Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	201
Tabel 2.3 16	Rincian Panjang Jalan Kota Beserta Kondisi Permukaannya Tahun 2022	213
Tabel 2.3 17	Akuntabilitas Keuangan	216
Tabel 4.1 1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan.....	223
Tabel 4.1 2	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	224
Tabel 4.1.3	Pendidikan Formal	225
Tabel 4.1.4	Pangkat golongan	225
Tabel 4.1.5	Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan.....	225
Table 4.2 1	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan.....	230
Table 4.2.2	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan.....	231
Table 4.2 3	Pendidikan Formal	232
Table 4.2 4	Pangkat Golongan.....	232
Table 4.2 5	Jumlah Pejabat.....	233
Table 4.2.6	Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan.....	233

Tabel 4.3 1	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	243
Tabel 4.3 2	Alokasi Anggaran	243
Tabel 4.3.3	Dukungan Personil	248
Tabel 4.3 4	Hasil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	248
Tabel 4.3.5	Permasalahan dan Solusi	250
Tabel 4.4 1	Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	251
Tabel 4.4 2	Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat	252
Tabel 4.4.3	Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat	253
Tabel 4.4 4	Capaian SPM Urusan perumahan Rakyat	254
Tabel 4.5 1	Target Capaian SPM Urusan Trantibum.....	257
Tabel 4.5.2	Alokasi Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	258
Tabel 4.5.3	Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	259
Tabel 4.5.4	Hasil Capaian SPM Urusan Trantibum.....	259
Tabel 4.5 5	Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas	261
Tabel 4.5.6	Alokasi Anggaran Urusan Trantibumlinmas	262
Tabel 4.5.7	Hasil Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan	264
Tabel 4.5.8	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran	268
Tabel 4.5.9	Alokasi Anggaran Sub Urusan Damkar.....	268
Tabel 4.5 10	Hasil Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	269
Tabel 4.6.1	Target Pencapaian SPM.....	272
Tabel 4.6 2	Alokasi Anggaran Urusan Sosial.....	273
Tabel 4.6 3	Hasil Capaian SPM Urusan Sosial.....	274
Tabel 4.7.1	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022	278
Tabel 4.7 2	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022	283
Tabel 4.7.3	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022	284
Tabel 4.7.4	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022	286
Tabel 4.7.5	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022	289
Tabel 4.7.6	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2022.....	290
Tabel 4.7.7	Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Damkar Tahun 2022	291
Tabel 4.7.8	Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022	292



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah, yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan laporan berkelanjutan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang. Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*), beliau juga memperkerjakan seorang *planner* yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzoorg*.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada Tahun 1903, terbit undang-undang desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah:

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No.204);
2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206);
3. Gemeente Buitenzoorg (S. 1905 No.208);
4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No.121);
5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No.122);
6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No.310)

(*Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748*)

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau undang-undang perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad 1922 No. 216*), sehingga pada tahun 1992 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie* (*Ordonantie Kabupaten*) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah otonomi



kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79). Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince West Java*) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 kabupaten (*Regentscape*) dan kotapraja (*Staads Gemeente*). *Buitenzoorg* (Bogor) menjadi salah satu *Staads Gemeente* di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan (*Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368), dengan prinsip desentralisasi *modern*.

Pada masa setelah kemerdekaan yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. Dasar pertimbangan pengesahan undang-undang tersebut adalah untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor.

Selain memperhatikan undang-undang tentang pembentukan Kota Bogor, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bogor Tahun 2022 ini disusun dengan mempertimbangkan dasar hukum lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2022;



16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 117 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

B. Data Geografis Wilayah

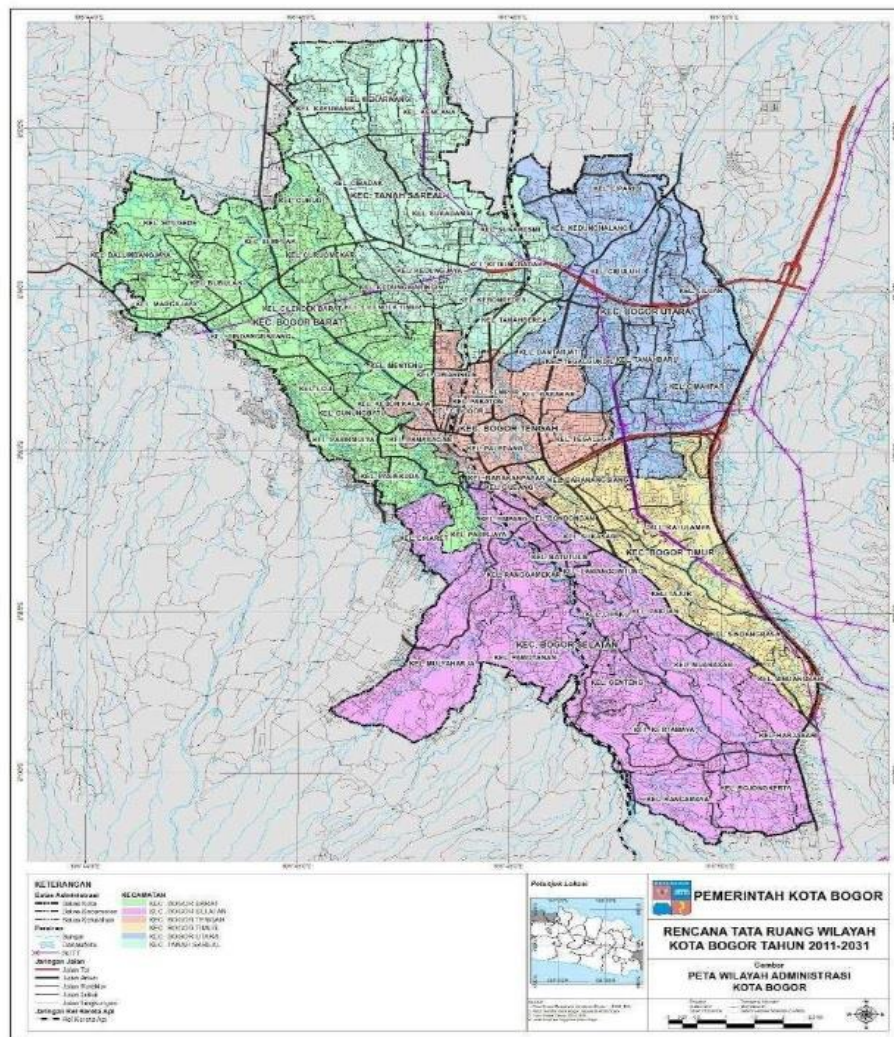
Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106 derajat 43'30"BT-106 derajat 51'00"BT dan 30'30" LS-6 derajat 41'00" LS. Kedudukan Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya berdekatan dengan DKI Jakarta, dengan jarak kurang lebih 60 Km ke arah Selatan DKI Jakarta, dengan luas wilayahnya mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat : Kecamatan Dramaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Bogor Selatan	3.081
2	Bogor Timur	1.015
3	Bogor Utara	1.772
4	Bogor Tengah	813
5	Bogor Barat	3,285
6	Tanah Saeral	1.884
	JUMLAH	11.850

Sumber data Bappeda Kota Bogor



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Bogor

Sumber data Bappeda Kota Bogor

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0-2 persen, namun demikian ada beberapa wilayah yang mempunyai kemiringan hingga >40%. Kota Bogor memiliki datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan, seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2-15%, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15-125%, seluas 764,96 Ha merupakan lahan curam dengan kemiringan 25-40%, dan lahan sangat curam seluas 119,94 hektar dengan kemiringan lebih dari 40%. Kecamatan Bogor



Selatan merupakan daerah yang tergolong sangat peka terhadap erosi, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40% atau sangat curam.

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar. Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas alluvial.

Suhu udara di Kota Bogor, berdasarkan data BPS yang tertuang dalam Bogor Dalam Angka Tahun 2020, berkisar rata-rata 27°C dimana suhu minimum adalah 22°C dan suhu maksimum 36°C. Kelembaban Udara rata-rata adalah 80% humidity, dengan curah hujan bulanan berkisar 79,0-652 mm. Menurut Stasiun Klimatologi, bulan April menjadi bulan dengan curah hujan terbesar pada tahun 2019 dimana rata-rata curah hujan berkisar 544 mm³ dimana Pos Hujan Empang mencatat curah hujan terbesar yaitu 592 mm³. Sementara Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan curah hujan terendah berkisar 51 mm³ dan curah hujan terendah tersebut terjadi di pos hujan Empang dengan angka rata-rata curah hujan berkisar 17 mm³. Berdasarkan hasil uji kualitas udara yang dilaksanakan oleh DLH Kota Bogor pada tahun 2020, Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Bogor berada pada kisaran 80,09 point, kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat,

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2020, nilai indeks kualitas air Kota Bogor masih relative

rendah yaitu berkisar 56,33 point. Rendahnya kualitas air di Kota Bogor sangat di pengaruhi oleh kondisi kualitas air di hulu.

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Jumlah Penduduk Tahun 2022 mencapai 1.099.422 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 249.708 atau 22,71% sedangkan untuk jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 106.994 atau 9,73% dari total jumlah penduduk sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022

Kecamatan/ Subdistricts	L	P	Penduduk (Orang)/Population (Person)	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
Bogor Selatan	108.878	104.623	213.501	19,42
Bogor Timur	53.971	53.023	106.994	9,73
Bogor Utara	99.629	97.382	197.011	17,92
Bogor Tengah	54.179	53.980	108.159	9,84
Bogor Barat	125.728	123.926	249.708	22,71
Tanah Sareal	113.103	110.946	224.049	20,38
JUMLAH	555.488	543.880	1.099.422	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan baik dengan melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan, baik urusan yang diurus langsung dalam tataran otonomi maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta hasil partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, telah mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Bogor. Hal ini tercermin antara lain dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2022 mencapai 77,17 meningkat 0.757 basis poin dari IPM yang dicapai pada tahun 2021 yang berada pada titik 76.59.

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan.



Tabel 1.3 Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Bogor Selatan	Kelurahan Lawanggintung Kelurahan Batutulis Kelurahan Bondongan Kelurahan Empang Kelurahan Cikaret Kelurahan Pamoyanan Kelurahan Ranggamekar Kelurahan Mulyaharja Kelurahan Kertamaya Kelurahan Harjasari Kelurahan Muarasari Kelurahan Genteng Kelurahan Pakuan Kelurahan Cipaku Kelurahan Bojongkerta Kelurahan Rancamaya
2.	Kecamatan Bogor Barat	Kelurahan Menteng Kelurahan Semplak Kelurahan Pasir Kuda Kelurahan Gunung Batu Kelurahan Sindang Barang Kelurahan Bubulak Kelurahan Marga Jaya Kelurahan Balumbang Jaya Kelurahan Situ Gede Kelurahan Curug Mekar Kelurahan Curug Kelurahan Pasir jaya Kelurahan Pasir Mulya Kelurahan Loji Kelurahan Cilendek Barat Kelurahan Cilendek Timur
3.	Kecamatan Tanah Sareal	Kelurahan Tanah Sareal Kelurahan Kebon Pedes Kelurahan Kedung Badak Kelurahan Sukaresmi Kelurahan Kedung Waringin



- Kelurahan Kedung Jaya
- Kelurahan Sukadamai
- Kelurahan Mekarwangi
- Kelurahan Kencana
- Kelurahan Kayumanis
- Kelurahan Cibadak
- 4. Kecamatan Bogor Tengah
 - Kelurahan Pabaton
 - Kelurahan Paledang
 - Kelurahan Babakan
 - Kelurahan Sempur
 - Kelurahan Tegallega
 - Kelurahan Babakan Pasar
 - Kelurahan Gudang
 - Kelurahan Panaragan
 - Kelurahan Kebon Kalapa
 - Kelurahan Cibogor
 - Kelurahan Ciwaringin
- 5. Kecamatan Bogor Utara
 - Kelurahan Tegal Gundil
 - Kelurahan Bantarjati
 - Kelurahan Cibuluh
 - Kelurahan Kedung Halang
 - Kelurahan Ciparigi
 - Kelurahan Ciluar
 - Kelurahan Tanah Baru
 - Kelurahan Cimahpar
- 6. Kecamatan Bogor Timur
 - Kelurahan Sukasari
 - Kelurahan Baranangsiang
 - Kelurahan Tajur
 - Kelurahan Katulampa
 - Kelurahan Sindangsari

 - Kelurahan Sindangrasa

*Sumber data Bappeda
Kota Bogor*

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah berikut kami sampaikan data yang dimaksud.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai Kota Bogor Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	a. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	174
		b. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	
		c. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
		d. Asisten Administrasi Umum Setda	
		e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	
		f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	
2	Sekretariat DPRD	a. Kepala Bagian Umum	55
		b. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Humas	
		c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
		d. Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3	Inspektorat Daerah	g. Sekretaris Inspektorat Daerah	53
		h. Inspektur Pembantu I	
		i. Inspektur Pembantu II	
		j. Inspektur Pembantu III	
		k. Inspektur Pembantu Khusus	
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	l. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44
		m. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		n. Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		o. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah	
		p. Bidang Penelitian dan Pengembangan	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
5	Dinas Pendidikan	a. Sekretaris Dinas Pendidikan	2977
		b. Bidang Sekolah Dasar	
		c. Bidang Sekolah Menengah Pertama	
		d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
		e. Bidang Sarana dan Prasarana	
6	Dinas Kesehatan	a. Sekretaris Dinas Kesehatan	827
		b. Bidang Kesehatan Masyarakat	
		c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		d. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		e. Bidang Pelayanan Kesehatan	
		f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	
7	Dinas Sosial	a. Sekretaris Dinas Sosial	39
		b. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin	
		c. Bidang Rehabilitasi Sosial	
		d. Bidang Pemberdayaan Sosial	
		e. Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	a. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	73
		b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
		c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
		d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	
		e. Bidang Peternakan dan kesehatan Hewan	
		f. Bidang Perikanan	
		g. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu	
9	Dinas Lingkungan Hidup	a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	279
		b. Bidang Tata Lingkungan	
		c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	
		d. Bidang Persampahan	
		e. Bidang Pengawasan Dan	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		Penegakan Hukum Lingkungan	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik c. Bidang Teknologi Informasi d. Bidang Layanan e Government e. Kepala Bidang Statistik Sektoral	50
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Bidang Promosi Penanaman Modal dan Sistem Informasi c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal d. Bidang Izin Operasional e. Bidang Izin Pemanfaatan Ruang	42
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga	a. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda c. Bidang Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda d. Bidang Pembudayaan Olahraga e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	50
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan b. Bidang Kebudayaan c. Bidang Kepariwisataaan d. Bidang Ekonomi Kreatif e. Bidang Kesenian	35
14	Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian	a. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Bidang Perindustrian c. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan d. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan e. Bidang Tertib Niaga f. UPTD Metrologi Legal	68
15	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	197



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		b. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah	
		d. Bidang Pengendalian dan Operasional	
		e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56
		b. Bidang Formasi, Data dan Kepangkatan	
		c. Bidang Mutasi, Disiplin dan Kesejahteraan	
		d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	53
		b. Bidang Anggaran	
		c. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	
		d. Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah	
18	Badan Pendapatan Daerah	a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	100
		b. Bidang Pendataan dan Pelayanan	
		c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	
		d. Bidang Penagihan dan Pengendalian	
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27
		b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	
		c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
		d. Kepala Bidang Kewas	
20	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		b. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	
		c. Bidang Sumber Daya Air	
		d. Bidang Infrastruktur Pemukiman	
		e. Bidang Pembangunan Kebinamargaan	
		f. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Perencanaan	
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	a. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan	33
		b. Bidang Pengelolaan Kearsipan	
		c. Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan	
		d. Bidang Perpustakaan	
22	Dinas Tenaga Kerja	a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	38
		b. Bidang Pelatihan, Pemagangan dan Produktifitas	
		c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja	
		d. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan	
		e. UPTD Balai Latihan Kerja	
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51
		b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
		d. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26
		b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
		c. Bidang Keluarga Berencana	
		d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
25	Dinas Perhubungan	a. Sekretaris Dinas Perhubungan	224
		b. Bidang Lalu Lintas	
		c. Bidang Angkutan	
		d. Bidang Sarana dan Prasarana	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		e. UPTD Terminal dan Angkutan	
26	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor	a. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah b. Bidang Koperasi c. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah d. Bidang Pedagang Kaki Lima	72
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak b. Bidang Pemberdayaan Perempuan c. Bidang Pemenuhan Hak Anak d. Bidang Data, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	30
28	Dinas Perumahan dan Permukiman	a. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Bidang Pertamanan dan Dekorasi	96
29	RSUD	a. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang b. Wakil Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis Wakil Direktur Keuangan dan Umum	178
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Kepala Sekretariat b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan c. Seksi Kedaruratan dan Logistik d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	19
31	Kecamatan Bogor Tengah	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Tengah c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Tengah d. Seksi Perekonomian Bogor Tengah e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Tengah f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Tengah	99
32	Kecamatan Bogor Selatan	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Selatan	134



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Selatan	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Selatan	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Selatan	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Selatan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Selatan	
33	Kecamatan Bogor Barat	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Barat	146
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Barat	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Barat	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Barat	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Barat	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Barat	
34	Kecamatan Bogor Utara	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Utara	79
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Utara	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Utara	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Utara	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Utara	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Utara	
35	Kecamatan Bogor Timur	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Timur	58
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Timur	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Timur	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Timur	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Timur	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Timur	
36	Kecamatan Tanah Sareal	a. Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal	100
		b. Seksi Tata Pemerintahan Tanah Sareal	
		c. Seksi Kemasyarakatan Tanah Sareal	
		d. Seksi Perekonomian Tanah Sareal	

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Tanah Sareal	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tanah Sareal	

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam penyusunan LPPD Tahun 2022 ini, data yang digunakan belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

Pendapatan Kota Bogor pada TA 2022 pada APBD murni tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp **2.328.704.666.532,-** sedangkan dalam penyusunan anggaran perubahan tahun 2022 sebesar Rp. **2.824.140.344.471,-** atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 495.435.677.939 atau sebesar 21,28%.

Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1	Pajak Daerah	774.175.900.000,-	754.175.900.000,-	(2,58)
1.2	Retribusi Daerah	36.394.007.000,-	37.834.007.000,-	3,96
1.3	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	30.503.342.185,-	32.169.497.964,-	5,46
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	269.636.266.766,-	326.707.820.522,-	21,17
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.110.709.515.951,-	1.150.887.225.486,-	3,62
2	Pendapatan Transfer			
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	969.502.683.000,-	1.277.870.323.115,-	31,81
2.2	Transfer Antar Daerah	248.492.467.581,-	395.377.894.620,-	59,11
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.217.995.150.581,-	1.673.248.217.735,-	37,38
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,-	4.901.250,-	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang sah	0,-	4.901.250,-	
	Jumlah Pendapatan	2.328.704.666.532,-	2.824.140.344.471,-	21,28

Sumber data : Bapenda Kota Bogor



Tabel 1.6 Target dan Realisasi Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	92.000.000.000,-	97.232.567.535,-	105,69
2	Pajak Restoran	166.530.000.000,-	171.195.516.950,-	102,8
3	Pajak Hiburan	19.000.000.000,-	19.432.547.665,-	102,28
4	Pajak Reklame	11.500.000.000,-	11.924.969.851,-	103,70
5	Pajak Penerangan Jalan	57.000.000.000,-	57.990.995.651,-	101,74
6	Pajak Parkir	10.700.000.000,-	11.431.045.808,-	106,83
7	Pajak Air Tanah	3.200.000.000,-	3.379.665.672,-	105,61
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	157.000.000.000,-	164.132.484.788,-	104,54
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	237.245.900.000,-	208.240.798.617,-	87,77
Jumlah		754.175.900.000,-	744.960.592.537,-	98,78

Sumber data : Bapenda Kota Bogor

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. **2.986.354.433.003,-** atau sebesar 93,77% dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp. **3.184.747.280.169,-** Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.7 Target dan Realisasi Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.543.324.625.726	2.406.860.416.778	94,63
2	Belanja Modal	624.518.638.833	571.966.552.801	91,59
3	Belanja Tak Terduga	14.704.015.610	5.366.713.424	36,50
4	Belanja Transfer	2.200.000.000	2.160.750.000	98,22
Jumlah		3.184.747.280.169	2.986.354.433.003	93,77

Sumber data : BKAD Kota Bogor

Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pembiayaan

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	BETAMBAH /BERKURANG	
		Rp.	Rp.	Rp	%
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN DAERAH					
1	Penerimaan Pembiayaan				
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	365.001.935.698	365.001.935.698,42	-	100,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan				

NO	URAIAN	RENCANA Rp.	REALISASI Rp.	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah				
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.497.032.260	5.484.766.176	(12.266.084,00)	99,78
1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		370.498.967.958	370.486.701.874,42	(12.266.083,58)	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan				
2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.395.000.000	4.394.083.430	(916.570,00)	99,98
2.3	Pembayaran Pokok Utang	5.497.032.260	5.484.766.176	(12.266.084,00)	99,78
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		9.892.032.260	9.878.849.606	(13.182.654,00)	99,87
3	Pembiayaan Neto	360.606.935.698	360.607.852.268,42	916.570,42	100,00
3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	161.354.651.118,34	161.354.651.118,34	

Sumber data : BKAD Kota Bogor

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
- b) Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat

Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

- c) Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan;
- d) Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e) Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
- f) Penetapan indikator kinerja daerah dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antar sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.

2) Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan
Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha
- b) Lemahnya penegakan hukum
Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum
- c) Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien

Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik

d) Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif

Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi

e) Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien

Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi

f) Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier

pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi



- pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.
- g) Inefisiensi penggunaan anggaran Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:
- i. belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan
 - ii. besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan
- h) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.
- 3) Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
- a) Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien
Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi;
 - b) Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi;
 - c) Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;
 - d) Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana

digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang berorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan di Kota Bogor dibanyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Bogor memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 2 tahun berturut turut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 dan Tahun 2021. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi

pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pematapan pemeriksaan kinerja.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi 2019-2024

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”

Misi 2019-2024

- 1) Mewujudkan Kota yang Sehat;
- 2) Mewujudkan Kota yang Cerdas;
- 3) Mewujudkan Kota yang Sejahtera

Unggulan Kota Bogor:

- 1) Pengembangan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penguatan Spritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani;
- 3) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Transparan dan Melayani.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.9 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2022

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	DINAS KESEHATAN	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga



		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota



		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota
7	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
8	DINAS DAMKAR	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah



		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
9	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
		10	DINAS SOSIAL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota				
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota				
Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya				
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
11	DINAS TENAGA	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		

	KERJA DAN TRANSMIGRASI	<p>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</p> <p>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</p>	
12	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<p>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten</p>	
		<p>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
		<p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
		<p>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p>	
			<p>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</p>
			<p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
			13
	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>		
	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>		
	<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>		
	<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>		
	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>		



		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten / kota
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pencegahan / Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah



		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyusunan Profil Kependudukan
16	DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
17	DINAS PERHUBUNGAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota



		<p>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p> <p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota</p> <p>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p>
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</p>
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</p> <p>Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota</p> <p>Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupten/Kota</p> <p>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.</p> <p>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p>

		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berpa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
23	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Perpustakaan Tk Daerah Kab/Kota Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penataan Organisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
25	SEKRETARIAT	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penataan Organisasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Administrasi Tata Pemerintahan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Kerjasama Daerah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
27	KECAMATAN BOGOR UTARA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pemberdayaan Kelurahan



		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),		
28	KECAMATAN BOGOR TENGAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Administrasi Keuangan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desaa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
		Pemberdayaan Kelurahan		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),		
		29	KECAMATAN TANAH SAREAL	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desaa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
Pemberdayaan Kelurahan				
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),				
30	INSPEKTORAT			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas
		Pendampingan dan Asistensi
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
32	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



MANUSIA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	Mutasi dan Promosi ASN
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Pengembangan Kompetensi ASN
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sumber data Bappeda Kota Bogor

Tabel 1.10

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
1 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes / RSUD
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes / RSUD
		3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DinkesDinas Kesehatan
		4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB
		5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		6. Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
		7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
	2. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dispora

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
	3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DLH
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
		4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		5. Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
		6. Program Pengembangan Perumahan	Disperumkim
		7. Program Kawasan Permukiman	Disperumkim
		8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Disperumkim
		9. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DPKP
		10. Program Pengelolaan Persampahan	DLH
	4. Terkendalinya Sumber-sumber Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Program Pengelolaan SumberDaya Air (SDA)	DPUPR
		2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
		5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
	5. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Disperumkim
	6. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		2. Program Pengembangan Kurikulum	Disdik
		3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Disdik
		5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Disdik
	7. Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPA
		2. Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA
		3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
		4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dispora
		5. Program Pembinaan Perpustakaan	Dispora

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
	8. Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
	9. Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
		3. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA
		4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPA
		5. Program Perlindungan Perempuan	DPPPA
		6. Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
		7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disparbud
		8. Program Pembinaan Sejarah	Disparbud
		9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disparbud
		10. Program Pengelolaan Permuseuman	Disparbud
		11. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos
		12. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Bag. Kesra
		13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan
		14. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		15. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		16. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
		17. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
		18. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
		19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
		20. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
	10. Menurunnya Tingkat Pengangguran	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
		3. Program Hubungan Industrial	Disnaker
		4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud
	11. Menurunnya Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
		2. Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Dinsos
		5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah		
		6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos		
		7. Program Penanggulangan Bencana	BPBD		
	12. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	1. Program Penanggulangan Bencana	BPBD		
		2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperumkim		
		3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA		
		4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP		
		5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP		
		6. Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP		
		2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1. Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	DinKUKMDagin
				2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DinKUKMDagin
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	DinKUKMDagin				
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DinKUKMDagin				
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DinKUKMDagin				
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DinKUKMDagin				
7. Program Pengembangan Umkm	DinKUKMDagin				
8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP				
9. Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP				



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		10. Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		11. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		12. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPP
		14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPP
		15. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparbud
		16. Program Pemasaran Pariwisata	Disparbud
		17. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparbud
		18. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
		19. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
		20. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
		21. Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
		22. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DinKUKMDagin
		23. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DinKUKMDagin
		24. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DinKUKMDagin
		25. Program Pengembangan Ekspor	DinKUKMDagin

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		26. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DinKUKMDagin
		27. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DinKUKMDagin
		28. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DinKUKMDagin
		29. Program Pengendalian IzinUsaha Industri Kabupaten/Kota	DinKUKMDagin
		30. Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Ekon
		31. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
	2. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		3. Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		4. Program Pengembangan Jasa Kontruksi	DPUPR
		5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
		6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bag. Pem
		7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
	3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
		2. Program Pengelolaan Perkerataapian	Dishub
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
3 Reformasi Birokrasi	1. Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
		2. Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Disdukcapil



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		Kependudukan	
		4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil
		5. Program Pengendalian Penduduk	DPPKB
		6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB
		7. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bag. Pem
		8. Program Penataan Desa	Bag. Pem
		9. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
		10. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo
		11. Program Pengelolaan Arsip	Diarpus
		12. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Diarpus
		13. Program Perijinan Penggunaan Arsip	Diarpus
		14. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda : Bag. kesra/ Bag. Huk. HAM / Bag. Pem
		15. Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Adbang
		16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bag. Umum/Bag. Prokompim /Bag. Org/Itda/ seluruh perangkat daerah
		17. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
		18. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul Program	Perangkat Daerah
		19. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
		21. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
		22. Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		23. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		24. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Itda
		25. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Itda
		26. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Itda
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	1. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
		3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo

(Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024)

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian



otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan keikhlasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Bogor menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penerapan Standar pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bogor menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.



E. FOKUS LAYANAN

Fokus layanan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yaitu di 6 (enam) urusan , sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Bidang Sosial

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor pada Tahun 2022 sebesar 77,17 atau naik 0.58 poin dari 2021 sebesar 76,59 . Adapun demikian , beberapa indikator yang membangun IPM mengalami peningkatan capaian :

Indikator lain pada IPM :

- Rata-rata Lama Sekolah menyentuh angka 10,58 atau naik 0,05 dari tahun 2021, dan capaian ini diatas Nasional yaitu 8,69 dan juga diatas Provinsi Jawa Barat yaitu 8,78
- Harapan lama Sekolah di tahun 2022 mencapai 13,43 sedangkan di tahun 2021 mencapai 13,42 atau naik 0,01, capaian ini diatas Nasional yaitu 13,10 dan masih diatas Provinsi Jawa Barat yaitu 12,62
- Angka harapan Hidup di tahun 2022 mencapai angka 74,13 sedangkan di Tahun 2021 mencapai 73,82 mengalami kenaikan 0,31%
- Pengurangan per Kapita di Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 342.000 (1,89%) dari 11.716.00 di Tahun 2021 meningkat menjadi 12.058.000 di Tahun 2022. Pengeluaran per Kapita Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Barat dan Nasional, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 101,97%



Tabel 2.1.1 Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Makro		Laju
			2021	2022	Kinerja 2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	76,59	77,17	0.757%
2.	Angka Kemiskinan	%	7,24	7,10	-1,934%
3.	Angka Pengangguran	%	11,79	10,78	-8,567%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,76	5,65	50,256%
5.	Pendapatan Per-Kapita	Dalam Juta (Rp.)	45,92	49,75	8,341%
6.	Ketimpangan Pendapatan	Angka	0,441	0,430	-2,494%

(Sumber : BPS DAN Bappeda Kota Bogor)

b. Presentase Angka Kemiskinan

1. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,14% , dimana jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 7,10% , hal ini dapat terwujud melalui upaya Bersama dan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk terus mengentaskan kemiskinan dimana penurunan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil positif. Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor tercatat mengalami penurunan dari sebesar 80.090 jiwa pada Tahun 2021 menjadi sebesar 79.150 jiwa dari total penduduk Kota Bogor sebesar 1.099.422 jiwa (data semester I Tahun 2022).
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka menekan angka kemiskinan adalah dengan sedapat mungkin untuk tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan untuk membantu pemulihan ekonomi warga di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu juga dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

agar lebih valid dan tepat sasaran.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Seiring dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi Jabar pada tahun 2022, maka terjadi pula percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor Tahun 2022 dimana pertumbuhan ekonomi kota Bogor berkisar 3,76% dan pada tahun selanjutnya menunjukkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi yang telah dirilis oleh BPS dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 ialah sebesar 5,65%.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,78% yang pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 11,79%. Dikarenakan wabah pandemic covid 19 yang dialami negara kita sudah membaik, dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana negara masih menghadapi tingginya pandemic covid 19.

e. Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan Per-Kapita sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai Pendapatan per kapita. Berdasarkan Pendapatan per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap penduduk di suatu daerah. Apabila melihat tren sampai dengan tahun 2021 , tercatat angka Pendapatan per kapita pada tahun 2021 sebesar Rp. 45,920 juta. Berdasarkan data Pendapatan per Kapita dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dirilis oleh BPS, Pendapatan per Kapita pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 49,750 juta

f. Indeks gini Rasio

1. Indeks gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi



kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2022 adalah sebesar 0,44 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang.

2. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja pada prinsipnya program yang dilaksanakan sama dengan program penanggulangan kemiskinan. Tambahannya berupa program pemantauan harga – harga barang pokok di Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan operasi pasar apabila ditemukan fluktuasi harga karena penurunan pasokan barang pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan gula putih.
3. Perlunya penajaman penentuan sasaran bantuan program penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu secara berkala dan berkualitas. Selain itu, diperlukan operasi pasar yang lebih rutin untuk mencegah penambahan pengeluaran Rumah Tangga Sasaran.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Tabel 2.2 1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
1	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi	101	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Dari pemerintah daerah	4484	SDA	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	618	SDA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	204	SDA	
		Jumlah pendidik pada PAUD	1187	SDA	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan Anak usia dini	222	SDA	
		Jumlah kepala	20		



		sekolah PAUD yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala Satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah		SDA	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	388	SDA	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar Peserta didik dari pemerintah daerah	189	SDA	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	428	SDA	
		Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah dasar yang menerima pembebasan	20139	SDA	



		biaya pendidikan			
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20741	SDA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	377	SDA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	222	SDA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4766	SDA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2361	SDA	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	127	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	177	SDA	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	435	SDA	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	417	SDA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2014	SDA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat Pendidik	1171	SDA	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	247	SDA	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala sekolah	82	SDA	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	523	SDA	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	320	SDA	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	26	SDA	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Dari Pemerintah Daerah	2.354	SDA	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.158	SDA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	60	SDA	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	399	SDA	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	249	SDA	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	247	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	32	SDA	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	22 RS	Dinas Kesehatan Kota Bogor	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	22 RS	SDA	
		Jumlah dukungan Logistik kesehatan yang tersedia	142.448	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	463	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	55.089	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar	463	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	105.780	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	463	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	770.804	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	463	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.888	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	380	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.906	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	1.626	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	500	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	331	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	125	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	300	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai Standar	50	SDA	
		Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	25	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	50	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.000	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	38	SDA	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.073	SDA	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	117	SDA	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	68,1 Ha	Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bogor	
		Panjang sungai di kawasan Permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	73,5 km	SDA	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/kota (ha)	0	SDA	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/kota (ha)	0	SDA	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencan pengelolaan SD air WS kewenangan kabupaten/kota	0	SDA	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana Pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	SDA	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota	0	SDA	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	1.01	SDA	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	1	SDA	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	1.09	SDA	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ada	SDA	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	tidak	SDA	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ada	SDA	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	SDA	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain	1	SDA	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Menggunakan SPALD S	6.267	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	6.862	SDA	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	13.129	SDA	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	848	SDA	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	848	SDA	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	848	SDA	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	SDA	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	2.59	SDA	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2.84	SDA	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	2.59	SDA	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	98.74	SDA	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	23.33	SDA	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	78.45	SDA	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	121.14	SDA	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	SDA	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	295	SDA	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Tidak	SDA	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	SDA	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	7	SDA	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	SDA	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	6804	SDA	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	6807	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	859.98	SDA	
		Panjang jalan yang dibangun	162.8	SDA	
		Panjang jembatan yang dibangun	87.86	SDA	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	276.05	SDA	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	24.1	SDA	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	48.738	SDA	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	130.3	SDA	
		Panjang jalan yang dipelihara	40982.51	SDA	
		Panjang jembatan yang dipelihara	7403	SDA	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	17	SDA	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	50	SDA	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	43	SDA	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	SDA	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	1.415	SDA	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	SDA	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	SDA	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1.526	SDA	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	SDA	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri	3	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	50	SDA	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	43	SDA	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	264	SDA	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	SDA	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	SDA	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	SDA	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	SDA	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	240	SDA	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	SDA	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	1526	SDA	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	264	SDA	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	SDA	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	SDA	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	SDA	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	90	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Penduduk Kota Bogor	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	90	SDA	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	90	SDA	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	90	SDA	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	SDA	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	SDA	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	SDA	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	90	SDA	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	1.273.435	SDA	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	SDA	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	SDA	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	SDA	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah	0	SDA	



		layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	SDA	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran		
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	238.86	SDA			
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	914	SDA			
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	11.26	SDA			
		Jumlah rumah di kab/kota	241744	SDA			
		Jumlah unit PK RTLH	5291	SDA			
		Jumlah rumah tidak layak huni	43066	SDA			
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	SDA			
		Rasio rumah dan KK	0.7	SDA			
		Jumlah rumah pembangunan baru	0	SDA			
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	399	SDA			
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	25720	SDA			
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	25720	SDA			
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	25720	SDA			
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	25720	SDA			
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	25720	SDA			
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	SDA			
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	SDA			
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	SDA			
		5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	252	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
				Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	770	SDA	
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	40			SDA			
Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6			SDA			
Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	14			SDA			
Tersedianya sarana prasarana minimal	738			SDA			
Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100			Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor			
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	2.7			SDA			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	SDA	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	25	SDA	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0.694	SDA	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	28.135	SDA	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan saranaprasarana penanggulangan bencana	2746	SDA	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	2746	SDA	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	SDA	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	SDA	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	SDA	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	2730	SDA	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	312	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3	SDA	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	21	SDA	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	3	SDA	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	259	SDA	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	46	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	428	SDA	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	46	SDA	
6.	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1341	Dinas Sosial Kota Bogor	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	863	SDA	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	611	SDA	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	6	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	402	SDA	
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	29	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	225	SDA	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1	SDA	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	7	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	36	SDA	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	SDA	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	6	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	1318	SDA	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat	0	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	60	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	336	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	225	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	748	SDA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	336	SDA	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	2361	SDA	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	31	SDA	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	167	SDA	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	500	SDA	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	35	SDA	
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	75	SDA	
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	SDA	
		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	150	SDA	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	13.89	SDA	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	8.06	SDA	
		Persentase LPK yang terakreditasi	44.74	SDA	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	SDA	
		Jumlah penganggur yang dilatih	4827	SDA	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	49.8	SDA	
		Persentase penyerapan lulusan	84.69	SDA	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	16.93	SDA	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	SDA	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	SDA	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	6.1	SDA	
		Data tingkat produktivitas total	17.17	SDA	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	69.9	SDA	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	78.57	SDA	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	17	SDA	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100	SDA	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	62.44	SDA	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	100	SDA	
		Jumlah mogok kerja	0	SDA	
		Jumlah penutupan perusahaan	0	SDA	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	SDA	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	SDA	
		Jumlah perselisihan PHK	11	SDA	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	397	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	8	SDA	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	SDA	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	50	SDA	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	2939	SDA	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3220	SDA	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	32	SDA	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	30	SDA	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	SDA	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	SDA	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota	1687	SDA	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	69	SDA	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100	SDA	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	61	SDA	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan yang diterbitkan	0	SDA	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100	SDA	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	SDA	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	35	SDA	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	6	SDA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	5	SDA	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	SDA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	SDA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	SDA	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	4	SDA	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	340	SDA	
		Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	167	SDA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2	SDA	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	SDA	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	SDA	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	SDA	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	0	SDA	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	SDA	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	SDA	
		Tertanganinya kerawanan pangan	1	SDA	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	1	SDA	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	SDA	
10	Pertahanan	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	-	SDA	
		SK Bupati/Wali koa tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	-	SDA	
		Dokumen Izin Membuka Tanah Kabupaten/Kota	-	SDA	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	-	SDA	
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	51.39	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	98.36	SDA	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	23.44	SDA	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	81.316	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	64	SDA	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	4	SDA	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	SDA	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	60	SDA	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	14	SDA	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	270732	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
		Penerbitan akta perceraian	7916	SDA	
		Penerbitan akta kematian	8675	SDA	
		Penyajian data kependudukan	21	SDA	
13	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	SDA	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan Kegiatan ekonomi produktif dan pemerdayaan	0	SDA	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-	SDA	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	12.06	SDA	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	83.08	SDA	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	17	SDA	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	83.33	SDA	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	78.66	SDA	
		Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	-	SDA	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	9.64	SDA	
		Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah	57.99	SDA	
Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	94.2	SDA			
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	37.5	Dinas Perhubungan Kota Bogor	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	84.44	SDA	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	5000	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	SDA	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	97	SDA	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	SDA	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	SDA	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	SDA	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	66.6	SDA	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	SDA	
		Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4.05	SDA	
		Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	SDA	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	2.25	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	38.89	SDA	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	38.89	SDA	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	31	SDA	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	SDA	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	SDA	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	55	SDA	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	19	SDA	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	158	SDA	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	SDA	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	SDA	
17	Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.64	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Masyarakat Kota Bogor	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	SDA	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.76	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11.58	SDA	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16.52	SDA	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti Pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.52	SDA	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.28	SDA	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	1.75	SDA	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13.56	SDA	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.75	SDA	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.8	SDA	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.72	SDA	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.55	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	41	SDA	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0.94	SDA	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.2	SDA	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	4	SDA	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.5	SDA	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.4	SDA	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1.1	SDA	
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	SDA	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	SDA	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	SDA	
		Kegiatan pameran penanaman modal	1	SDA	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	64	SDA	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	316	SDA	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	21773	SDA	
		Laporan realisasi penanaman modal	1571444371678	SDA	
		Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat serta kabupaten/kota	3	SDA	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	253	SDA	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi Kabupaten/kota	2	SDA	
18	Penanaman Modal				



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	120	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	SDA	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	375	SDA	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	60	SDA	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	102	SDA	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3	SDA	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	SDA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	181	SDA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	SDA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	7	SDA	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0	SDA	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	3	SDA	
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor	
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	90	SDA	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko	0	SDA	



		kategori rendah			
--	--	-----------------	--	--	--

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	81	SDA	
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	32	SDA	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	20	SDA	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	-	SDA	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	32	SDA	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	-	SDA	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	SDA	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	SDA	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	-	SDA	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	40834	SDA	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	129295	SDA	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	-	SDA	



		kabupaten/kota			
No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	SDA	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1	SDA	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	SDA	
		Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	27	SDA	
		Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	10	SDA	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-	SDA	
		Penyelenggaraan Kegiatan Museum yang melibatkan masyarakat	33	SDA	
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	4.14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Presentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0.477	SDA	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.062	SDA	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.068	SDA	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	6502	SDA	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	SDA	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	SDA	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	SDA	
24	Kearsipan	Presentasse arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Presentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	SDA	
		Presentase arsip statis yang telah dibuatkan saran bantu temu balik	47.64	SDA	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0.073	SDA	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	3876	SDA	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	SDA	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	SDA	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1	SDA	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	SDA	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	SDA	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	SDA	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	157	SDA	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	19880100	SDA	
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	20	SDA	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	3655	SDA	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	48922	SDA	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2	SDA	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	-	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	-	SDA	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	-	SDA	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	200	SDA	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3	SDA	
27	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	67	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Prasarana pertanian yang digunakan	10	SDA	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	SDA	
		Persentase prasarana yang digunakan	100	SDA	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	SDA	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	SDA	
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	SDA	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	SDA	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	SDA	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0	SDA	
		Persentase penerbitan TDG	55.55	SDA	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	23.07	SDA	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	75	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keluaran
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	SDA	
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	SDA	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	SDA	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8.52	SDA	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	51.62	SDA	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	24.45	SDA	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	97.74	SDA	
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0	SDA	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	SDA	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	SDA	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	10.07	SDA	
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	SDA	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	SDA	

Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{20441}{38274} \times 100\%$ = 53.407%	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{119095}{117242} \times 100\%$ = 101.58%	SDA	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{52236}{56401} \times 100\%$ = 92.615%	SDA	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{11027}{14964} \times 100\%$ = 73.69%	SDA	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{3153}{1126927} \times 100\%$ = 0.28%	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{21}{22} \times 100\%$ = 95.455%	SDA	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{19470}{19238} \times 100\%$ = 101.206%	SDA	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{17672}{18363} \times 100\%$ = 96.237%	SDA	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{17630}{17476} \times 100\%$ = 100.881%	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{80090}{84729} \times 100\%$ = 94.525%	SDA	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{170996}{170996} \times 100\%$ = 100%	SDA	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{787616}{755429} \times 100\%$ = 104.261%	SDA	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{72485}{72485} \times 100\%$ = 100%	SDA	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{63579}{61350} \times 100\%$ = 103.633 %	SDA	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{17670}{17042} \times 100\%$ = 103.685%		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1777}{1578} \times 100\%$ = 112.611 %	SDA	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{22333}{19936} \times 100\%$ = 112.023 %	SDA	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{26467}{24267} \times 100\%$ = 109.066%	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{35.54}{68.1} \times 100\%$ = 52.188%	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	1/1 = 100 (Bogor tidak memiliki area pantai)	SDA	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{154.61}{220.34} \times 100\%$ = 70.169%	SDA	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{203173}{241744} \times 100\%$ = 84.045%	SDA	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{189646}{241744} \times 100\%$ = 78.449%	SDA	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{229}{295} \times 100\%$ = 77.627%	SDA	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{246483}{274947} \times 100\%$ = 89.647%	SDA	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{93}{240} \times 100\%$ = 38.75%	SDA	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{803}{803} \times 100\%$ = 100%	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{90}{90} \times 100\%$ = 100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Penduduk Kota Bogor	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Nihil 1/1 = 100	SDA	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{11.26}{238.86} \times 100\%$ = 4.714%	SDA	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{43.066}{241744} \times 100\%$ = 0.018%	SDA	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{25720}{241744} \times 100\%$ = 10.639%	SDA	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{252}{252} \times 100\%$ = 100%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{40}{40} \times 100\%$ = 100%	SDA	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{26600}{26600} \times 100\%$ = 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{61564}{61564} \times 100\%$ = 100%	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{2730}{2730} \times 100\%$ = 100%	SDA	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{86}{86} \times 100\%$ = 100%	Pamong Praja Kota Bogor	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9.3 menit	SDA	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{1341}{1341} \times 100\%$ = 100%	Dinas Sosial Kota Bogor	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{2361}{2361} \times 100\%$ = 100%	SDA	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{8}{12} \times 100\%$ = 66.667%	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{85733}{496570} \times 100\%$ = 17.265	SDA	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{35258870.02}{496570} \times 100\%$ = 7100.483%	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{1154}{2039} \times 100\%$ = 56.596%	SDA	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{3319}{3220} \times 100\%$ = 103.075%	SDA	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{94847492677}{2478905469122} \times 100\%$ = 3.826%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{62}{341115} \times 100\%$ = 0.018	SDA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{64}{543880} \times 100\%$ = 11.767%	SDA	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{829}{402646.02} \times 100\%$ = 0.206%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{486774}{486774} \times 100\%$ = 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$1689/2 \times 100 = 84450$	SDA	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Nihil $1/1 = 100$	SDA	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Nihil $1/1 = 100$	BPN Kota Bogor	
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{20}{20} \times 100\%$ $= 100\%$	Sekretariat Daerah Kota Bogor	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH = 64,29	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{536.403}{659.653} \times 100\%$ $= 81.316$	SDA	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{126}{134} \times 100\%$ $= 94.03\%$	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	$\frac{787670}{793129} \times 100\%$ = 99.312%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{315312}{486651} \times 100\%$ = 64.792%	SDA	
		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{314480}{325869} \times 100\%$ = 96.505%	SDA	
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{23}{36} \times 100\%$ = 63.889%	SDA	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100$	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	TFR (Angka Kelahiran Total)
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{117680}{149610} \times 100\%$ = 78.658%	SDA	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{18632}{149610} \times 100\%$ = 12.454%	SDA	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.78	Dinas Perhubungan Kota Bogor	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.6	SDA	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{142}{146} \times 100\%$ = 97.26%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{138}{222} \times 100\%$ = 62.162%	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{821254}{1099422} \times 100\%$ = 74.699%	SDA	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{72}{528} \times 100\%$ = 13.636%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Masyarakat Kota Bogor	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	$\frac{19911}{48346} \times 100\%$ = 41.184%	SDA	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{952972264191}{618472107486} \times 100\%$ = 154.085%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{297}{263165} \times 100\%$ = 0.113%	Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{6047}{263165} \times 100\%$ = 2.298%	SDA	
		Peningkatan prestasi olahraga	241 medali	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{34}{36} \times 100\%$ = 94.444%	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{34}{36} \times 100\%$ = 94.444%	SDA	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{501}{645} \times 100\%$ = 77.674%	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{32}{32} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65.02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3.02	SDA	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	61.93	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	646.17	SDA	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	$\frac{5211.13}{5253.9} \times 100\%$ = 99.186%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{5954}{42968} \times 100\%$ = 13.857%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{1434033}{3691372} \times 100\%$ = 38.848%	SDA	
		Tingkat hunian akomodasi	$\frac{891923}{1370548} \times 100\%$ = 65.078%	SDA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{2351.86}{48324.14} \times 100\%$ = 4.867%	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-----	---------------------	-------------------------------	-----------------	-------------	------------



		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{287860632150}{1147619218758.9} \times 100\%$ = 25.083%	SDA	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	$\frac{15904.7}{1231} \times 100\%$ = 1292.015%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	$\frac{9}{420} \times 100\%$ = 2.143%	SDA	
28	Kehutanan		Nihil 1/1 =100		
29	Energi Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Nihil 1/1 =100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Nihil 1/1 = 100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{119524}{121866} \times 100\%$ = 98.08%	SDA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	$\frac{109637}{448457} \times 100\%$ = 24.45%	SDA	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	$\frac{86}{1189} \times 100\%$ = 7.233%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Nihil	SDA	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{34}{34} \times 100\%$ = 100%	SDA	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{1}{1} \times 100$ = 100	SDA	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	$\frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$	SDA	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70	SDA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
32	Transmigrasi		Nihil 0		

Tabel 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{598692609719}{2986354433003} \times 100\%$ = 20.04%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor	
		Rasio PAD	$\frac{1147619218758.9}{2787105049274.9} \times 100\%$ = 41.176%	Badan Pendapatan Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.988	Inspektorat Daerah Kota Bogor	Tercapai
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.38	SDA	Tercapai
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{2340951646388}{2986354433003} \times 100\%$ = 78.39%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	
		Opini Laporan Keuangan	100	SDA	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{1} \times 100\%$ = 0%	Sekretariat Daerah Kota Bogor	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{8719}{13220} \times 100\%$ = 65.953%	SDA	



No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{1725458790265}{3184747280169} \times 100\%$ = 54.179%	SDA	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{365994695358}{454700601464} \times 100\%$ = 80.491%	SDA	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1685}{1269} \times 100\%$ = 132.782	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kota Bogor	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{625}{2954} \times 100\%$ = 21.158%	SDA	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{361}{625} \times 100\%$ = 57.76%	SDA	
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{2986354433003}{2521674128932} \times 100\%$ = 18.43%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Bogor	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{1147619218758.9}{1110709515915} \times 100\%$ = 3.32%	SDA	
		Manajemen Aset	100	SDA	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{365001935698.42}{2636065820905} \times 100\%$ = 13.85%	SDA	



5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	$\frac{2340951646388}{2986354433003} \times 100\%$ = 78.388%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	$\frac{11}{12} \times 100\%$ = 91.667%	SDA	



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan kemudian selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022. Berikut sasaran dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bogor tahun 2022:

Tabel 2.3.1 Target Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	73,93	Tahun
2	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1	Rumah Tangga Ber-PHBS	70	Persen
		2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	49	Persen
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman	1	Rumah tangga yang dilayani air minum yang layak	80,62	Persen
		2	Rumah tangga yang dilayani air minum yang aman (perpipaan)	64,28	Persen
		3	Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	70,93	Persen
		4	Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman	7,20	Persen
			Luasan Kawasan kumuh kewenangan kota	2,12	Persen
			Reduksi Sampah	6,80	Persen
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan	1	Indeks kualitas air	49,80	Point
		2	Indeks Kualitas Udara	86,10	Point

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
5	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1	Luas ruang terbuka hijau publik	4,21	Persen

Tabel 2.3.2 Target Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal (<i>Smart People</i>)	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,62	Tahun
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,63	Tahun
2	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Kategori
3	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,50	Point
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	71,50	Angka
4	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	A	Predikat
5	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>smart city</i>)	1	Level Kematangan <i>Smart City</i>	Integrative	Level



Tabel 2.3 3 Target Misi III : Mewujudkan Bogor Kota yang Sejahtera

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Menurunnya tingkat pengangguran	1 Tingkat pengangguran terbuka	11,32	Persen
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1 Angka kemiskinan	6,90	Persen
3	Meningkatnya ketahanan keluarga	1 Indeks Ketahanan Keluarga	75-77	Angka
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	35,013	Trilyun Rp.
		2 PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	45,10	Juta Rp.
		3 Pengeluaran per kapita	11.534,00	Ribu Rp.
		4 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	23,00	Persen
5	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1 % realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	60	Persen
		2 % realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	60	Persen
6	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1 % Jalan yang berkondisi mantap	86,00	Persen
		2 % cakupan pelayanan angkutan umum	44,00	Persen

2.3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.3 4 Capaian Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	73,93	74,13	100,27
2	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1 Rumah Tangga Ber-PHBS	70	70,02	100,03
		2 Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	49	56,91	116,14
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman	1 Rumah tangga yang dilayani air minum yang layak	80,62	84,04	104,24
		2 Rumah tangga yang dilayani air minum yang aman	64,28	68,68	106,85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		(perpipaan)			
		3 Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	70,93	73,02	102,95
		4 Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman	7,20	5,42	75,28
		5 Luasan Kawasan kumuh kewenangan kota	2,12	2,02	104,92
		6 Reduksi Sampah	6,80	7,80	114,71
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan	1 Indeks kualitas air	49,80	51,39	103,19
		2 Indeks Kualitas Udara	86,10	98,36	114,24
5	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1 Luas ruang terbuka hijau publik	4,21	4,24	100,71

Tabel 2.3 5 Capaian Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal (<i>Smart People</i>)	1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,62	10,58	99,62
		2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,63	13,43	98,53
2	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1 Kategori Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100
3	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat	1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,50	72,33	101,16
		2 Indeks Kerukunan Umat Beragama	71,50	78,17	109,33
4	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	A	BB	88,44



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>smart city</i>)	1 Level Kematangan <i>Smart City</i>	Integrative	Integrative	100

Tabel 2.3 6 Capaian Misi III : Mewujudkan Bogor Kota yang Sejahtera

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pengangguran	1 Tingkat pengangguran terbuka	11,32	10,78	104,77
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1 Angka kemiskinan	6,90	7,1	97,1
3	Meningkatnya ketahanan keluarga	1 Indeks Ketahanan Keluarga	75-77	85,2* (2020)	113,6
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	35,013	35,259	100,70
		2 PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	45,10	53	117,33
		3 Pengeluaran per kapita	11.534,00	12,058	104,54
		4 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	23,00	18,7	81,30
5	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1 Realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	60	26,05	43,42
		2 Realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	60	38,61	64,35

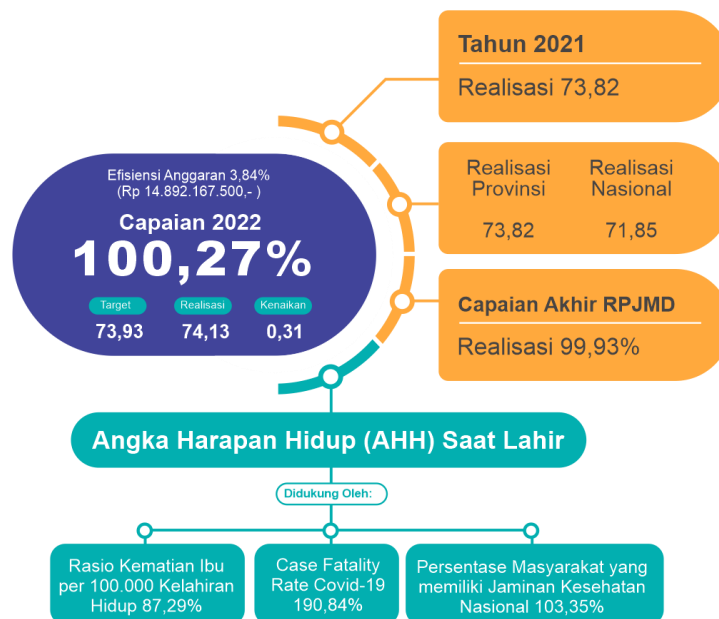
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
6	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Jalan yang berkondisi mantap	86	88,23	102,59
		2	Cakupan pelayanan angkutan umum	44	42,15	95,80

MISI 1 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT

Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini diukur oleh Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan, Rumah sakit Umum Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir



Gambar 2.3.1 Capaian Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AHH merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka ini memperlihatkan semakin tinggi rata-rata usia suatu penduduk, maka diperkirakan semakin lama pula penduduk tersebut dapat hidup. Angka harapan hidup ini erat kaitannya dengan kematian bayi. Semakin tinggi angka kematian bayi, semakin rendah pula angka harapan hidup.

Angka harapan hidup Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 74,13 tahun dan meningkat 0,31 poin dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang sebesar 73,52, capaian AHH Kota Bogor lebih tinggi 0,61 poin dan lebih tinggi 2,28 poin dari capaian nasional. Capaian kinerja indikator AHH pada tahun 2022 telah melebihi target yaitu mencapai 100,27%, dan mencapai 99,93% terhadap target akhir RPJMD.

Grafik 2.3 1 Angka Harapan Hidup Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022



Sumber: BPS (2022)

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Bogor dipengaruhi oleh menurunnya angka kematian ibu. Jumlah kematian ibu pada tahun 2022 menurun

sebanyak 4 orang dari tahun sebelumnya yaitu dari 17 orang pada tahun 2021 menjadi 13 orang pada tahun 2022. Capaian tersebut melalui berbagai upaya yang dilakukan yaitu adanya peningkatan kompetensi petugas dalam tata laksana kegawatdaruratan maternal dan tindakan pra rujukan serta melakukan upaya deteksi dini faktor resiko dan pemantauan pada ibu hamil dengan faktor resiko. Selain itu dilakukan juga upaya edukasi dan konseling terhadap keluarga dan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran dan perubahan perilaku terkait pentingnya menjaga ibu hamil dan merencanakan persalinan sehat dan aman.

Selain mengurangi angka kematian ibu, dilakukan juga berbagai upaya untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita yaitu melakukan Edukasi dan konseling gizi pada ibu hamil, pemantauan pada ibu hamil KEK dan pemberian makanan tambahan serta peningkatan kompetensi terkait tatalaksana kegawatdaruratan neonatal/bayi, serta Memfokuskan program gizi tidak hanya pada yang malnutrisi tapi pada yang overnutrisi.

Upaya selanjutnya yaitu dengan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap usia pendidikan dasar, terhadap kesehatan usia produktif, terhadap kesehatan usia lanjut, terhadap kesehatan penderita hipertensi, terhadap kesehatan penderita diabetes mellitus, terhadap kesehatan orang terduga penyakit tuberculosis, terhadap kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, terhadap kesehatan bagi penduduk terdapat krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, serta terhadap pelayanan kesehatan gizi masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan pelayanan kesehatan melalui BPJS dimana pada tahun 2021 penduduk yang terlayani BPJS sebanyak 972.844 orang meningkat menjadi 1.056.709 orang pada tahun 2022. Dan pada bulan Desember tahun 2022 Kota Bogor telah mencapai UHC (Universal Health Coverage) di 96,11 % dengan capaian tingkat keaktifan 70,30%. Dengan tercapainya UHC, banyak manfaat yang dirasakan yaitu:

- Bagi peserta BPJS PBI, kepesertaannya dapat langsung aktif, tidak ada masa tunggu 14 hari sehingga dapat langsung mendapat pelayanan kesehatan;
- Pendaftaran PBI APBD tidak lagi harus dilakukan secara kolektif 1 bulan sebelumnya, kepesertaan yang urgent/darurat dapat langsung aktif 1 hari;
- Peserta menunggak dan tidak mampu membayar tunggakan saat



mebutuhkan layanan kesehatan, dapat langsung didaftarkan ke PBI APBD serta langsung aktif sehingga tidak terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan

- Minimalisasi penggunaan Jamkesda Kota Bogor sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas anggaran APBD Kota Bogor.

Program lain yang juga menunjang AHH adalah Bogor Anjang Sehat (BAS) merupakan kunjungan rumah yang dilakukan oleh tim puskesmas yang terdiri dari dokter bersama tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan permasalahan kesehatan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah dengan tujuan mendekatkan akses layanan kesehatan dan meningkatkan jangkauan sasaran. Di tahun 2021 program BAS telah dilaksanakan sebanyak 3.054 kali atau mencapai 89,82% dari target. Di tahun 2022 program BAS telah melakukan kunjungan rumah sebanyak 3600 kali atau mencapai 102% dari target (3500).

Selain itu terdapat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) yang merupakan suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Pencapaian angka IKS Kota Bogor di Desember 2022 adalah 0,40 dari target 0,40. Adapun 12 indikator PIS PK adalah:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana;
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat ASI eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditinggalkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Seluruh anggota keluarga sudah menjadi peserta JKN;
11. Keluarga mempunyai akses air bersih; dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Dari sisi kesehatan lingkungan, kenaikan indikator kinerja didukung oleh perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang mencapai 70,02%, peningkatan Akses sanitasi terhadap air bersih yang mencapai 98,93%, serta peningkatan Akses jamban sehat dengan capaian 81,21%.Capaian tersebut didukung melalui adanya Pelatihan wirausaha sanitasi Workshop sistem pelaporan berbasis web program kesehatan lingkungan bagi sanitarian puskesmas, pemeriksaan kualitas air, makanan pusat isolasi dengan tujuan agar terlaksananya pengawasan kualitas air dan makanan pada pusat isolasi, adanya pemutakhiran data sanitasi, pengelolaan limbah medis vaksinasi massal Covid-19, pengelolaan limbah medis pusat isolasi, penyediaan jasa laundry linen infeksius pusat isolasi non fasyankes, penyediaan jasa laundry linen vaksinasi massal, serta pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengelolaan Limbah B3 (BOK).

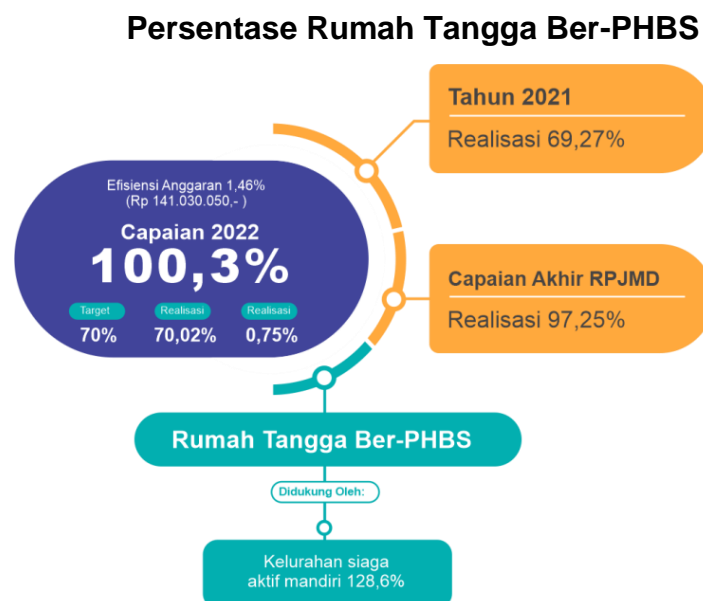
Peningkatan capaian Case Fatality Rate (CFR) pada tahun 2022 juga mendukung peningkatan capaian AHH dimana terdapat penurunan terhadap pasien Covid-19 yang meninggal yaitu pada tahun 2021 dari 32.280 pasien covid yang meninggal sebanyak 397 orang, menurun di tahun 2022 dari 30.027 pasien covid yang meninggal sebanyak 33 orang. Sampai dengan tahun 2022 juga telah dilakukan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan capaian diatas 100%.

Program yang mendukung pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) meliputi 7 (tujuh) program salah satunya yaitu Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis diatas sebesar 3,84% atau setara dengan Rp. 14.892.167.500.

Sasaran 2 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Manfaat PHBS untuk masyarakat adalah agar masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar, mampu mengupayakan lingkungan yang sehat serta mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan.

Sasaran ini diukur oleh Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan serta Dinas Pemuda dan Olahraga.



Gambar 2.3 2 Capaian Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

Rumah Tangga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ditentukan berdasarkan pencapaian 10 indikator yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan), menimbang bayi dan balita (0-59 bulan) setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan

sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit, dan tidak merokok di dalam rumah. Apabila ada satu atau dua indikator yang tidak terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga tidak ber-PHBS.

Data PHBS Rumah Tangga (RT) diperoleh dari hasil survei pendataan PHBS RT yang dilakukan oleh kader dan petugas promosi kesehatan (promkes) puskesmas di masing-masing RW yang telah diberikan pelatihan. Hasil survei tersebut kemudian dilanjutkan dengan penginputan dan pengolahan data oleh petugas promkes puskesmas. Hasil pengolahan data PHBS RT dari seluruh puskesmas Kota Bogor kemudian dikumpulkan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pengolahan data PHBS RT tingkat kota.

Pada tahun 2022, pendataan dilakukan terhadap 209.261 RT dengan jumlah RT yang ber-PHBS sebesar 146.529 RT (70,02%). Realisasi persentase rumah tangga ber PHBS tahun 2022 sebesar 70,02% telah mencapai target. Perkembangan capaian PHBS tatanan rumah tangga di Kota Bogor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan hasil realisasi persentase rumah tangga ber PHBS tahun 2021 sebesar 69,27% meningkat menjadi 70,02% pada tahun 2022. Terdapat kenaikan realisasi persentase rumah tangga ber PHBS sebesar 0,7% dari realisasi tahun 2021.

Tabel 2.3.7 Realisasi Presentase Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan Tahun 2022

10 INDIKATOR PHBS RUMAH TANGGA	TANAH SAREAL	BOGOR UTARA	BOGOR TENGAH	BOGOR BARAT	BOGOR SELATAN	BOGOR TIMUR
Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	97,22	99,45	99,44	99,79	93,72	99,90
Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	72,68	63,01	66,52	71,92	81,96	60,82
Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	78,14	89,94	89,88	88,23	91,04	96,37
Menggunakan air bersih	98,59	99,50	99,81	99,59	98,53	99,19
Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	98,54	98,52	99,59	99,62	98,71	98,52
Menggunakan jamban sehat	88,18	89,24	71,62	88,53	79,83	82,37



10 INDIKATOR PHBS RUMAH TANGGA	TANAH SAREAL	BOGOR UTARA	BOGOR TENGAH	BOGOR BARAT	BOGOR SELATAN	BOGOR TIMUR
Memberantas jentik nyamuk	97,52	96,14	98,08	98,36	96,80	98,43
Makan sayur dan buah setiap hari	97,03	97,51	98,72	97,92	93,92	98,14
Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	96,34	94,56	97,08	98,33	94,16	90,47
Tidak merokok di dalam rumah	71,67	73,91	70,61	72,59	68,74	68,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor (2022)

Dari 119eseh tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk ber PHBS di beberapa wilayah belum optimal terutama pencapaian 119esehatan “Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)” dan “tidak merokok dalam rumah”. Hal tersebut dapat dilihat dari 119eseh tersebut bahwa 119esehatan terendah masih berada pada 119esehatan ASI eksklusif (0-6 bulan) dan tidak merokok di dalam rumah. Upaya pencapaian target dilakukan secara menyeluruh tanpa mengabaikan intervensi untuk 119esehatan lain. Untuk 119esehatan ASI eksklusif dilakukan berbagai intervensi berupa penyuluhan (baik di Posyandu, pengajian / Majelis Taklim, dll), pembentukan motivator ASI, penyediaan pojok ASI di tempat-tempat umum dan percontohnya di Posyandu, pembentukan Kelas ASI, Kelas Gizi, Kelas PMBA, Pembentukan tim KP-ASI Tingkat Kecamatan/Tingkat Kelurahan (ASI Eksklusif), kemitraan dengan komunitas pendukung ASI, dan sebagainya.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian 119esehatan tidak merokok di dalam rumah yaitu dengan melakukan penyuluhan bahaya asap rokok baik di posyandu, majelis taklim, di rapat-rapat RT, RW atau kelurahan, penempelan himbauan-himbauan tidak merokok di rumah, penempelan stiker rumah tanpa asap rokok, pembentukan komunitas warga tanpa rokok (KWTR), dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan pemberi solusi permasalahan didampingi oleh petugas 119esehatan sebagai fasilitator.

Tabel 2.3.8 Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2019 s/d 2022

No	Indikator PHBS	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	95,0	94.4	93,8	97,7
2	Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	72,4	68.4	70,4	72.1
3	Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	90,5	83.7	85,7	87.1
4	Menggunakan air bersih	98,2	95.5	98,3	99.2
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	96,7	96.3	97,7	98.9
6	Menggunakan jamban sehat	86,2	83.4	85,1	84.7
7	Memberantas jentik nyamuk	96,3	94.8	96,1	97.5
8	Makan sayur dan buah setiap hari	91,9	92.5	95,5	97.0
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	94,4	93.5	94,3	95.7
10	Tidak merokok di dalam rumah	65,8	67.5	70,1	71.3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor (2022)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian PHBS RT per indikatornya setiap tahun berfluktuatif. Dari tabel capaian indikator PHBS RT diketahui ada beberapa capaian indikator yang belum optimal. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan masih serta proses merubah perilaku masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun realisasi persentase rumah tangga ber PHBS tiap tahunnya terjadi kenaikan.

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS pada tahun 2022 telah mencapai target dengan capaian sebesar 100,03%. Dari perspektif target akhir RPJMD, indikator tersebut telah mencapai 97,25%. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut yaitu melalui kegiatan Ngariung Sehat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan menjadi program inovasi dalam meningkatkan persentase rumah tangga ber PHBS. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan di masing-

masing wilayah serta adanya solusi dari permasalahan tersebut sehingga cakupan PHBS RT menjadi meningkat. Selanjutnya dilakukan kampanye PHBS, Germas dan program

kesehatan lainnya dengan melibatkan unsur perangkat daerah, lintas program, media, komunitas, dunia usaha/swasta, serta masyarakat luas untuk meningkatkan peran aktif dan jejaring kemitraan “Pentahelix” sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya.



Gambar 2.3.3 Kegiatan Ngariung Sehat

Peningkatan rumah tangga ber-PHBS dicapai melalui adanya kampanye masif terkait perubahan perilaku masyarakat di berbagai tatanan dengan melibatkan *stakeholder* terkait dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan khususnya PHBS dan Germas. Adanya peningkatan jejaring kemitraan dengan Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan peran kader Dasawisma dalam pembinaan dan peningkatan PHBS di setiap rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya, adanya peningkatan peran serta dan peran aktif organisasi kepemudaan seperti Duta Muda Sehat dan Saka Bakti Husada dalam program kesehatan, adanya deklarasi komitmen dan pembentukan Komunitas Warga Tanpa Rokok (KWTR), dan adanya Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan Puskesmas melalui bimbingan teknis kepada seluruh petugas promkes puskesmas dalam rangka persamaan pemahaman terkait register dan pelaporan promkes, permasalahan di wilayah sekaligus solusi pemecahan masalah termasuk kedalam upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 serta didukung oleh adanya

penyebarluasan informasi kesehatan melalui media promosi kesehatan baik media cetak, media elektronik, media social. Selain itu, pendataan PHBS rumah tangga dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendataan PIS-PK sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai dengan permasalahan PHBS rumah tangga di wilayah.



Gambar 2.3.4 Kegiatan Promosi Kesehatan

Intervensi dan pencapaian PHBS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi seluruh elemen masyarakat sehingga tidak ada alasan masyarakat tidak mendukung dan mengimplementasikan PHBS dalam kehidupan sehari-hari, karena PHBS dapat berdampak pada derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat. Perlu dukungan dan komitmen dari berbagai pihak Pentahelix termasuk Akademisi, Badan usaha / swasta, Komunitas, Pemerintah, dan Media dalam upaya pencapaian PHBS terutama di tatanan rumah tangga.



Gambar 2.3.5 Kegiatan Promosi Kesehatan



Dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan, terdapat kendala yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan rumah tangga ber-PHBS yaitu:

1. Dari Indikator PHBS penggunaan jamban sehat terkendala adanya Sebagian masyarakat masih berorientasi pada bantuan dalam pembangunan jamban, sempitnya lahan untuk pembuatan sarana pembuangan, terkendala alasan ekonomi untuk membangun jamban, serta jamban sehat masih belum menjadi prioritas kebutuhan.
2. Dari indikator PHBS Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan), kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dukungan dari suami dan keluarga akan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi, kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang ASI eksklusif, adanya kendala bagi ibu yang bekerja sehingga bayi diberi susu formula, serta tidak keluarnya ASI dari awal kelahiran sehingga bayi langsung diberi susu formula.
3. Dari indikator PHBS Tidak Merokok di Dalam Rumah, kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok di dalam rumah khususnya bahaya asap rokok bagi perokok pasif, adanya perilaku atau kebiasaan merokok yang sulit diubah dan membutuhkan waktu yang lama, serta belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi orang yang merokok di dalam rumah.

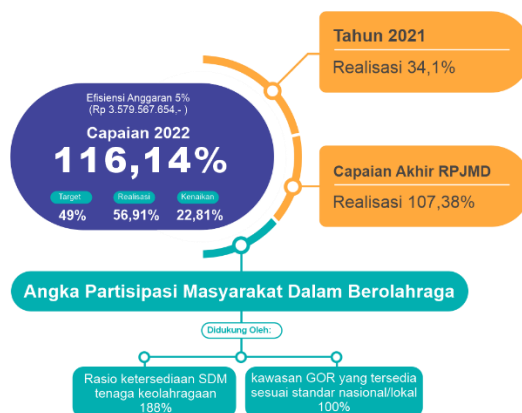
Selanjutnya untuk meningkatkan capaian indikator Persentase Rumah Tangga ber-PHBS pada tahun 2023, akan dilaksanakan berbagai upaya yaitu:

1. Pelaksanaan program inovasi ngariung sehat di wilayah yang memiliki cakupan PHBS RT yang rendah;
2. Pembentukan Komunitas Warga Tanpa Rokok (KWTR) khususnya di wilayah dengan realisasi indikator tidak merokok di dalam rumah yang rendah;
3. Peningkatan sosialisasi melalui penyuluhan maupun media promosi kesehatan baik media cetak, media sosial, media elektronik terkait Jamban sehat, ASI Eksklusif, dan tidak merokok di dalam rumah;

4. Penyuluhan ASI Eksklusif tidak hanya kepada ibu hamil dan ibu menyusui tetapi juga kepada suami dan keluarga agar mendukung pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan;
5. Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kesehatan terutama dalam mendukung indikator tidak merokok di dalam rumah;
6. Adanya kebijakan di masing-masing wilayah seperti Surat Edaran Lurah kepada masyarakat untuk mengakses jamban sehat;
7. Kegiatan pemicuan STBM yang dilaksanakan dengan melibatkan kerja sama dengan kecamatan, kelurahan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, Babinsa dan Babinkamtibmas dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak buang air besar sembarangan dan mendorong masyarakat untuk berusaha memiliki dan menggunakan sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan; dan
8. Adanya bantuan pembangunan sarana jamban dan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) komunal yang bersumber dana dari pemerintah maupun non pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan cakupan pemakaian jamban yang memenuhi syarat kesehatan.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Rumah Tangga Ber PHBS yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis diatas sebesar 1,46% atau setara dengan Rp. 141.030.050,-

Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga



Gambar 2.3.6 Capaian Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga

Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) menunjukkan tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Pengukuran APMO dilakukan oleh tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) melalui survey terhadap masyarakat yang berusia di atas 7 tahun, yang terdiri dari para pelajar/mahasiswa, PNS/TNI/POLRI/BUMN, pegawai swasta, wiraswasta/wirausaha, petani/nelayan dan lainnya dengan sampel sebesar 10% dari setiap strata. Pada tahun 2020 survey telah dilakukan di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur sesuai domisili SP3OR. Dari survey tersebut diperoleh Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga sebesar 0,34.

Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga (APMO) tahun 2022 dapat terealisasi 56,91 %, telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 116,14%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 22,81 poin, dan telah melampaui target akhir RPJMD yaitu telah mencapai 107,38%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga yaitu mengadakan berbagai kegiatan keolahragaan diantaranya pelaksanaan Kejuaraan Sepak Bola Pelajar SMP dan SMA Sederajat se-Kota Bogor Walikota Cup yang diikuti oleh 32 SMP dan 32 SMA, pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Pelajar SMP Sederajat se-Kota Bogor Walikota Cup yang diikuti oleh 32 tim bola voli putra dan 32 tim bola voli putri, serta berpartisipasi dan ikut serta dalam Seleksi Pra (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) POPNAS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mengirimkan 16 atlet voli, 10 atlet sepak takraw, 18 atlet

sepak bola, 20 atlet basket, 8 atlet tennis lapang, 6 atlet tinju, 10 atlet bulutangkis, dan 28 atlet pencak silat.

Upaya lainnya yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atlet-atlet Kota Bogor yang akan diikutsertakan pada event provinsi, nasional dan internasional. Selain itu, untuk mengapresiasi atas pencapaian atlet Kota Bogor juga diberikan penghargaan bagi atlet berprestasi. Pada tahun 2022 pemberian penghargaan tersebut diberikan kepada atlet dan pelatih yang meraih medali pada event Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX 2022 dan Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) Papua XVI 2022 yang terdiri dari 76 atlet dan 13 pelatih.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dibutuhkan dukungan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkondisi baik. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan GOR pada 2 kecamatan yaitu GOR Kecamatan Bogor Utara dan GOR Kecamatan Bogor Selatan. Hal tersebut sejalan dengan target Walikota Bogor yaitu pada akhir RPJMD ditargetkan seluruh Kecamatan telah memiliki GOR sebagai sarana olahraga masyarakat. Sampai dengan tahun 2022, yang telah memiliki GOR sebanyak 3 Kecamatan dari target 6 (enam) Kecamatan. Di setiap GOR tersebut dilakukan pembudayaan olahraga melalui kegiatan senam bersama setiap hari sabtu dan minggu.

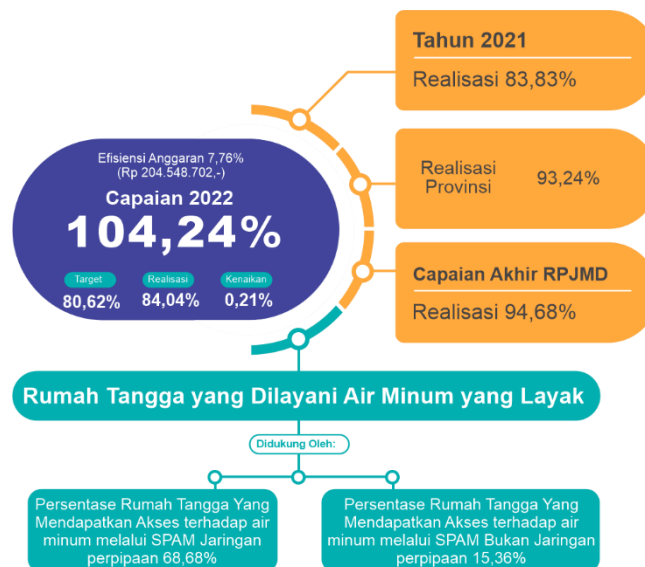
Program yang mendukung pencapaian Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis diatas sebesar 5% atau setara dengan Rp. 3.579. 567.654.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman

Sasaran ini diukur oleh Indikator Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak, Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman (Perpipaan), Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang layak, Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Aman, Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota, dan Persentase Reduksi Sampah. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Layak



Gambar 2.3.7 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Layak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Serta berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, kriteria

air yang layak dikonsumsi yaitu air yang tidak berbau, berwarna, dan berasa, air yang memiliki pH 6,5-8,5, air yang tidak berada di suhu tinggi, air yang tidak terkontaminasi mikroorganisme atau kuman, serta air yang bebas bahan kimia dan logam berat. Penilaian indikator persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak diperoleh dari kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan.

Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak di kota Bogor pada tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 84,04% dari target 80,62% atau dengan capaian 104,24%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD telah mencapai 94,68%. Capaian tersebut diperoleh dari total 241.744 SR pada tahun 2022, rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebanyak 166.036 SR dan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan sebanyak 37.137 SR. Perolehan tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 dari total 242.064 SR, rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebanyak 165.793 SR dan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan sebanyak 37.137 SR.

Tabel 2.3.9 Rumah Tangga yang Dilayani Air minum yang Layak per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Perpipaan (SR)	Non Perpipaan (SR)	Jumlah
Bogor Selatan	32.047	8.584	40.631
Bogor Timur	18.390	2.803	21.193
Bogor Tengah	20.760	1.226	21.986
Tanah Sareal	34.333	8.665	42.998
Bogor Utara	29.320	5.002	34.322
Bogor Barat	31.186	10.857	42.043
Total	166.036	37.137	203.173

Sumber : Dinas PUPR Kota Bogor (2022)

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak, Pemerintah Kota Bogor melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi sepanjang 2.425 m dan penambahan 190 SR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, serta pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi sepanjang 2.925 m dan penambahan 214 SR bagi MBR di Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan.

Program yang mendukung pencapaian persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang layak yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 7,76% atau setara Rp. 204.548.702,-



Gambar 2.3.8 Kegiatan Pengembangan Pipa

Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Aman



Gambar 2.3.9 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Air Minum Yang Aman

Persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman diperoleh dari realisasi rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan. Berdasarkan data capaian program peningkatan sanitasi dasar Kota Bogor Tahun 2022, bahwa persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman di Kota Bogor pada tahun 2022 mencapai 68,68%. capaian tersebut meningkat 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indikator tersebut sebesar 97,53%. Capaian tersebut diperoleh dari total 241.744 SR pada tahun 2022, rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebanyak 166.036 SR. realisasi tersebut mengalami penambahan sebanyak 243 SR dari tahun 2021.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, Pemerintah Kota Bogor melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi sepanjang 2.425 m dan penambahan 190 SR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Bojungkerta Kecamatan

Bogor Selatan, serta pekerjaan pengembangan jaringan pipa distribusi sepanjang 2.925 m dan penambahan 214 SR bagi MBR di Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan.



Gambar 2.3.10 Kegiatan Pengembangan Jaringan Pipa

Program yang mendukung pencapaian persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 7,76% atau setara Rp. 204.548.702,-

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Layak



Gambar 2.3.11 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Layak

Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Layak diukur melalui realisasi system pengelolaan air limbah domestik yang lumpur tinjanya belum diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 73,02% dari target 70,93% atau tercapai 102,95%. Capaian tersebut diperoleh dari total 241.744 sambungan rumah, yang telah dilayani system air limbah yang layak sebesar 176.517 sambungan rumah. Capaian tahun 2022 meningkat 3,11 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2021, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 99,89%.



Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak yaitu melalui Pembangunan tangki septik komunal dengan dana bantuan dari DAK Kementerian PUPR di 5 kelurahan yang terdiri dari pembangunan 8 unit di kelurahan bojong kerta yang melayani 89 SR, pembangunan 8 unit kelurahan pasirkuda yang melayani 96 SR, pembangunan 8 unit di kelurahan mulyaharja yang melayani 81 SR, pembangunan 8 unit di kelurahan babakan pasar yang melayani 87 SR, dan pembangunan 10 unit di kelurahan kayumanis yang melayani 107 SR.

Selain itu Pemerintah Kota Bogor juga mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan tangki septik komunal di 8 kelurahan antara lain kelurahan bubulak, kelurahan cibuluh, kelurahan cibogor, kelurahan curugmekar, kelurahan ciwaringin, kelurahan pakuan, kelurahan pasir mulya, kelurahan pamoyanan dimana masing-masing kelurahan melayani 3 SR.

Upaya selanjutnya yaitu pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALDT) skala permukiman di kelurahan sindang barang sebanyak 1 unit untuk 54 SR, kelurahan kebon pedes 1 unit untuk 52 SR, dan kelurahan curug 1 unit untuk 15 SR. serta pelaksanaan rehabilitasi SPALDT skala permukiman di kelurahan bubulak, kelurahan sindang barang, kelurahan curug, kelurahan cibadak, kelurahan harjasari melalui pekerjaan pemasangan pipa induk dan perlengkapannya, pemasangan pipa servis dan perlengkapannya, penambahan SR sebanyak 8 SR dan rehabilitasi MCK dan IPAL termasuk penyedotan IPAL eksisting.

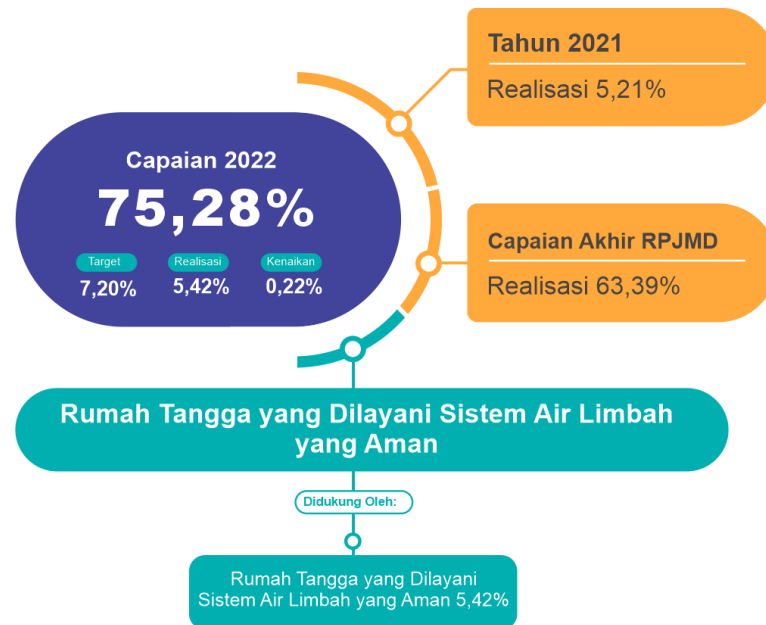


Gambar 2.3.12 Kegiatan Pembangunan SPALDT

Selain kegiatan pembangunan dan rehabilitasi terhadap SPALDT, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilaksanakan sosialisasi pemeliharaan sistem pengolahan air limbah domestik, pelaksanaan pelatihan bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk membina masyarakat dalam pembangunan SPALDT skala permukiman sesuai juklak juknis yang berlaku, serta pelaksanaan pelatihan bagi kelompok pemanfaat dan pemeliharaan (KPP) yang bertujuan agar KPP siap untuk menjadi operator dan pemelihara SPALDT. Serta dilakukan peningkatan institusional layanan air limbah domestik kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai operator melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas baik untuk SDM pengelola, manajemen operasi aset, manajemen pelanggan dan pendapatan, dan melakukan kolaborasi dengan kelompok masyarakat dan sektor swasta.

Program yang mendukung pencapaian persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 10,24% atau setara Rp. 1.049.634.835,-

Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Aman



Gambar 2.3.13 Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Air Limbah Yang Aman

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Aman diukur melalui realisasi system pengelolaan air limbah domestik yang lumpur tinjanya diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman pada tahun 2022 sebesar 5,42%, meningkat 0,22 poin dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, telah mencapai 63,39%. Capaian tersebut diperoleh dari total 241.744 sambungan rumah, yang telah dilayani system air limbah yang aman sebesar 13.129 sambungan rumah.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman yaitu melalui Pembangunan tangki septik komunal dengan dana bantuan dari DAK Kementerian PUPR di 5 kelurahan yang terdiri dari pembangunan 8 unit di kelurahan bojong kerta yang melayani 89 SR, pembangunan 8 unit kelurahan pasirkuda yang melayani 96 SR, pembangunan 8 unit di kelurahan mulyaharja yang melayani 81 SR, pembangunan 8 unit di kelurahan babakan pasar yang melayani 87 SR, dan pembangunan 10 unit di kelurahan

kayumanis yang melayani 107 SR. Selain itu Pemerintah Kota Bogor juga mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan tangki septik komunal di 8 kelurahan antara lain kelurahan bubulak, kelurahan cibuluh, kelurahan cibogor, kelurahan curugmekar, kelurahan ciwaringin, kelurahan pakuan, kelurahan pasir mulya, kelurahan pamoyanan dimana masing-masing kelurahan melayani 3 SR.

Upaya selanjutnya yaitu pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALDT) skala permukiman di kelurahan sindang barang sebanyak 1 unit untuk 54 SR, kelurahan kebon pedes 1 unit untuk 52 SR, dan kelurahan curug 1 unit untuk 15 SR. serta pelaksanaan rehabilitasi SPALDT skala permukiman di kelurahan bubulak, kelurahan sindang barang, kelurahan curug, kelurahan cibadak, kelurahan harjasari melalui pekerjaan pemasangan pipa induk dan perlengkapannya, pemasangan pipa servis dan perlengkapannya, penambahan SR sebanyak 8 SR dan rehabilitasi MCK dan IPAL termasuk penyedotan IPAL eksisting.

Selain kegiatan pembangunan dan rehabilitasi terhadap SPALDT, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilaksanakan sosialisasi pemeliharaan sistem pengolahan air limbah domestik, pelaksanaan pelatihan bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk membina masyarakat dalam pembangunan SPALDT skala permukiman sesuai juklak juknis yang berlaku, serta pelaksanaan pelatihan bagi kelompok pemanfaat dan pemeliharaan (KPP) yang bertujuan agar KPP siap untuk menjadi operator dan pemelihara SPALDT. Serta dilakukan peningkatan institusional layanan air limbah domestik kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai operator melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas baik untuk SDM pengelola, manajemen operasi aset, manajemen pelanggan dan pendapatan, dan melakukan kolaborasi dengan kelompok masyarakat dan sektor swasta.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman yaitu dalam pengolahan air limbah secara terpusat di IPLT yaitu anggaran yang terbatas karena memerlukan pembiayaan yang tinggi dalam pengolahannya, kurangnya tenaga terampil untuk operasional dan pemeliharaan serta memerlukan perencanaan yang baik untuk jangka panjang.

Program yang mendukung pencapaian persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota



Gambar 2.3 14 Capaian Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pemerintah Kota Bogor memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan kawasan kumuh. Hal ini terlihat dari capaian Persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota tahun 2022 yang melebihi target yaitu sebesar 2,02% dari target 2,12% dengan capaian 104,92%. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian penanganan luasan kawasan kumuh baru mencapai 85,88%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil intervensi kawasan permukiman kumuh seluas 11,26 Ha sehingga sampai dengan tahun 2022 luas kawasan kumuh kewenangan kota yang tersisa sebesar 238,86 Ha.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengintervensi capaian indikator kinerja persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota yaitu salah satunya melalui perbaikan rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2022, rumah yang berhasil di intervensi berjumlah 4.463 unit rumah dari target sebesar 4.385 unit rumah. Selain memperbaiki rumah tidak layak huni karena kondisi maupun usia bangunan yang sudah tidak layak, perbaikan karena bencana, juga dilaksanakan pembuatan aplikasi pendataan rumah berbasis mobile serta pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam hal penyampaian informasi mengenai tahapan pengajuan sampai dengan proses pencairan serta proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bogor juga mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat melalui program RUTILAHU untuk pembangunan dan perbaikan pada 220 unit rumah serta BSPS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 608 unit rumah sehingga total yang telah diperbaiki pada tahun 2022 yaitu mencapai 5.291 unit rumah.

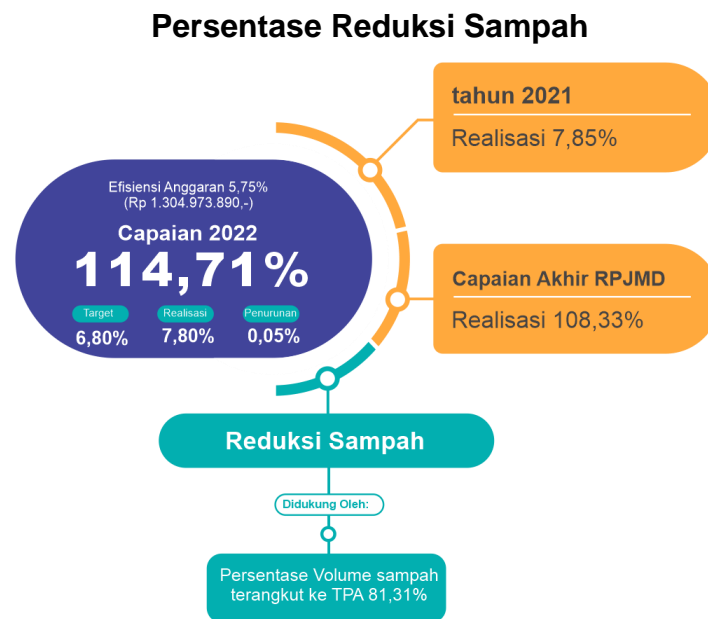
Upaya untuk mengurangi kawasan kumuh yang lainnya yaitu melalui perbaikan/pembangunan drainase lingkungan pada 10 lokasi permukiman kumuh, perbaikan/pembangunan jalan lingkungan pada 10 lokasi permukiman kumuh, pembangunan MCK pada 1 lokasi permukiman kumuh, dan pembangunan kampung tematik ecoriparian di Kelurahan Sukaresmi melalui pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik dan tertata serta peningkatan ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.



Gambar 2.3.15 Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan dan Perbaikan Drainase

Program yang mendukung pencapaian Persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota yaitu Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 4,02 % atau setara Rp. 4.885.593.586,-



Gambar 2.3 16 Capaian Persentase Reduksi Sampah

Pada Tahun 2022 reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 7,80% dari target sebesar 6,80 atau mencapai 114,71%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 108,33%. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis *Reduce Reuse Recycle* (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 31 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah 139rganic dan sampah an 139rganic serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 127 Bank Sampah Unit (BSU) yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor. Capaian reduksi sampah diperoleh dari jumlah sampah yang direduksi di sumber sampah sebesar 21.194,71 ton/hari dibandingkan dengan jumlah keseluruhan timbulan sampah sebesar 271.727,57 ton/hari.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian reduksi sampah tahun 2022 yaitu dengan pembangunan 2 (dua) lokasi TPS 3R pada Kelurahan Bojongkerta dan kelurahan Mekarwangi dimana setiap TPS 3R dapat melayani 200KK. TPS 3R berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi timbulan

sampah yang dibuang ke TPA, memanfaatkan sampah organik dan anorganik untuk diolah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat, serta untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis bagi warga sekitar.



Gambar 2.3.17 Kegiatan Pengolahan Sampah di TPS 3R

Upaya lainnya yaitu melalui pembentukan 62 Bank Sampah pada tahun 2022 yang tersebar di 6 kecamatan. Bank sampah berfungsi untuk mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat dikarenakan bank sampah memberikan peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan.



Gambar 2.3.18 Aktivitas di Bank Sampah

Kegiatan lain yang mendukung pencapaian reduksi sampah yaitu pelaksanaan lomba kebersihan tingkat Kota Bogor Tahun 2022 (Bogorku Bersih 2022) yang diikuti oleh 659 peserta dengan 5 kategori lomba dimana salah satunya yaitu penilaian TPS 3R dan Bank Sampah. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada pengurus bank sampah, serta melaksanakan

green leadership bagi generasi muda untuk sebagai calon pemimpin-pemimpin baru yang memiliki perspektif hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan.



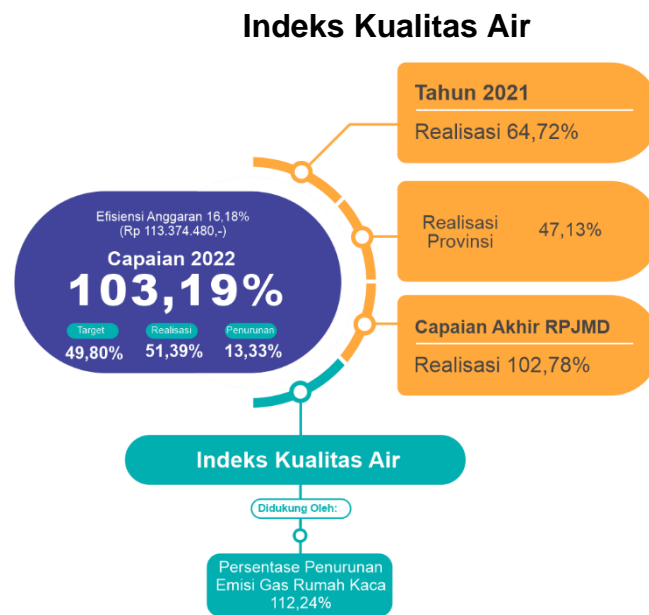
Gambar 2.3.19 Kegiatan Green Leadership

Pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung oleh adanya Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah diantaranya melalui gerebek dapur, pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot. Selanjutnya pada tahun 2022 mulai dilaksanakan kampanye program Plastik Sekali Pakai (PSP) di semua pasar tradisional dan penggunaan plastik sekali pakai mulai diterapkan di dua pasar tradisional di Kota Bogor yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru Bogor.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Reduksi Sampah yaitu Program Pengelolaan Persampahan. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 5,75% atau setara Rp. 1.304.973.890.

Sasaran 4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan / atau kerusakan lingkungan

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu ketercapaian indikator tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Gambar 2.3.20 Capaian Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air tahun 2022 mencapai 51,39 poin dari target 49,80 poin dengan capaian 103,19%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air telah melebihi target yaitu telah tercapai 102,78%. Capaian tersebut walaupun sangat baik tapi menurun 13,33 Poin dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber pencemar di titik lokasi pemantauan air sungai yang didominasi oleh sampah yang berasal dari limbah domestik permukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai, limbah dari kegiatan café/ restoran / rumah makan di lokasi situ, serta adanya beberapa rumah yang membuang air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia) atau yang biasa disebut sebagai limbah hitam langsung ke badan sungai. Selain itu juga pada lokasi pengujian situ gede dan situ panjang berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut

dapat mempengaruhi kualitas air situ.

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai pada 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan Sungai Angke. Pengujian tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.



Gambar 2.3 21 Kegiatan Pengujian Kualitas Air

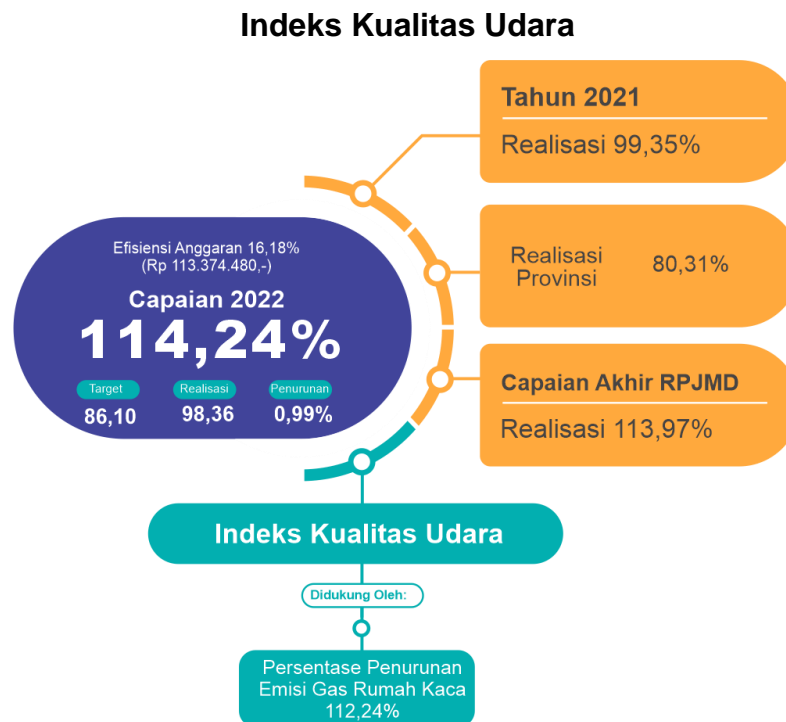
Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan menggunakan 8 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Posfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No.27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, tengah dan hilir pada 10 lokasi pemantauan (3 sungai dan 7 anak sungai) di kota Bogor. Nilai Indeks Pencemar (IP) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II.

Dengan menurunnya nilai IKA tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa kegiatan domestik dan usaha yang menghasilkan air limbah dan limbah yang dibuang ke sungai meningkat. Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu adanya kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha. Selain itu

juga bagi air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ serta jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Untuk mengurangi limbah yang berasal dari air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia), Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Bagi masyarakat yang tidak mempunyai *septic tank* dan yang masih mempunyai kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Selain itu juga dilaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 16,18% atau setara Rp. 113.374.480,-



Gambar 2.3.22 Capaian Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 98,36 poin atau tercapai 114,24%, dan telah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 113,97%. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Dalam hal ini, parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu transportasi, ketersediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara, seperti meteorologi dan bencana (kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi).

Capaian IKU tahun 2022 menurun 0,99 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara.

Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi dalam menyumbang pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah sembarangan



Gambar 2.3.23 Kegiatan Pengujian Kualitas Udara

Upaya yang mendukung peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2022 dilakukan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) pada 7 (tujuh) lokasi yaitu Kelurahan Bondongan, Kelurahan Bojongsarta, Kelurahan Empang, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Sempur, Kelurahan Sukasari, dan Kelurahan Katulampa. Dari 7 (tujuh) lokasi binaan proklam tersebut hanya Kelurahan Bondongan yang di daftarkan ke Sistem Registri Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SRN KLHK) untuk diikutsertakan dalam lomba kampung iklim tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, upaya selanjutnya yaitu melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan, pembangunan taman manunggal sebesar 0,97 Ha dan pembangunan taman-taman lingkungan

lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon, serta adanya himbauan untuk penggunaan kendaraan listrik.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 16,18% atau setara Rp. 113.374.480,-

Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas perumahan dan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup.

Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik



Gambar 2.3 24 Capaian Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu berupa keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya

diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayah untuk RTH, dimana 20% diperuntukan bagi RTH Publik dan 10% diperuntukan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.

Kota Bogor dengan luas 11.138 Ha, sampai dengan tahun 2022 memiliki luas ruang terbuka hijau publik seluas 470,83 Ha atau sekitar 4,24%. Capaian tersebut telah melebihi target 2022 atau sudah mencapai 100,71%. Capaian persentase luas ruang terbuka hijau publik hampir mencapai target akhir RPJMD yaitu telah tercapai 99,76%. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan cara perhitungan, dimana untuk capaian tahun 2021 dibandingkan dengan target RTH publik Kota Bogor sampai dengan tahun 2030 seluas 711 ha, sedangkan perhitungan untuk capaian tahun 2022 dibandingkan dengan luas wilayah kota bogor seluas 11.138 ha. Apabila capaian tahun 2021 dihitung dengan menggunakan formula yang sama dengan rumusan yang digunakan mulai tahun 2022, maka persentase luasan ruang terbuka hijau publik terhadap luas administratif Kota Bogor menjadi 4,20%. Dengan demikian, capaian tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 tetap memiliki trend capaian naik/meningkat.

Pada tahun 2022 terdapat penambahan luas ruang terbuka hijau publik sebesar 2,12 Ha dari target 1 Ha. Penambahan ini berasal dari pembangunan taman manunggal sebesar 0,97 Ha dan pembangunan taman-taman lingkungan lainnya yang tersebar di PSU Aset Pemerintah Kota Bogor sebesar 1,15 Ha. Selain pembangunan, untuk mempertahankan ruang terbuka hijau yang telah terbangun tetap dalam kualitas baik, dilakukan penanaman kembali/penyulaman tanaman pada taman dan jalur hijau, penyediaan bibit tanaman dalam rangka dekorasi baik tingkat kota maupun tingkat instansional, dan pemeliharaan taman dan jalur hijau lainnya. Kendala yang dihadapi dalam penambahan ruang terbuka hijau publik yaitu banyaknya RTH yang beralih fungsi menjadi pedestrian dan akses jalan masuk, masih banyak ruang terbuka hijau yang berstatus milik pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, serta adanya PSU RTH yang belum diserahkan oleh pengembang perumahan ke Pemerintah Kota Bogor.



Gambar 2.3.25 Pembangunan Taman di Tahun 2022

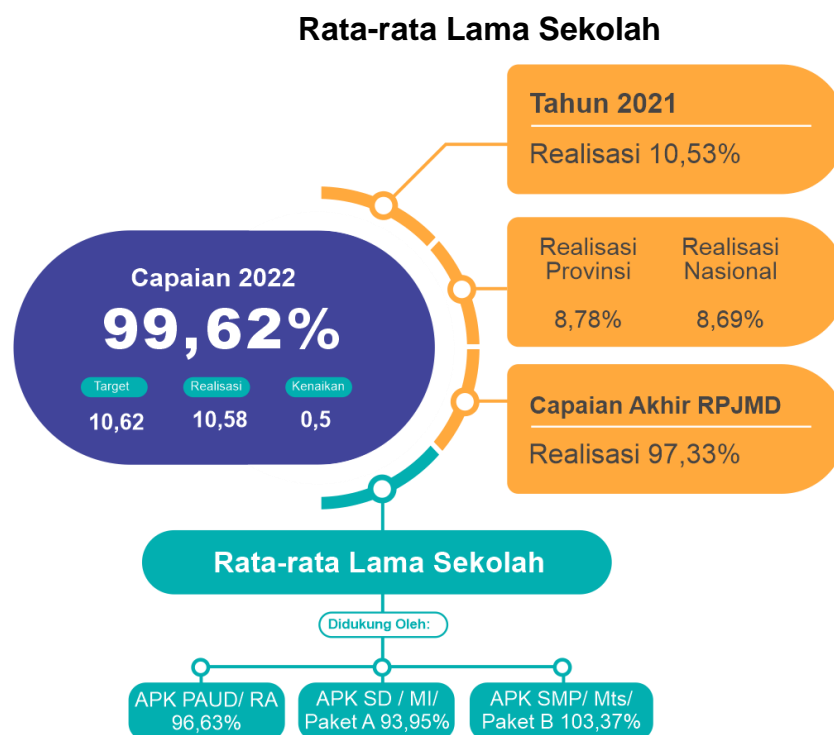
Selain itu, capaian peningkatan luas ruang terbuka hijau publik juga didukung oleh adanya pengelolaan RTH publik yang berada dibawah kewenangan dinas perumahan dan permukiman sebesar 45,84 Ha yang terdiri dari taman dan jalur hijau.

Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 3,99 % atau setara Rp. 772.923.472,-

MISI 2 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS

Sasaran 6 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (*Smart People*)

Sasaran ini diukur oleh Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Perangkat Daerah yang mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pendidikan dengan didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Pendidik, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, serta Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.



Gambar 2.3 26 Capaian Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 10,55. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan warga berusia 25 tahun ke atas sudah mencapai kelas 2 SMA lebih. Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dari tahun sebelumnya dan bila dilihat dari perspektif target akhir perencanaan jangka menengah, indikator rata-rata lama sekolah telah mencapai 97,33%.

Grafik 2.3 2 Tren Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : BPS (2022)

Mutu pendidikan yang baik di Kota Bogor dipengaruhi oleh peningkatan mutu pada sekolah dengan memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Pembiayaan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 13.062 siswa SD dan 6.333 siswa SMP dengan menggunakan aturan zonasi yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Upaya lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan antara lain Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Tahun

2022 sebanyak 1 sekolah, Penambahan Ruang Kelas Baru sebanyak 4 sekolah, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah sebanyak 3 sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebanyak 3 sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 5 sekolah, dan Rehabilitasi Sekolah sebanyak 28 sekolah.



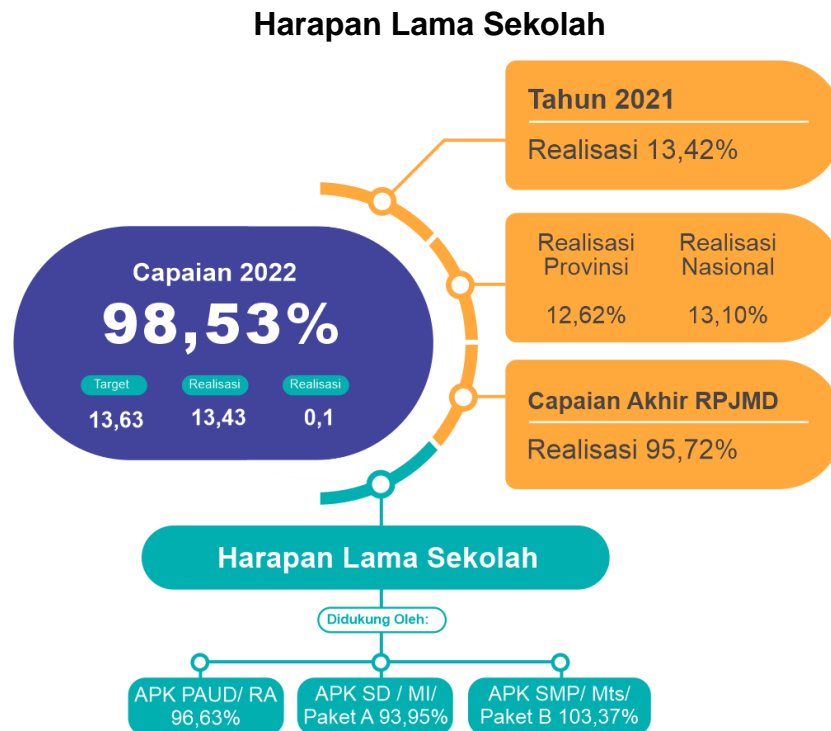
Gambar 2.3.27 Kegiatan Rehabilitasi Sekolah dan Penambahan Ruang Kelas Baru

Untuk menekan Angka Putus Sekolah (APTS) dilakukan pemberian bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Negeri di Kota Bogor. Dana bantuan tersebut adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan program wajib belajar 12 (tahun) tahun yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat, pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimana per siswa SD menerima Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Per Tahun dan siswa SMP swasta menerima Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) . Jumlah keseluruhan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disalurkan kepada 11.430 siswa dari 34 SD swasta dan 17.934 siswa dari 66 SMP swasta di Kota Bogor. Disamping sekolah swasta, SD Negeri dan SMP Negeri juga mendapatkan bantuan yang diberikan sesuai jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari dana BOS. Selain itu juga diberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 17 sekolah swasta dengan jumlah siswa yang menerima sebanyak 454 orang dan mendapat Rp 500.000 per siswa per tahun.



Kendala yang dihadapi untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah yaitu adanya Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bahwa yg berhak menerima biaya operasional pendidikan adalah usia sekolah maksimal 18 tahun, sedangkan untuk perhitungan RLS diambil dari penduduk usia 25 tahun keatas. Sehingga sulit untuk melakukan intervensi pembiayaan bagi penduduk usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan sekolah sampai dengan SMA. Selain itu, usia yang paling banyak mengalami putus sekolah adalah pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan jenjang pendidikan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Kurangnya jumlah sekolah SMA/SMK Negeri juga berpengaruh terhadap angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK.

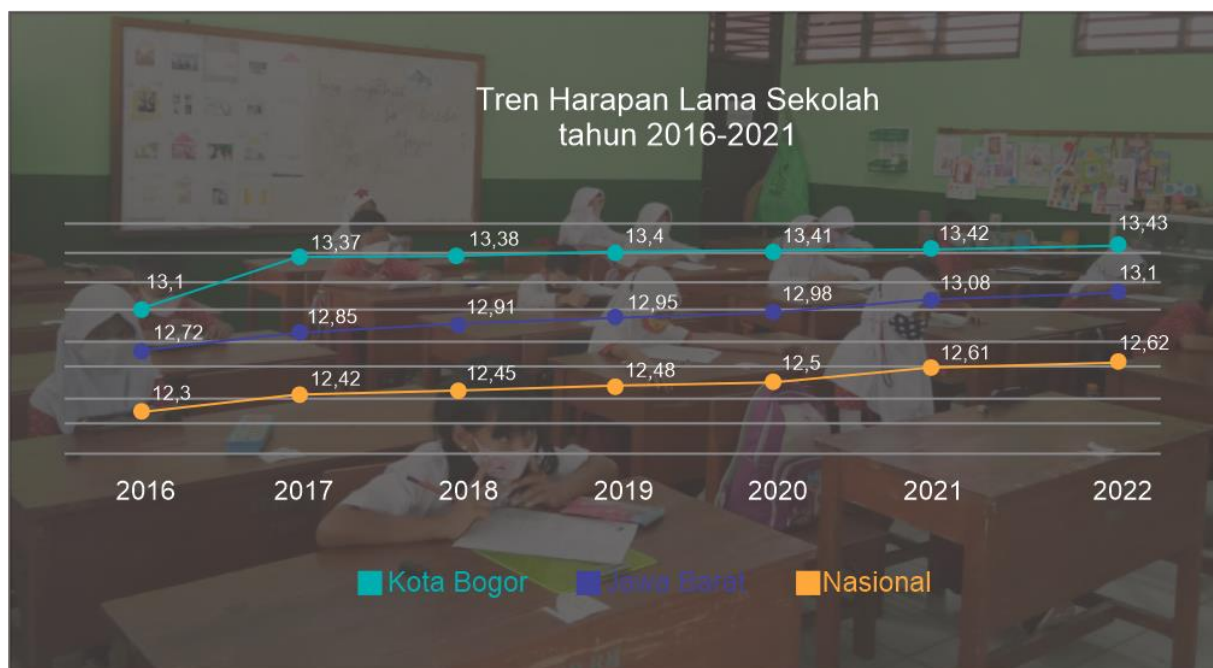
Program yang mendukung pencapaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.



Gambar 2.3.28 Capaian Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bogor pada tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 13,43. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,43 tahun atau setara dengan Diploma I. capaian tersebut meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya, dan jika dilihat dari perspektif target akhir perencanaan jangka menengah, indikator angka harapan lama sekolah telah mencapai 95,72%.

Grafik 2.3.3 Tren Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2021



Sumber : BPS (2022)

Mutu pendidikan yang baik di Kota Bogor dipengaruhi oleh peningkatan mutu pada sekolah dengan memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Pembiayaan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 13.062 siswa SD dan 6.333 siswa SMP dengan menggunakan aturan zonasi yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Upaya lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan antara lain Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Tahun 2022 sebanyak 1 sekolah, Penambahan Ruang Kelas Baru sebanyak 4 sekolah, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah sebanyak 3 sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebanyak 3 sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 5 sekolah, dan Rehabilitasi Sekolah sebanyak 28 sekolah.



Gambar 2.3.29 Kegiatan Rehabilitasi Sekolah

Untuk menekan Angka Putus Sekolah (APTS) dilakukan pemberian bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Negeri di Kota Bogor. Dana bantuan tersebut adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan program wajib belajar 12 (tahun) tahun yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat, pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimana per siswa SD menerima Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Per Tahun dan siswa SMP swasta menerima Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Jumlah keseluruhan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disalurkan kepada 11.430 siswa dari 34 SD swasta dan 17.934 siswa dari 66 SMP swasta di Kota Bogor. Disamping sekolah swasta, SD Negeri dan SMP Negeri juga mendapatkan bantuan yang diberikan sesuai jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari dana BOS. Selain itu juga diberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 17 sekolah swasta dengan jumlah siswa yang menerima sebanyak 454 orang dan mendapat Rp 500.000 per siswa per tahun.

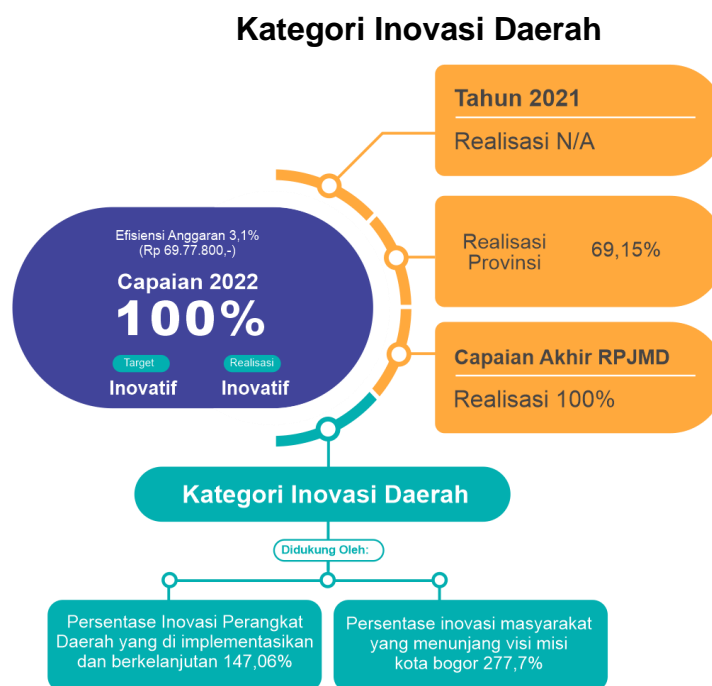
Kendala yang dihadapi untuk peningkatan angka harapan lama sekolah yaitu adanya Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bahwa yg berhak menerima biaya operasional pendidikan adalah usia sekolah maksimal 18 tahun, sedangkan untuk perhitungan RLS diambil dari penduduk usia 25 tahun keatas. Sehingga sulit untuk melakukan

intervensi pembiayaan bagi penduduk usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan sekolah sampai dengan SMA. Selain itu, usia yang paling banyak mengalami putus sekolah adalah pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan jenjang pendidikan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Kurangnya jumlah sekolah SMA/SMK Negeri juga berpengaruh terhadap angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK.

Program yang mendukung pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.

Sasaran 7 Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, diukur melalui indikator Indeks Inovasi Daerah. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh seluruh perangkat daerah.



Gambar 2.3.30 Capaian Kategori Inovasi Daerah

Kategori Inovasi Daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi urusan

kewenangan daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Fungsi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan daerah adalah sebagai pusat data inovasi daerah berdasarkan aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai sarana pelaporan inovasi daerah, sebagai instrument pengukuran inovasi daerah, untuk penghitungan tambahan penghasilan pegawai daerah, dan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2022 dapat terealisasi dengan skor 56,48 dan kategori Inovatif. Capaian tersebut menurun 1,32 poin dari tahun 2021 yang mencapai 57,80 walaupun masih dalam kategori inovatif. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Indeks Inovasi Daerah telah mencapai target yaitu kategori inovatif.



Gambar 2.3 31 Kegiatan Bogor Innovation Award

Untuk menumbuhkan budaya inovasi di Kota Bogor, upaya yang telah dilakukan yaitu pada tahun 2022 dilaksanakan Lomba Bogor Innovation Award (BIA) yang diikuti oleh 93 inovator. BIA merupakan rebranding dari kegiatan yang sebelumnya dinamai Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor yang berlangsung sejak tahun 2019. Tujuan



dilaksanakannya BIA yaitu untuk memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif guna penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unit inovasi. Tema BIA tahun 2022 yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Kelestarian Alam”. Melalui kegiatan BIA, terdapat 92 inovasi yang terpilih, dengan rincian sebanyak 36 inovasi dapat diimplementasikan untuk menunjang Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat, 64 inovasi dapat diimplementasikan untuk menunjang Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas, dan 34 inovasi dapat diimplementasikan untuk menunjang Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga ikut serta dalam berbagai Lomba Inovasi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat. Di Tingkat Provinsi, Kota Bogor mengirimkan 9 Inovasi untuk diikutsertakan dalam lomba Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB), dan di Tingkat Nasional mengirimkan 5 inovasi untuk diikutsertakan dalam Lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB. Pada Lomba SINOVIK, inovasi E-SPPT yang diusulkan oleh BAPENDA berhasil memperoleh Top 45 nasional.



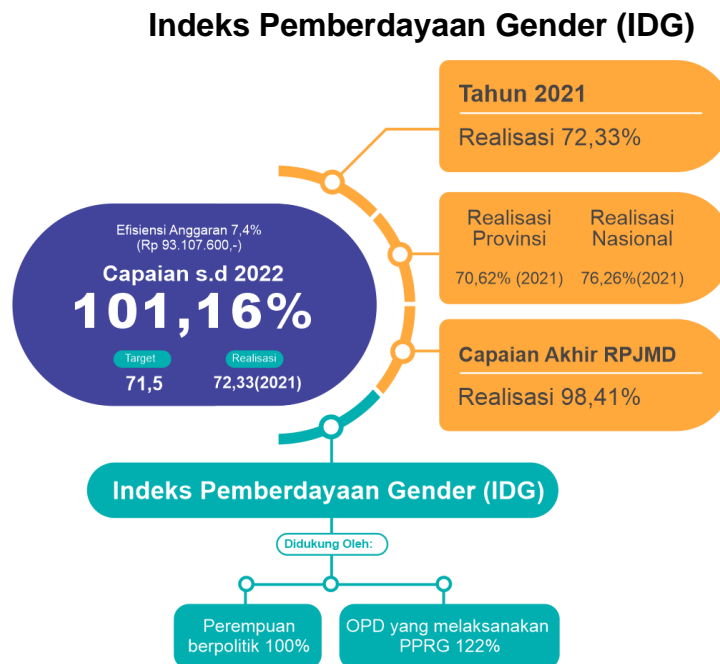
Gambar 2.3.32 Sinovik Menerima Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Inovasi Daerah yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 3,1% atau setara Rp. 69.77.800,-

Sasaran 8

Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, Toleransi dan Ketertarikan Ketertiban Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, dan Toleransi Masyarakat, diukur melalui Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, serta Sekretariat Daerah.



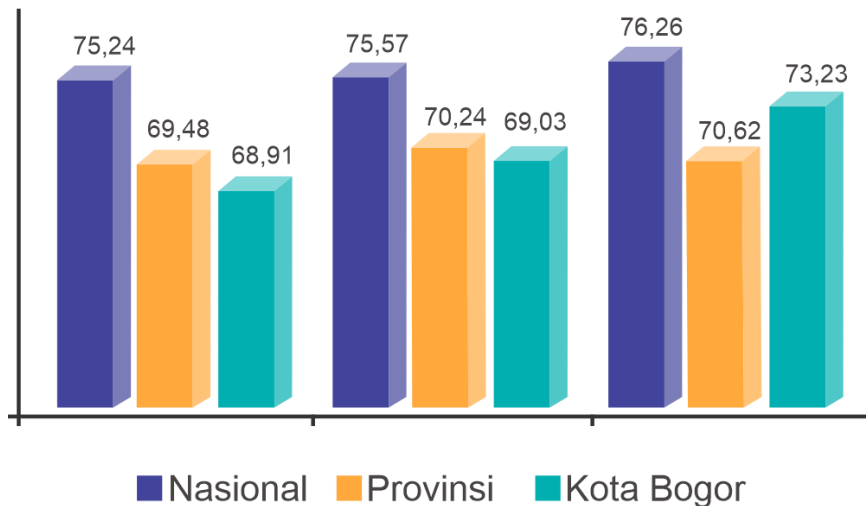
Gambar 2.3.33 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan adanya peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik serta digunakan sebagai ukuran menggambarkan kapabilitas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Penghitungan IDG dilakukan pada tiga dimensi yaitu (1) Keterwakilan di parlemen dengan indikator proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan; (2) Pengambilan keputusan dengan indikator proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja professional, dan teknisi laki-laki dan perempuan, serta (3) Dimensi distribusi pendapatan dengan indikator upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan metode penentuan target menggunakan metode survey.

Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2022 belum dapat diketahui realisasinya dari target 71,50, hal ini disebabkan karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan data realisasi indikator dimaksud. Capaian IDG Kota Bogor tahun 2021 mencapai 72,33 dan meningkat 3,3 poin dari tahun 2020. Jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Barat, realisasi Kota Bogor lebih tinggi 1,71 poin, namun masih lebih rendah dari capaian IDG Nasional yang mencapai 76,26. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sampai dengan tahun

2021 telah tercapai 98,41%.

Grafik 2.3 4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 – 2021



Sumber : BPS (2022)

Upaya peningkatan pengarusutamaan gender di Kota Bogor yaitu salah satunya melalui Pemilihan Gender Champion. Gender champion merupakan bentuk apresiasi kepada perempuan atas peran, dedikasi dan kontribusinya kepada lingkungan dan masyarakat dan harus memiliki 5 kriteria yaitu memiliki kontribusi atau kiprah terhadap kesetaraan dan keadilan gender, memiliki peran pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak, mampu meningkatkan kualitas hidup Perempuan, Anak, Lansia, Penyandang disabilitas dan masyarakat miskin serta mampu bekerjasama dengan berbagai pihak, mampu melakukan penguatan keluarga baik dari segi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, serta sebagai agen penggerak dan agen perubahan di masyarakat.

Upaya selanjutnya yaitu melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). P2WKSS merupakan salah satu program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pengembangan tersebut ditujukan demi terwujudnya keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dengan wanita sebagai penggeraknya. P2WKSS Tahun 2022 Kota Bogor diwakili oleh Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat dan berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi Jawa Barat

untuk kategori kota.

Untuk meningkatkan peran perempuan di parlemen, dilaksanakan Sosialisasi Perempuan Berpolitik dan Pelatihan Calon Legislatif dengan peserta kaum perempuan dari berbagai partai, ormas dan organisasi kemahasiswaan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi perempuan terkait politik dan pelatihan bagi perempuan yang akan ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2024. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan peningkatan kapasitas lembaga/organisasi perempuan yang diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya untuk mengatasi kerentanan perempuan terutama akibat pandemic Covid-19, tetapi perempuan diharapkan dapat bangkit dan lebih berdaya baik bagi dirinya maupun keluarganya dan tentunya akan berdampak bagi masyarakat.



Gambar 2.3.34 Kegiatan Sosialisasi Perempuan Berpolitik

Untuk peningkatan kapasitas perempuan dilaksanakan berbagai pelatihan yaitu diantaranya Pelatihan Petugas Layanan Perlindungan Perempuan, Pelatihan Total Image/ Pengembangan Kepribadian, serta adanya kegiatan Support Group (Sugro) bagi penyintas KDRT yang bertujuan agar para penyintas KDRT tersebut menjadi lebih berdaya.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Yayasan Mata Pena mengimplementasikan program konseling secara online melalui Aplikasi Pojok Konseling Keluarga Unggul atau Polink Gaul. Aplikasi Polink Gaul merupakan aplikasi konseling masalah keluarga, perempuan, dan anak bagi masyarakat dengan NIK Kota Bogor. Sistem pada aplikasi Polink Gaul terintegrasi dengan para konseling profesional dari Dinas Sosial Kota Bogor, Unit PPA Polresta Bogor Kota, UPTD PPA

Kota Bogor, BNNK Bogor, dan PUSPAGA Kota Bogor serta berada dibawah pengawasan KPAID Kota Bogor.

Aplikasi Polink Gaul diharapkan dapat memberikan kekayaan data terkait ketahanan keluarga dan banyak yang bisa digali, karena tidak hanya fokus pada pola pengasuhan anak tetapi juga kesehatan mental orang tua dan mampu membantu mencegah terhadap tindakan kekerasan dan lainnya untuk mewujudkan Kota Bogor yang ramah keluarga. Untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat terhadap program poling gaul, dilaksanakan sosialisasi ke berbagai sekolah di Kota Bogor, kepada masyarakat Kota Bogor berusia 12-50, serta kepada guru bimbingan konseling.

Program yang mendukung pencapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender meliputi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, serta Program Perlindungan Perempuan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 7,4 % atau setara Rp. 93.107.600,-



Gambar 2.3.35 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan kehidupan umat beragama yang harmonis, toleransi, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Indeks Kerukunan Umat



Beragama diukur melalui survei persepsi masyarakat Kota Bogor berdasarkan tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati/ menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Pelaksanaan pengukuran survei indeks kerukunan umat beragama dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 40 kelurahan yang terpilih secara acak mewakili kelurahan lainnya yang ada di Kota Bogor. Berdasarkan survei tersebut diperoleh hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 78,17 dengan capaian 109,33% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator ini telah mencapai 107,82%.

Melalui capaian tersebut, dapat diartikan bahwa kerukunan umat beragama kota bogor berada dalam kondisi baik dengan nilai toleransi antar umat beragama berada pada angka 73,41, nilai kesetaraan umat beragama dengan angka 85,14, serta nilai kerjasama umat beragama yang menunjukkan nilai 78,95. Selanjutnya berdasarkan hasil survei tersebut, Kecamatan Bogor Tengah menjadi kecamatan yang paling baik nilai Indeks Kerukunan Umat Beragamanya dibandingkan dengan kecamatan lain dengan skor indeks 82,93.

Meningkatnya kerukunan umat beragama di Kota Bogor dicapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, yaitu pelaksanaan Kegiatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dan Festival Merah Putih (FPK) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa Bhineka Tunggal Ika, memberi pemahaman kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan etnis, suku, dan agama, menciptakan kelompok masyarakat yang berbasis etnis dan kedaerahan dengan tetap mempertahankan toleransi dan kerukunan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, Mengoptimalkan keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan dimasyarakat dan mewujudkan pembauran yang lebih dinamis dan berkembang dalam memperatahkan keutuhan NKRI, sertpa meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota

Bogor.



Gambar 2.3 36 Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Selain itu, Faktor yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Bogor yaitu melalui peningkatan rasa kebersamaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat di Kota Bogor, pelaksanaan deteksi/pengurangan konflik yang bernuansa SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintah daerah, mendorong dan meningkatkan toleransi antar umat beragama, mendorong aktivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, menjalin hubungan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah antara masyarakat dengan unsur pemerintah daerah baik TNI maupun POLRI.

Program yang mendukung ketercapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 0,21% atau setara Rp. 364.200,-

Sasaran 9 Tercapainya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Untuk mewujudkan Sasaran Tercapainya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel, diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.



Gambar 2.3.37 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Bogor berhasil mewujudkan tata pemerintahan yang baik, ditandai dengan adanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2022 yang mendapatkan predikat BB dengan nilai 70,76. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2021 yang mendapatkan predikat B dengan nilai 67,67. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaian tahun 2022 belum sesuai target

yang ditetapkan, serta masih dibawah capaian provinsi Jawa Barat yang memperoleh predikat A. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditargetkan untuk memperoleh predikat A, Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan perbaikan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi.

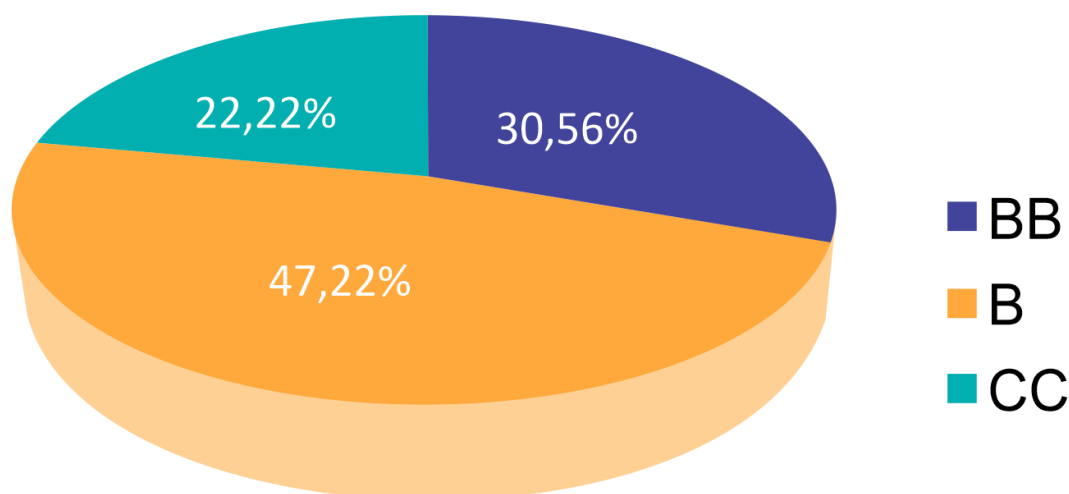


Gambar 2.3.38 Penyerahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peningkatan capaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bogor diakselerasi oleh beberapa faktor diantaranya adalah penerapan sistem merit, peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas pengelolaan arsip, profesionalitas ASN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Area Manajemen Perubahan, untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkup perangkat daerah dilaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat perangkat daerah. Pelaksanaan penilaian mandiri tersebut berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Pedoman tersebut disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan penilaian mandiri tersebut diperoleh hasil sebanyak 11 Perangkat daerah memperoleh kategori BB, 17 Perangkat daerah memperoleh kategori B, dan 8 Perangkat daerah memperoleh kategori CC.

Grafik 2.3 5 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



Sumber : Sekretariat Daerah (2022)

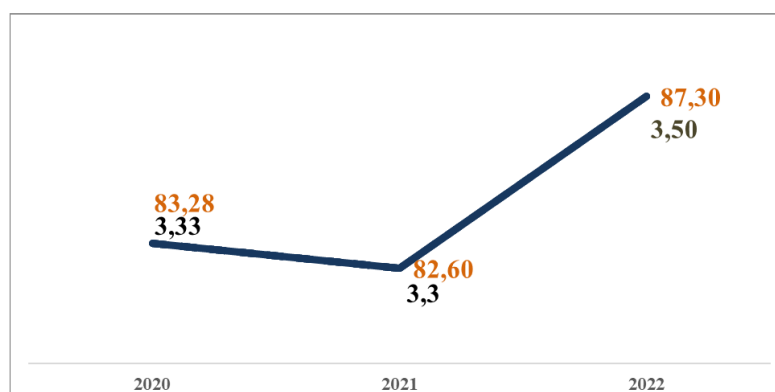
Pada Area Manajemen SDM, Pemerintah Kota Bogor meraih Indeks Sistem Merit sebesar 333,5 Poin dengan predikat “sangat baik”. capaian tersebut diperoleh melalui berbagai upaya yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan mutasi dan promosi yang dikaitkan dengan kebijakan Pola karir, Pengisian JPT dan Jabatan Administrator secara terbuka dan transparan yang mengacu pada talent pool dan rencana suksesi. Selain itu dilakukan penilaian terhadap kinerja, disiplin serta pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi.

Pada Area Penguatan Ketatalaksanaan, implementasi reformasi birokrasi yang baik didorong oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Pemerintah Kota Bogor telah mengimplementasikan tanda tangan elektronik di seluruh perangkat daerah serta telah diintegrasikan dengan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti aplikasi Smart (pelayanan perizinan), aplikasi SIPDEH (perpajakan), aplikasi SIMPEG (kepegawaian), aplikasi SiMasda (asset), aplikasi E-Office (keuangan), aplikasi SOLID (data terpadu kesejahteraan sosial), dan SIAK (kependudukan). Pada tahun 2022, capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Bogor yaitu 69,7 dan jauh meningkat dari capaian realisasi tahun 2021 dimana Kota Bogor mendapatkan nilai 0. Terdapat peningkatan capaian untuk Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip, dari 77,50 pada capaian tahun 2021 meningkat menjadi 81,50.

Pada Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kota Bogor memperoleh nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sebesar 87,05, meningkat 4,9 poin dari realisasi tahun sebelumnya. Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik ini dinilai oleh Lembaga Ombusman RI yang menilai implemementasi terhadap Standar Pelayanan yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan ditambah 2 UPT Puskesmas yaitu Puskesmas Semplak dan Puskesmas Warung Jambu. Untuk mendukung pencapaian nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, dilakukan pendampingan dari Tim Pembina Pelayanan Publik tingkat kota.

Selanjutnya dilakukan penilaian kepuasan masyarakat di seluruh perangkat daerah melalui survey yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, hasil pengukuran juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan publik secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mendapatkan informasi mengenai kualitas pelayanan (*quality service*) dan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan publik, mengevaluasi program perbaikan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan serta untuk menentukan strategi dan rencana perbaikan ke depan serta memacu kompetisi dan inovasi antar unit penyelenggara pelayanan publik untuk dapat meraih pencapaian kerja yang optimal di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2022 memperoleh nilai 3,50 dan masuk kategori Baik (B).

Grafik 2.3.6 Tren Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber : Sekretariat Daerah (2022)

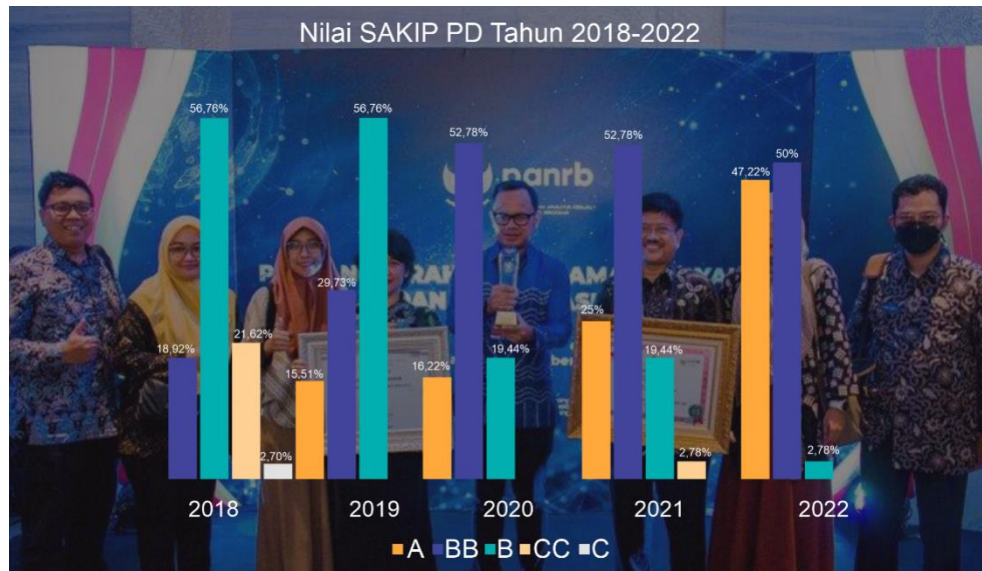
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan antara lain melaksanakan pendampingan dan asistensi secara rutin terhadap 2 unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu RSUD Kota Bogor serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara intensif dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yaitu program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pada Area Penataan Organisasi, Struktur Organisasi perangkat daerah sudah berbasis kinerja dan proses bisnis. Upaya yang dilakukan yaitu penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional pada 31 Desember 2021 sebanyak 280 orang, melakukan penyesuaian tugas dan fungsi pasca penyederhanaan birokrasi pada 30 perangkat daerah, menyusun Peraturan Walikota terkait sistem kerja, menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan, melakukan pengukuran Indeks Kematangan Organisasi, serta Indeks Kelembagaan.

Pada Area Akuntabilitas Kinerja, upaya yang dilakukan antara lain melaksanakan reviu RPJMD dan melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja dengan menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan, melaksanakan reviu dokumen renstra perangkat daerah serta penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaiannya dengan Permenpan RB No. 89 Tahun 2021, melaksanakan reviu kinerja secara berjenjang pada tingkatan organisasi maupun individu, serta meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja

internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja.

Grafik 2.3.7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Sumber : Inspektorat Kota Bogor (2022)

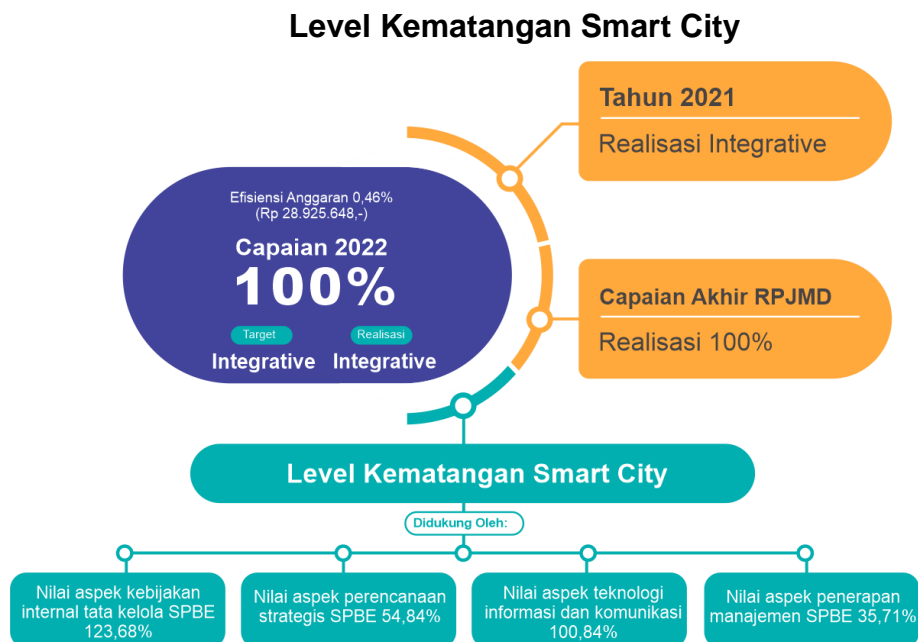
Pada Area Deregulasi Kebijakan, dilakukan optimalisasi dengan melakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan mulai tahun 1955 sampai dengan tahun 2022. Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada Kota Bogor sebagai terbaik pertama dalam Tata Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tahun 2022.

Dari aspek keuangan, Pemerintah Kota Bogor memperoleh predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari tahun 2016. Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP yaitu meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI), penyempurnaan regulasi tentang kebijakan akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah, meningkatkan kapasitas aparatur penyusun laporan keuangan dan pengurus barang pada perangkat daerah, dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang.

Sasaran 10

Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*)

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi, diukur melalui indikator Level Kematangan Smart City. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 2.3.39 Capaian Level Kematangan Smart City

Pada tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kantor Staf Presiden untuk menginisiasi penyelenggaraan gerakan menuju 100 Smart City. Sejak tahun 2017 hingga 2019 telah terpilih 100 kota/kabupaten yang didampingi dan dibimbing oleh para ahli dalam mengimplementasikan konsep kota cerdas (smart city). Program

ini kemudian dilanjutkan menjadi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*smart city*) dimana sejak tahun 2021 telah ditambah 41 kabupaten/kota lainnya yang masuk dalam Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu Kota Negara Baru dalam penyusunan masterplan *smart city* sehingga secara total telah ada 141 kota/kabupaten yang memiliki *masterplan smart city* dan melaksanakan pembangunannya.

Selanjutnya guna mengawal jalannya kota cerdas (*smart city*) dan juga mengidentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan kota cerdas (*smart city*), maka sejak tahun 2018 dilakukan proses evaluasi terhadap implementasi masterplan smartcity yang telah disusun pemerintah kota/kabupaten. Evaluasi dilakukan untuk tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan serta adanya permasalahan namun juga guna memberikan masukan dan saran bagi pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan smart city. Hasil dari pelaksanaan evaluasi berupa ukuran kemajuan pembangunan smart city yang dinilai dari 5 dimensi serta saran perbaikan bagi pemerintah kota/kabupaten

Berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-1003/DJAI/AI.01.04/12/2022 Hal Pemberitahuan Hasil Evaluasi disampaikan bahwa Level Kematangan Smart City Kota Bogor tahun 2022 berada pada level *Integrative*, capaian yang sama dengan tahun sebelumnya. Penilaian terhadap implementasi kota cerdas (*smart city*) berdasarkan lima (5) dimensi yaitu Dimensi *Baseline* (bobot 10%) yang menggambarkan penilaian terhadap dokumen *masterplan* kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan smart city dan tim pelaksana smart city, realisasi program serta rencana aksi smart city di tahun sebelumnya. Selanjutnya Dimensi *Output* (bobot 20%) yaitu untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, serta anggaran untuk program *smart city*. Dimensi *Impact* (20%) untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan. Dimensi *Quick Win* (20%) untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pada program percepatan (*quick win*), dan Dimensi *Outcome* (bobot 30%) untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah.

Capaian nilai kematangan smart city kota bogor tahun 2022 yaitu 3,46 atau memperoleh kategori *Integrative* dengan rincian dimensi *baseline* sebesar 4 poin,



dimensi *output* sebesar 2,89 poin, dimensi *outcome* sebesar 3,52 poin, dimensi *impact* sebesar 3,13 poin, serta dimensi *quick wins* sebesar 3,94 poin.

Pada Dimensi *Baseline* memperoleh nilai 4 poin, diartikan bahwa *Master Plan smart city* Kota Bogor dari sisi perencanaan telah memiliki *road map* (peta jalan) untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi kota cerdas yang berjalan secara inklusif dengan RPJMD. Hal ini menunjukkan adanya proses kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam pembangunan smart city. Dimensi *Output* memperoleh nilai 2,89 poin. Pada dimensi ini kebijakan *smart city* menjadi pengarah utama dalam perumusan inovasi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut didukung oleh Dewan Smart City dan seluruh perangkat pelaksana smart city dengan memegang prinsip kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan kota cerdas lainnya yaitu sektor privat, komunitas masyarakat, akademisi, dan media. perumusan dan penetapan quick wins menjadi salah satu kunci utama dalam pengembangan kota cerdas di Kota Bogor. Implementasi inovasi mendapat dukungan bukan saja dari APBD tetapi juga pembiayaan alternatif (non APBD) dari pihak non pemerintah dalam bentuk dana CSR dan sumber pembiayaan lain.

Selanjutnya Dimensi *Outcome* memperoleh nilai 3,52 poin. Pada dimensi ini dilakukan pengukuran capaian realisasi antara rencana aksi (*master plan*) dengan pelaksanaan program/kegiatan/inovasi per dimensi smart city. Keterlaksanaan program pembangunan smart city pada tiap dimensi apabila dibandingkan dengan perencanaan mencapai persentase 121%. Dari 152 program/kegiatan ada yang mendapat perluasan volume atau target, namun mengingat kendala yang muncul dari pandemi covid 19 yang berakibat pada lahirnya prioritas baru sehingga Kota Bogor belum mampu merelisasikan secara utuh 7 program/kegiatan smart city. Pelaksanaan rencana aksi yang terkait peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, pengembangan perangkat lunak, dan peningkatan literasi dapat berjalan dengan baik meskipun mengalami pengurangan target/volume karena terjadinya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid 19. Dimensi *impact* memperoleh nilai 3,13 poin.

Pada dimensi ini terlihat adanya perubahan sebelum dan sesudah implementasi program/kegiatan smart city. Perubahan ini bisa dilihat dari segi terestrial berupa

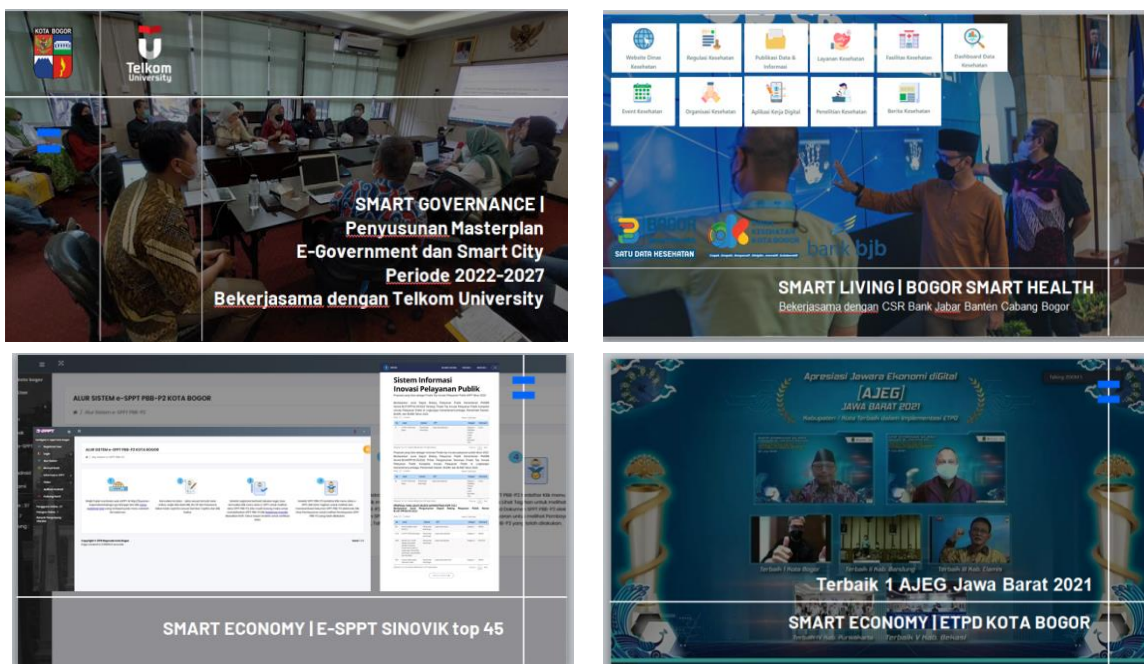
peningkatan infrastruktur dan sarana penunjang seperti pedestrian, jalur difabel, jalur sepeda, jalur berlari, taman kota tematik, sarana peribadatan, sarana olahraga masyarakat, prasarana public safety, sarana pendidikan, pembangunan jalan dan jembatan baru, sistem layanan pemerintahan yang lebih cepat, perluasan branding kota, peningkatan cakupan standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kesehatan, lingkungan hidup dan munculnya komitmen untuk menyusun perencanaan kolaboratif pembangunan Smart Halal Food Distribution Center yang berskala regional dengan IPB University. Keterbukaan informasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh teknologi informasi menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan modal sosial masyarakat. Dalam pengembangan dan upaya pelestarian lingkungan hidup kota bogor tetap konsisten menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dimana persentase ruang terbuka hidup dan jalur hijau menjadi prioritas untuk dikembangkan, dimodernisasi, dan didorong untuk bisa menciptakan nilai tambah.

Untuk Dimensi *Quick Wins* memperoleh nilai 3,94 poin. Pada tahun 2022 kota bogor mengembangkan inovasi smart city skala kawasan. Inisiatif tersebut berupa integrasi kawasan dan integrasi fasilitas layanan publik yang membentuk sebuah jaringan utilitas publik mencakup pusat kota dan titik akses menuju pusat kota. Kawasan smart city tersebut disebut dengan istilah Bogor i-Landmark yaitu integrated dan interconnected landmark kota bogor yang menghubungkan akses TOD stasiun bogor (apartment, stasiun, park and ride) – alun-alun kota bogor – masjid agung – balai kota bogor – istana bogor – kebun raya bogor – kawasan heritage surya kencana empang – pedestrian bogor runners dan b-cyclers – kawasan MICE kota bogor – kawasan museum – bogor creative center – TOD baranang siang – koridor layanan biskita – bogor library dan gallery – taman tematik sempur.

Meskipun target Level Kematangan Smart City telah tercapai melalui upaya-upaya diatas, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan yang harus segera ditindaklanjuti yaitu kurangnya peningkatan anggaran APBD dan Non-APBD sehingga berdampak pada peningkatan implementasi program dimana anggaran untuk program smart city yang masih berkisar pada 11%-20% APBD, masih terdapatnya masalah dalam penanganan sampah walaupun sudah terdapat program “pulsa dan plastik”, keterlibatan pihak eksternal/swasta tidak disertai data dukung yang

memadai termasuk tidak adanya daftar hadir yang nampak dalam aktivitas, serta tidak ada data kuantitatif jumlah pendanaan non-APBD.

Menindaklanjuti kelemahan-kelemahan di atas, strategi yang akan dilaksanakan untuk perbaikan capaian kinerja di tahun mendatang yaitu perlunya dilakukan analisis terhadap pencapaian program *smart city*, perlu ditingkatkannya belanja modal dari yang sudah ada pada tahun 2022, perlu ditingkatkannya program pada dimensi smart living, perlu menggalakan upaya untuk mendapatkan pembiayaan no-APBD yang lebih besar yaitu melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), peningkatan anggaran smart city dari APBD, peningkatan nilai SPBE, pelaksanaan survey dilakukan pada lebih banyak responden sehingga mencerminkan populasi yang diwakilinya, serta mendorong kesiapan penyampaian data dengan lebih transparan dan tertib administrasi terutama dalam data keterlibatan pihak swasta dan alokasi kontribusi pendanaannya sehingga tepat sasaran.



Gambar 2.3 40 Implementasi Smart City Kota Bogor

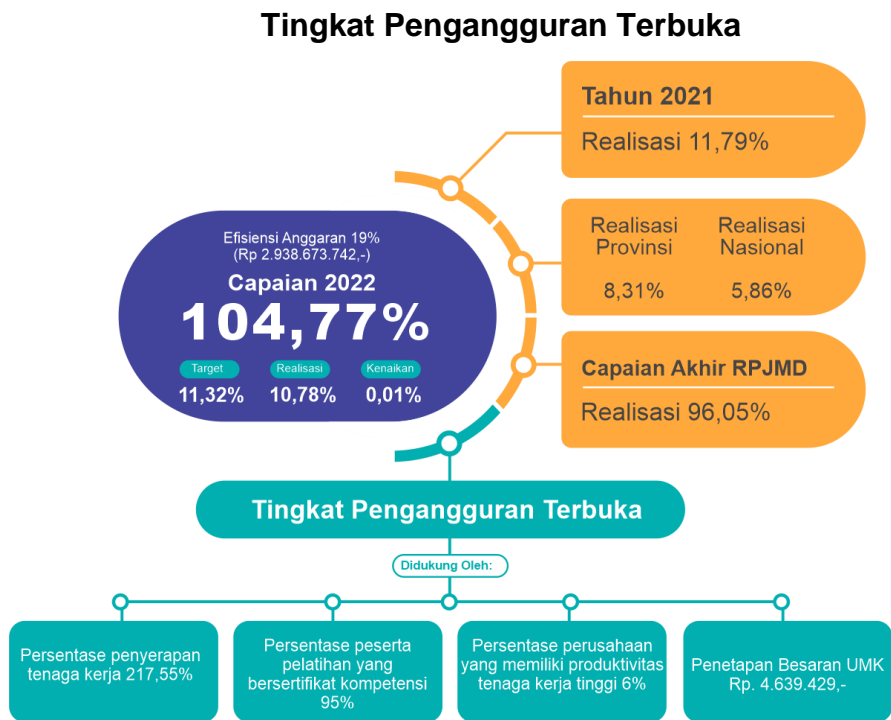
Program yang mendukung pencapaian indikator Level Kematangan Smart City yaitu program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika. Adapun efisiensi anggaran atas pencapaian indikator tersebut

sebesar 0,46% atau setara dengan Rp. 28.925.648,-.

MISI 3 MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEJAHTERA

Sasaran 11 Menurunnya Tingkat Pengangguran

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran, diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perangkat daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Tenaga Kerja.



Gambar 2.3.41 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2022 mencapai 10,78 dengan capaian 104,77%. Dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,01 poin dan jika dibandingkan dengan target rencana jangka menengah (RPJMD) telah mencapai 96,05%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor lebih rendah dari capaian

TPT Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,31 serta capaian nasional sebesar 5,86.

Grafik 2.3 8 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022



Sumber : BPS (2022)

Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat pengangguran secara makro antara lain kondisi Covid-19 yang mulai terkendali yang berdampak pada pemulihan ekonomi serta mulai aktifnya aktivitas industry. Kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka yaitu tertuang dalam program unggulan dan merupakan Janji Kampanye Walikota dan Wakil Walikota pada bidang ketenagakerjaan melalui Bogor Motekar untuk memfasilitasi 12.500 kesempatan kerja sampai akhir RPJMD tahun 2024. Sampai dengan tahun 2022, dari target 12.500 tersebut telah tercapai 10.410 kesempatan kerja.

Pemerintah Kota Bogor berupaya menurunkan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan job fair (offline) dan melalui aplikasi bogor kerja. Melalui kegiatan Job Fair tersebut tersedia 813 lowongan kerja dari 32 perusahaan. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga memiliki aplikasi Bogor Kerja. Bogor Kerja merupakan sebuah portal berbasis web yang memberikan informasi seputar lowongan kerja. Pelayanan yang tersedia dalam aplikasi bogor kerja yaitu kartu kuning/AK 1, BLK/LPK, pemagangan. E-learning, BKK, informasi lowongan pekerjaan, daftar perusahaan, profil kandidat, job fair, webinar dan konsultasi. Melalui aplikasi Bogor Kerja diperoleh data bahwa terdapat 3.220 pencari kerja dengan

lowongan sebanyak 2.939 pada 116 perusahaan dan berhasil menyerap 3.319 tenaga kerja secara formal dan 3.686 tenaga kerja informal.

Pemerintah Kota Bogor juga meningkatkan profesionalisme tenaga kerja dengan melatih sebanyak 786 pencari kerja. Pelatihan tersebut dilaksanakan bagi pencari kerja berdasarkan 4 kategori yaitu pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan tenaga kerja mandiri, dan pelatihan pemagangan berupa pelatihan hidroponik, pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, pelatihan desain grafis, pelatihan barista, serta pelaksanaan pemagangan pada perusahaan. Selain untuk pencari kerja, dilakukan juga pembinaan bagi 38 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lembaga latihan swasta (LLS) guna menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan menekan angka pengangguran. Dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, Pemerintah Kota Bogor juga telah berhasil menyelesaikan seluruh kasus hubungan industrial yaitu sebanyak 14 kasus.



Gambar 2.3 42 Kegiatan Pelatihan Kerja

Program yang mendukung pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi 3 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, serta Program Hubungan

Industrial. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 19 % atau setara Rp. 2.938.673.742,-

Sasaran 12 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan, diukur melalui indikator Angka Kemiskinan. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, dan Sekretariat Daerah.

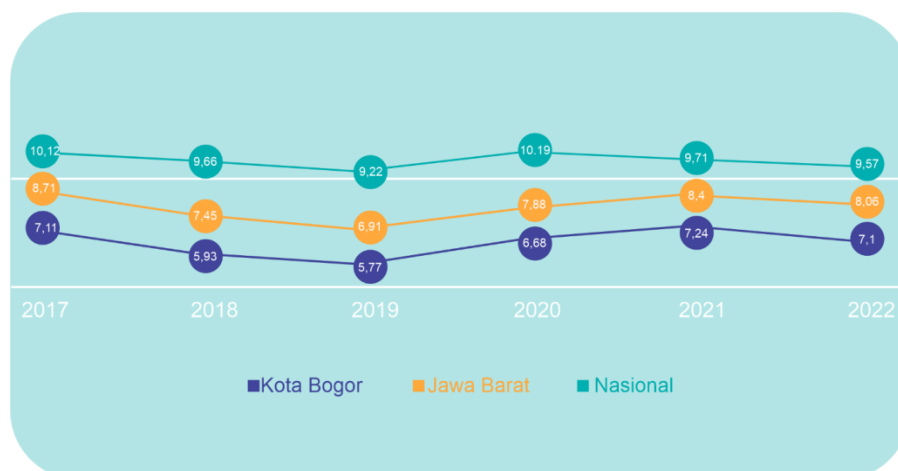


Gambar 2.3.43 Capaian Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik menyatakan, angka kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2022 mencapai 7,10%. Artinya sebanyak 7,10% penduduk Kota Bogor merupakan penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp. 608.949,-. Capaian tahun 2022 menurun 0,14 poin dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, telah tercapai 85,67%. Tren angka kemiskinan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019, namun di tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya dampak yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, dimana aktivitas ekonomi menurun baik disisi supply maupun di sisi demand, yang menyebabkan meningkatnya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan berdampak pula dengan tidak memiliki penghasilan. Walaupun dampak pandemik dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, namun masyarakat menengah ke bawah yang merasakan dampak langsung atas kebijakan-

kebijakan penanggulangan Covid-19.

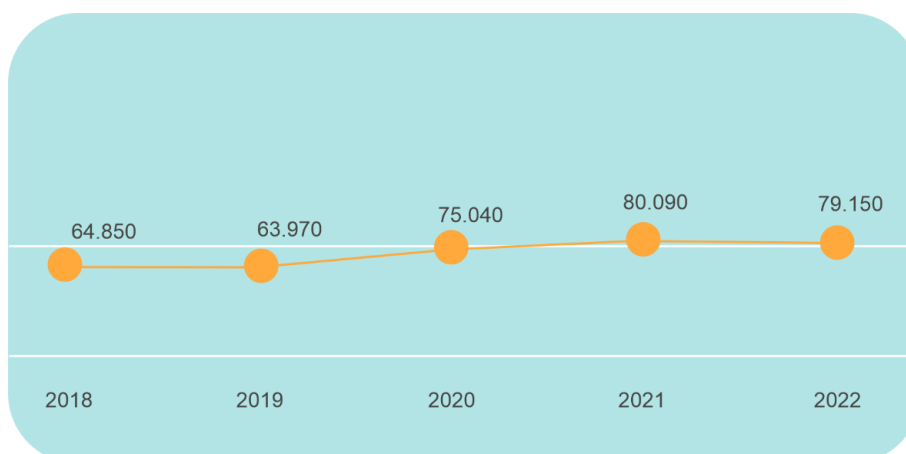
Grafik 2.3.9 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2022



Sumber : BPS (2022)

Beberapa indikator kemiskinan Kota Bogor mengalami perbaikan pada tahun 2022 antara lain Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bogor yang mengalami penurunan pada tahun 2022 setelah sempat melonjak dikarenakan Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 sebanyak 63.970 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 75.040 jiwa. Melalui upaya bersama dan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk terus mengentaskan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan Kota Bogor mulai menunjukkan hasil positif. Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor tercatat mengalami penurunan dari sebesar 80.090 jiwa pada tahun 2021 menjadi sebesar 79.150 jiwa dari total penduduk Kota Bogor 1.099.422 pada tahun 2022.

Grafik 2.3 10 Tren Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022

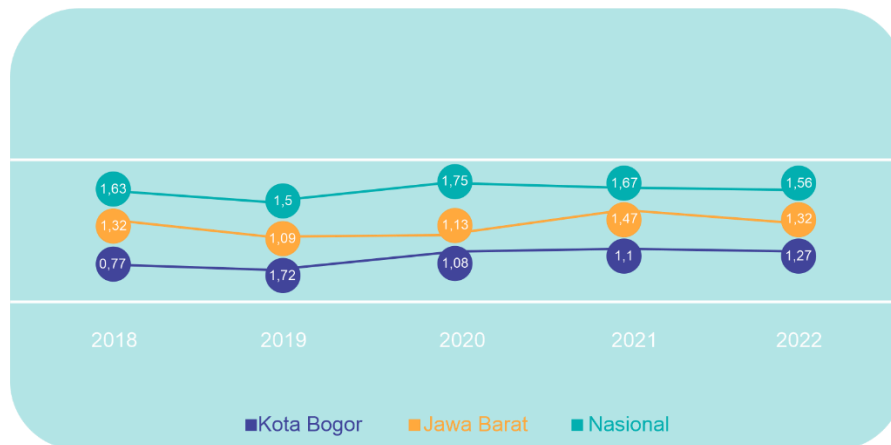




Sumber : BPS (2022)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) tahun 2022 sebesar 1,27 dan meningkat 0,17 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,10 pada tahun 2021. Kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin menjauh garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya besaran intervensi pembiayaan program penanggulangan kemiskinan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2023.

Grafik 2.3 11 Tren Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2022

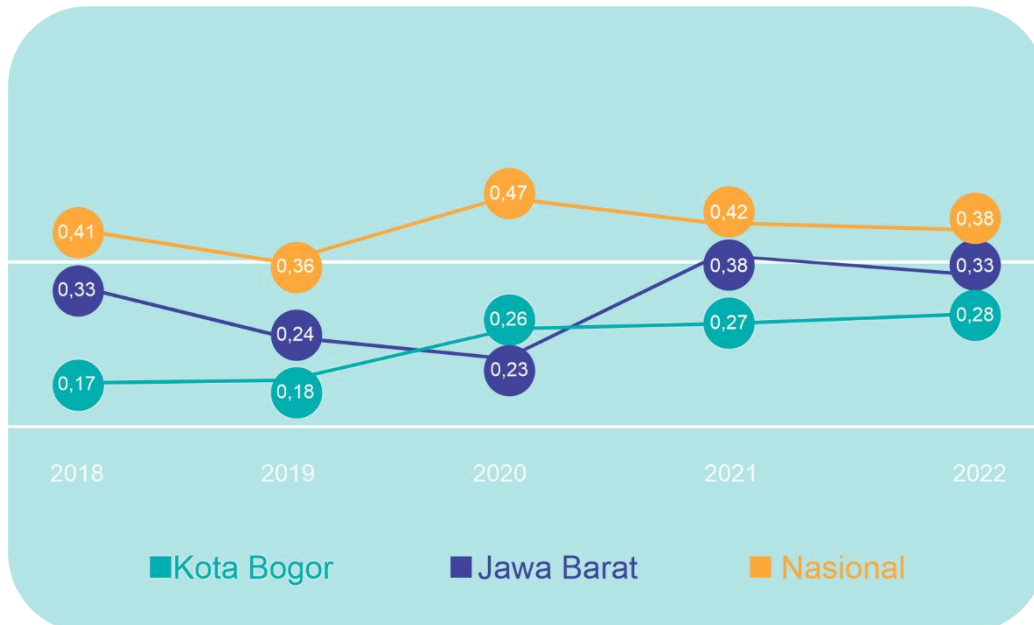


Sumber : BPS (2022)

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 0,27 di tahun 2021 menjadi sebesar 0,29 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bogor meningkat. Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga terganggu bahkan menurun dari kondisi biasanya, hal ini berpotensi bagi warga yang rentan miskin (berada sedikit diatas garis kemiskinan) akan menjadi miskin. Peningkatan kemiskinan ini dapat dilihat dari kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2022. Perlu penanganan di sisi pendapatan dengan berupaya mempertahankan pendapatan atau membuka peluang usaha/peluang kerja,

sementara disisi pengeluaran perlu dilakukan meminimalisir pengeluaran dengan cara adanya subsidi, perlindungan sosial, dan bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*).

Grafik 2.3.12 Tren Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS (2022)

Garis Kemiskinan Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar Rp. 608.949,- meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 571.734,-. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Jaring pengaman sosial menjadi hal penting dalam menjaga kemiskinan tidak



semakin parah. Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bogor Tahun 2022, terdapat 185.565 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 608.638 jiwa yang harus diintervensi program penanggulangan kemiskinan. DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun data tersebut tersebar di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 130.501 jiwa, Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 140.829 jiwa, Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 61.085 jiwa, Kecamatan Bogor Timur sebanyak 50.723 jiwa, Kecamatan Bogor Utara sebanyak 102.595 jiwa, dan Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 112.555 jiwa. Dari data DTKS, yang telah menerima bantuan sosial sebagai berikut:

- Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 60.563 jiwa;
- Penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sebanyak 60.571 jiwa;
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) APBN sebanyak 253.670 jiwa; dan
- Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 29.642 jiwa.

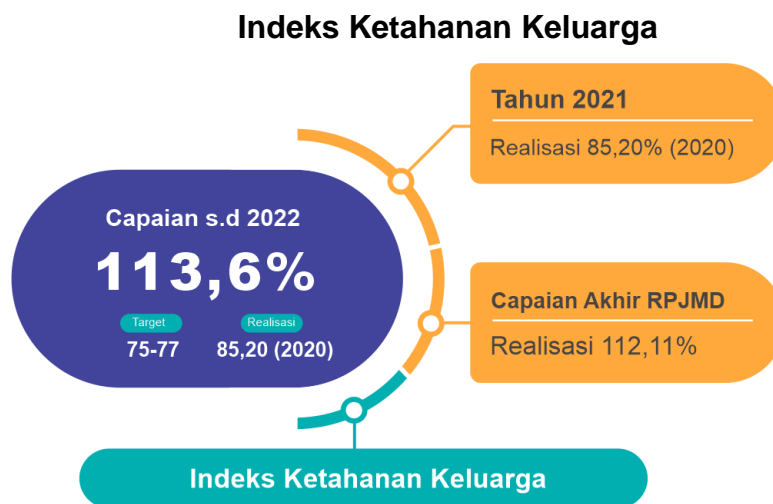
Upaya selanjutnya untuk mengintervensi angka kemiskinan, Pemerintah Kota Bogor menyediakan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan job fair (offline) dan melalui aplikasi bogor kerja. Melalui kegiatan Job Fair tersebut tersedia 813 lowongan kerja dari 32 perusahaan. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga memiliki aplikasi Bogor Kerja. Bogor Kerja merupakan sebuah portal berbasis web yang memberikan informasi seputar lowongan kerja. Pelayanan yang tersedia dalam aplikasi bogor kerja yaitu kartu kuning/AK 1, BLK/LPK, pemagangan. E-learning, BKK, informasi lowongan pekerjaan, daftar perusahaan, profil kandidat, job fair, webinar dan konsultasi. Melalui aplikasi Bogor Kerja diperoleh data bahwa terdapat 3.220 pencari kerja dengan lowongan sebanyak 2.939 pada 116 perusahaan dan berhasil menyerap 3.319 tenaga kerja secara formal dan 3.686 tenaga kerja informal.

Program yang mendukung untuk mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan

terdapat 37 program diantaranya Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, serta Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penempatan Tenaga Kerja.

Sasaran 13 Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga, diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Keluarga (IKK). Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Gambar 2.3 44 Capaian Indeks Ketahanan Keluarga

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) disusun atas dimensi-dimensi ketahanan yang dijabarkan dalam sejumlah variabel dan indikator pengukuran. Dimensi tersebut, yaitu legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya, dan kemitraan gender.

Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) tahun 2022 belum dapat disampaikan capaiannya, dikarenakan masih dalam proses pengumpulan data. Perhitungan IKK dilakukan melalui survey dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis indeks setiap dimensi ketahanan keluarga di seluruh kecamatan dan kelurahan, serta mengetahui dan menganalisis gambaran peta ketahanan keluarga di Kota Bogor.



Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga di Kota Bogor Tahun 2021 dengan target 74-75, tidak dapat direalisasikan. Penanganan pandemi covid 19 telah menyebabkan adanya *refocusing* anggaran, sehingga kegiatan penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan.

Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor tahun 2020 mencapai 85,2. Berdasarkan kategori BPS capaian tersebut termasuk kategori sangat tinggi, demikian juga untuk seluruh wilayah kecamatan. Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, maka empat wilayah kecamatan yaitu kecamatan Bogor Timur, Tanah Sareal, Bogor Barat dan Bogor Utara memiliki nilai Indeks Ketahanan Keluarga di atas rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor dan dua kecamatan yaitu kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan masih dibawah rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor. Indeks Ketahanan Keluarga tertinggi adalah Kecamatan Bogor Timur (87,4) dan terendah adalah kecamatan bogor Tengah (83,6).

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) yaitu melalui Pembinaan Posyandu dilaksanakan di 8 (delapan) Kelurahan khususnya Posyandu yang mengikuti Lomba Posyandu Tk Kota dan menjadi Lokasi Lomba P2WKSS di Tahun 2022 yaitu Kelurahan Sindangbarang, Kelurahan Curug, Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Tegallega, Kelurahan Loji, Kelurahan Tanah Sareal, dan Kelurahan Katulampa. Kegiatan ini mengundang Narasumber dari TP. PKK Kota Bogor, Konselor Puspaga Kota Bogor, dan Advokat UPTD PPA Kota Bogor dengan peserta dari TP. PKK Kecamatan, TP. PKK Kelurahan, Puskesmas, Kader Posyandu, Kader Tribina, Pengelola Paud, Kader KWT, Dasawisma, UP2K Kelurahan, PATBM, PL KB, Posbindu, Ketua RW dan RT Setempat, LPM, Motekar, dan PPJ.



Gambar 2.3.45 Kegiatan Pembinaan Posyandu

Upaya selanjutnya yaitu pelaksanaan Lomba Posyandu yang diikuti oleh 6 (enam) Kecamatan Se-Kota Bogor. Lomba ini akan menentukan Posyandu terbaik dan Kader Posyandu berprestasi Se-Kota Bogor. Adapun hasil penilaian Lomba Posyandu Tingkat Kota Bogor yaitu Juara 1 diraih oleh Posyandu Flamboyan (Kelurahan Bantarjati), Juara II diraih oleh Posyandu Kenanga I (Kelurahan Tegallega), dan Juara III diraih oleh Posyandu Nusa Indah I (Kelurahan Loji).

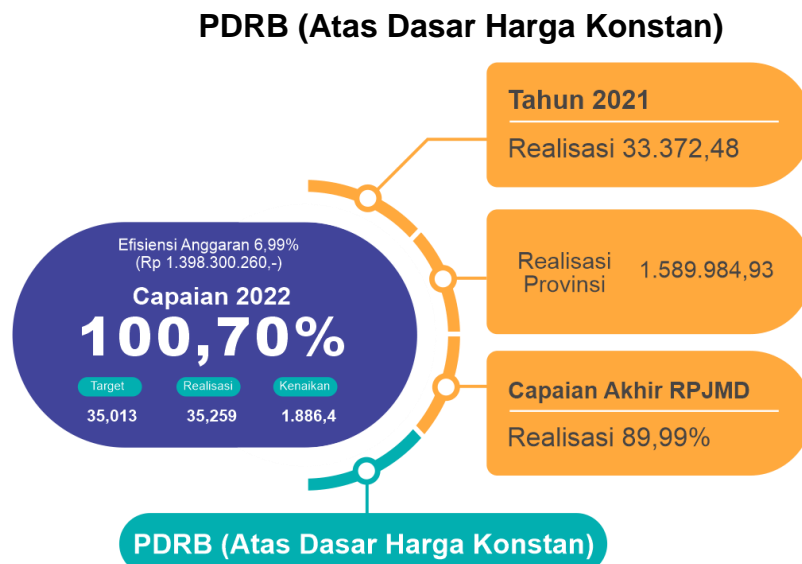
Pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi berupa peningkatan kemampuan dasar pelaku IKM juga mendukung pencapaian Indeks Ketahanan Keluarga (IKK). Pelatihan dasar ini meliputi peningkatan mutu produksi dan pemasaran. Kegiatan ini rutin dilakukan dengan jumlah sasaran di tahun 2022 sejumlah 55 (lima puluh lima) orang.

Upaya lain yang mendukung peningkatan IKK yaitu adanya pelatihan keterampilan macramé pada 5 lokasi lomba PKK yang diikuti oleh masyarakat dari Kelurahan Sindangbarang berjumlah 25 orang dengan pelatih dari PT. Simpul Tali Indonesia (Twist Rope). Kegiatan pelatihan Tata Boga bagi para pelaku usaha menengah kebawah atau masyarakat yang memiliki ketertarikan menjadi pelaku usaha dengan jumlah peserta di Tahun 2022 sebanyak 139 Orang. Serta pelaksanaan rapat koordinasi Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu) Kota Bogor dengan mengundang perangkat daerah dan TP PKK Kota Bogor.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga yaitu Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Sasaran 14 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, diukur melalui indikator PDRB (Atas Harga Konstan), PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku), Pengeluaran Per Kapita, dan Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pendapatan daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Sekretariat Daerah.



Gambar 2.3.46 Capaian PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)

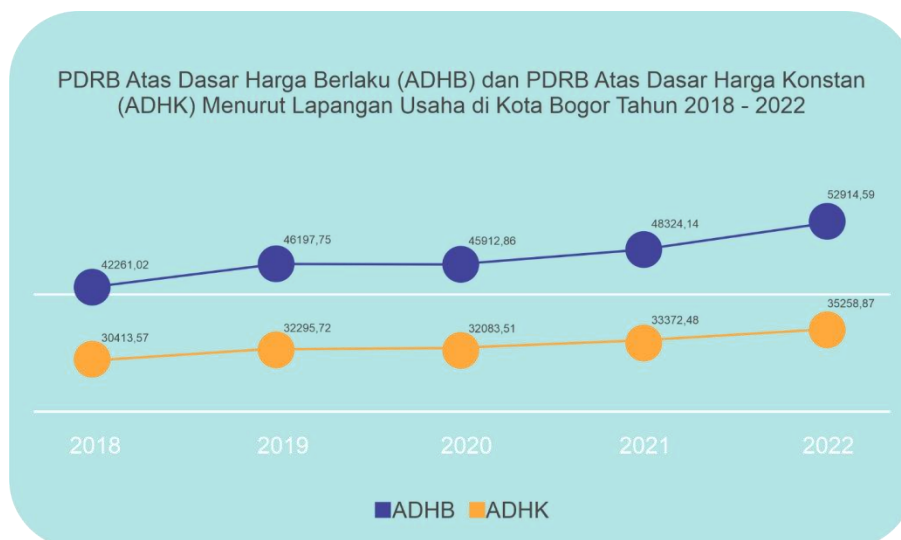
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah.

Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 35.258,87 (milyar rupiah) dengan capaian 100,70%, meningkat 1.886 (milyar rupiah) dari tahun 2021 yaitu sebesar 33.372,48 (milyar rupiah). Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2022 adalah sebesar 5,65 persen. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor Jasa Lainnya sebesar 11,87persen, namun peranannya terhadap PDRB hanyasebesar 3,44 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2022 adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,1 persen. Seperti tahun sebelumnya, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2022 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu sebesar 19,11 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,38 persen. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,98 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 5,08 persen.

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Menurut harga konstan, tahun 2022 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 92% dari total PDRB Kota Bogor atau senilai 35.258.870,02 juta rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari PDRB adalah untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2022 mencapai 11.316.167,41 juta rupiah.

Grafik 2.3.13 PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Tabel 2.3.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (miliar rupiah) Tahun 2018-2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	238,28	239,77	245,16	258,71	267,41
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	5737,43	6065,72	6015,39	6283,63	6603
D	Pengadaan Listrik dan Gas	808,24	771,58	725,40	813,13	893,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	30,70	32,72	36,05	39,77	42,44
F	Konstruksi	3493,78	3289,21	3604,70	3659,26	3672,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran	6494,42	6774,71	6210,44	6379,30	6772,52
H	Transportasi dan Pergudangan	3622,76	3933,69	3850,15	3961,65	4352,35

I	Penyediaan Akomodai dan MAKan Minum	1422,34	1503,11	1530,33	1550,68	1734,17
J	Informasi dan Komunikasi	2095,54	2253,81	3047,81	3182,27	3344,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2083,32	2187,58	2214,25	2245,47	2223,68
L	Real Estat	684,19	736,54	719,16	821,06	877,63
M,N	Jasa Perusahaan	632,73	691,03	617,57	598,73	666,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	697,66	726,854	721,132	746,40	730,75
P	Jasa Pendidikan	887,11	967,826	1041,69	1096,42	1195,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	434,27	479,72	485,70	540,88	595,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1050,80	1131,79	1097,74	1195,11	1336,93
Produk Domestik Regional Bruto		30413,57	32295,72	32083,51	33372,48	35258,87

Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

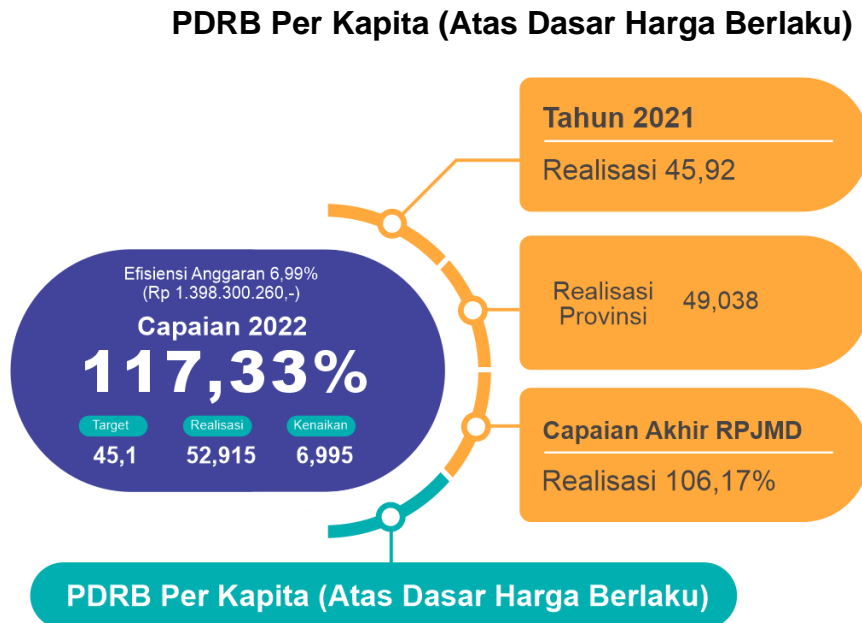
Tabel 2.3.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (persen) Tahun 2018-2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	0,63	2,25	5,53	3,36
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	7,21	5,72	-0,83	4,46	5,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,85	-4,54	-5,99	12,09	9,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,14	6,58	10,16	10,32	6,72
F	Konstruksi	7,91	9,6	-5,86	1,51	0,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran	2,99	3,85	-7,92	2,72	5,38



H	Transportasi dan Pergudangan	7,61	8,58	-2,12	2,9	9,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,07	5,68	1,81	1,33	11,83
J	Informasi dan Komunikasi	9,15	7,55	35,23	4,41	5,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,76	5	1,22	1,41	-0,97
L	Real Estat	6,93	7,65	-2,36	14,17	6,89
M,N	Jasa Perusahaan	7,1	9,21	-10,63	-3,05	11,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	2,06	4,18	-0,79	3,5	-2,1
P	Jasa Pendidikan	7,32	9,1	7,63	5,25	9,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,85	10,47	1,24	11,36	10,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,93	7,71	-3,01	8,87	11,87
Produk Domestik Regional Bruto		6,14	6,19	-0,41	3,76	5,65

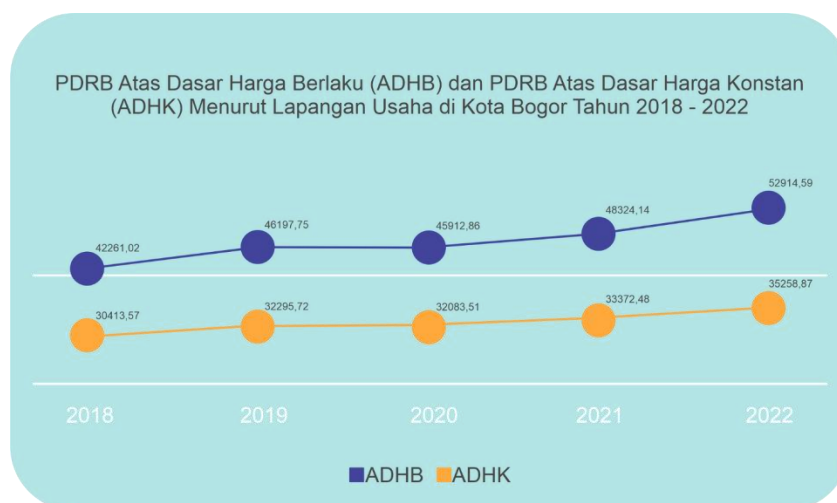
Sumber : BPS Kota Bogor, 2022



Gambar 2.3 47 Capaian PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 52,915 (milyar rupiah), meningkat dari tahun 2021 dengan realisasi sebesar 45,92 (milyar rupiah). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB perkapita Kota Bogor ADHB dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif.

Grafik 2.3.14 PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Tabel 2.3 12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (miliar rupiah) Tahun 2018-2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	293,70	305,49	317,86	337,59	373,75
B	Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	7840,38	8370,60	8299,88	9256,86	10045,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1917,41	1925,05	1984,66	2072,32	2365,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	46,14	50,77	57,62	64,44	70,05
F	Konstruksi	4937,63	5615,54	5206,73	5429,67	5769,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran	8697,45	9388,98	8919,69	9287,19	10109,48
H	Transportasi dan Pergudangan	5252,72	5985,70	5743,77	5739,63	6538,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2008,79	2199,47	2269,20	2351,86	3004,89

J	Informasi dan Komunikasi	2063,11	2157,43	2947,04	2907,94	3004,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3075,48	3346,21	3325,97	3486,57	3727,40
L	Real Estat	919,28	1010,80	984,52	1129,31	1263,59
M,N	Jasa Perusahaan	890,57	1046,28	935,52	939,52	1105,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	1174,50	1239,61	1202,43	1270,51	1241,16
P	Jasa Pendidikan	1266,51	1435,96	1619,79	1721,28	1908,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	558,38	641,40	663,08	781,43	863,53
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1318,99	1478,41	1479,01	1548,01	1822,06
Produk Domestik Regional Bruto		42261,02	46197,75	45912,86	48324,14	52914,60

Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Tabel 2.3 13 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2018-2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,69	0,66	0,69	0,70	0,71
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	18,55	18,12	18,08	19,16	18,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,54	4,17	4,01	4,29	4,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13
F	Konstruksi	11,68	12,16	11,56	11,24	10,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran	20,58	20,32	19,43	19,22	19,11
H	Transportasi dan Pergudangan	12,43	12,96	12,51	11,88	12,36



I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,75	4,76	4,94	4,87	5,11
J	Informasi dan Komunikasi	4,88	4,67	6,42	6,02	5,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,28	7,24	7,24	7,21	7,04
L	Real Estat	2,18	2,19	2,14	2,34	2,39
M,N	Jasa Perusahaan	2,11	2,26	2,04	1,94	2,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	2,78	2,68	2,62	2,63	2,35
P	Jasa Pendidikan	3,00	3,11	3,53	3,56	3,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	1,39	1,44	1,62	1,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,12	3,20	3,22	3,20	3,44
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Program yang mendukung pencapaian indikator PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) meliputi 32 program dengan efisiensi sebesar 6,99% atau setara dengan Rp. 1.398.300.260,-

Pengeluaran Per Kapita

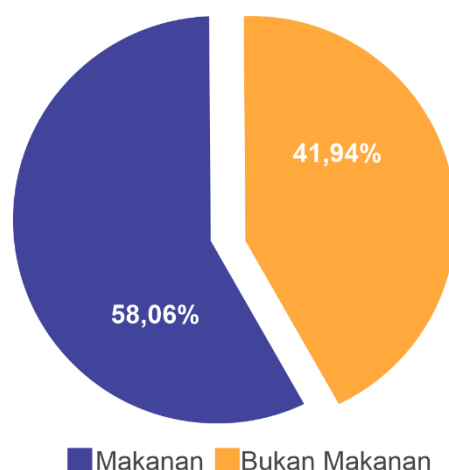


Gambar 2.3.48 Capaian Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita di Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 342.000 (1,89%), dari 11.716.00 di tahun 2021 meningkat menjadi 12.058.000 pada tahun 2022. Pengeluaran perkapita Kota Bogor lebih tinggi dari provinsi dan nasional, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, telah mencapai 101,97%.

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan setiap rumah tangga. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran kebutuhan rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar penduduk khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Grafik 2.3.15 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Bogor Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di kota bogor tahun 2022 tercatat sebesar 1.791.592 rupiah per bulan, dari total pengeluaran tersebut yang digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar 41,94% atau sebesar 751.435 rupiah, sedangkan sisanya untuk kebutuhan non makanan sebesar 58,06% atau sebesar 1.040.157 rupiah. Jika dilihat dari jenis komoditas pengeluaran, pada kelompok pengeluaran bahan makanan, komoditi makanan dan minuman merupakan pengeluaran terbesar yakni tercatat 14,78%, disusul rokok sebesar 4,61% dan padi-padian sebesar 3,83% serta umbi-umbian terkecil sebesar 0,47%. Untuk kelompok pengeluaran non makanan, komoditi perumahan dan fasilitas perumahan merupakan pengeluaran terbesar yaitu sebesar 33,36%, disusul aneka barang dan jasa tercatat sebesar 14,22%, dan terkecil pada komoditas keperluan pesta dan upacara/kenduri tercatat 0,55%.

Grafik 2.3 16 Tren Pengeluaran Per Kapita Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Tabel 2.3.14 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Bogor Tahun 2021 dan Tahun 2022

Kelompok Komoditas	Tahun 2021	Tahun 2022
Padi-padian	67,536	68,569
Umbu-umbian	8,084	8,508
Ikan/udang/cumi/kerang	54,029	56,500
Daging	57,617	48,811
Telur dan Susu	58,301	49,567
Sayur-sayuran	62,325	54,675
Kacang-kacangan	16,288	14,126
Buah-buahan	39,351	34,493
Minyak dan kelapa	17,549	20,106
Bahan minuman	21,872	18,687
Bumbu-bumbuan	17,404	14,312
Konsumsi lainnya	17,131	15,749
Makanan dan minuman	298,983	264,808
Rokok	85,213	82,525
Jumlah Makanan	821,639	751,435
Bukan Makanan		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	615,421	597,762
Aneka barang dan jasa	291,410	254,718
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	44,573	36,078
Barang tahan lama	61,376	54,868
Pajak, pungutan, dan asuransi	106,068	86,803
Keperluan pesta dan upacara	20,022	9,928
Jumlah Bukan Makanan	1,138,861	1,040,157
Jumlah Total	1,960,500	1,791,592

Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

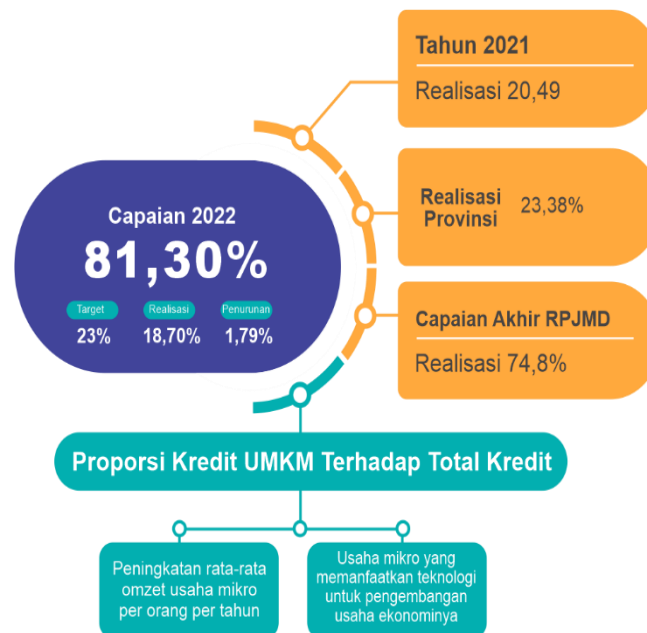


Tabel 2.3.15 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Bogor Tahun 2021 dan Tahun 2022

Kelompok Komoditas	Tahun 2021	Tahun 2022
Padi-padian	3,44	3,83
Umbu-umbian	0,41	0,47
Ikan/udang/cumi/kerang	2,76	3,15
Daging	2,94	2,27
Telur dan Susu	2,97	2,77
Sayur-sayuran	3,18	3,05
Kacang-kacangan	0,83	0,79
Buah-buahan	2,01	1,93
Minyak dan kelapa	0,90	1,12
Bahan minuman	1,11	1,04
Bumbu-bumbuan	0,89	0,80
Konsumsi lainnya	0,87	0,88
Makanan dan minuman	15,25	14,78
Rokok	4,35	4,61
Jumlah Makanan	41,91	41,94
Bukan Makanan		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	31,39	33,36
Aneka barang dan jasa	14,86	14,22
Pakaian, alas akki, dan tutup kepala	2,27	2,01
Barang tahan lama	3,13	3,06
Pajak, pungutan, dan asuransi	5,41	4,85
Keperluan pesta dan upacara	1,02	0,55
Jumlah Bukan Makanan	58,09	58,06
Jumlah Total	100	100

Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit



Gambar 2.3 49 Capaian Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit Tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 18,70% dari target 23% dengan capaian 81,30%. Proporsi kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp. 5.465.949.000.000,- dari total seluruh pinjaman sebesar Rp. 29.174.542.000.000,-. Di tingkat Provinsi Jawa Barat, proporsi kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencapai 23,38% dengan jumlah kredit yang diberikan pada UMKM sebesar 183.505.405.000.000,- dari total seluruh pinjaman sebesar Rp. 784.785.952.000.000,-.

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor.

Capaian kredit UMKM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya kendala yang dihadapi baik untuk



mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usaha UMKM. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis seperti tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala non teknis seperti keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu sedangkan disisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai.

Program yang mendukung pencapaian indikator proporsi kredit UMKM terhadap total kredit yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dan Program Pengembangan UMKM.

Sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, diukur melalui indikator Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang dan Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pedagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Satuan Polisi Pamong Praja.



Gambar 2.3.50 Capaian Realisasi Rencana Struktur Ruang

Kota merupakan salah satu daerah dengan perkembangan yang cukup cepat dan dinamis. Berkembangnya kegiatan perekonomian dan aktifitas perkotaan mengharuskan adanya upaya pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang cukup ekstra. Beberapa permasalahan daerah kota yang perlu ditangani antara lain permasalahan kemacetan lalu lintas, pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan transportasi, kesesuaian penggunaan lahan, alih fungsi lahan, pengembalian fungsi ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya, pertumbuhan perumahan skala



besar, serta permasalahan perkotaan lainnya.

Dinamika pembangunan perkotaan daerah kota yang cepat perlu diantisipasi melalui penyiapan kebijakan tata ruang yang komprehensif dan sesuai perkembangan kota. Rencana tata ruang harus dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terhadap setiap pemanfaatan ruang di daerah kota. Daerah kota perlu memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota yang sesuai dan mampu menjawab tuntutan pertumbuhan internal kota dan juga tantangan yang berasal dari eksternal kota. RTRW Daerah Kota berisi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang daerah kota, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang di dalamnya tertuang ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 – 2031. Dalam Perda terkait RTRW tersebut mengatur tentang rencana struktur ruang yang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional serta rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya.

Untuk pencapaian rencana struktur ruang, wilayah administrasi daerah kota bogor dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pelayanan (WP) yaitu WP Samida yang meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah, WP Pasima yang meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat, WP Utara yang meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat, WP Purwa yang meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara, serta WP Daksina yang meliputi Sebagian Kecamatan Bogor Selatan. Wilayah Pelayanan (WP) yaitu satu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara historikal, fungsional, dan dipertegas dengan kesamaan fisik, kesamaan cara penanganan, dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan.

Persentase ketercapaian rencana struktur ruang sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 26,05%, meningkat 0,04% dari realisasi tahun 2021. Capaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi penilaian pelaksanaan program

pemanfaatan ruang RTRW Kota Bogor pada tahun anggaran 2022. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian di antaranya meliputi :

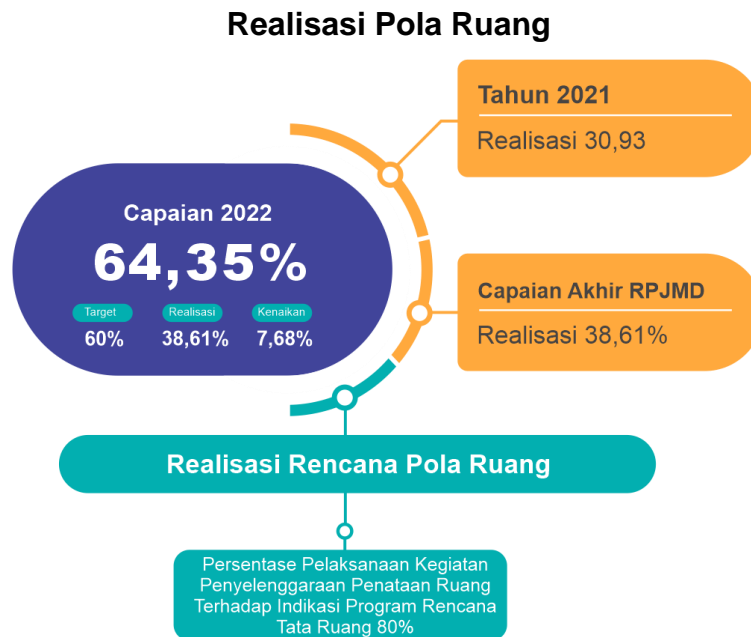
1. Realisasi Pusat Kegiatan di Wilayah Kota pada 5 (lima) Wilayah Pelayanan,
2. Realisasi Sistem Jaringan Prasarana yang meliputi system jaringan transportasi, peningkatan jalan, pembangunan jalan, pengembangan angkutan umum massal dalam kota, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata, peningkatan jalur kereta api Bogor-Sukabumi, serta penataan stasiun kereta api Bogor Paledang dan sekitarnya.
3. Realisasi Sistem Jaringan Energi yang meliputi Pengembangan system jaringan infrastruktur ketenagalistrikan melalui peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani, peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani, peningkatan instalasi jaringan listrik, dan pengembangan system pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energy listrik. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Gas melalui peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya, pengembangan stasiun pengisian bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor, serta pengembangan system keamanan jaringan gas.
4. Realisasi Sistem Jaringan Telekomunikasi melalui pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel, Pengembangan dan perluasan jaringan internet, Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga- lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel, WIFI Publik, dan Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah.
5. Realisasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang meliputi Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi, Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota, Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota, Normalisasi sungai, Pembangunan sumur resapan di perumahan, Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air), Peningkatan kualitas air, dan Pencegahan pencemaran air.
6. Realisasi Infrastruktur Perkotaan melalui Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan pada zona 1, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, dan zona 7,



Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), pengelolaan persampahan, pengembangan system jaringan drainase, penyediaan ruang dan jalur evaluasi bencana, serta penyediaan pedestrian/jalur pejalan kaki.

Kendala yang dihadapi dari tidak tercapainya target tahun 2022 yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) yang baru terbentuk pada akhir tahun 2022 sehingga berbagai kegiatan pendukung penataan ruang tidak bisa diselenggarakan. FPR merupakan suatu wadah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kota Bogor masih dalam proses penyusunan pada Kementerian ATR/BPN sehingga untuk pemenuhan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak dapat terealisasi dan masih menggunakan keterangan rencana kota. KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. KKPR merupakan salah satu syarat dasar perizinan berusaha berbasis resiko.

Program yang mendukung pencapaian indikator Realisasi Rencana struktur Ruang yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup.



Gambar 2.3.51 Capaian Realisasi Pola Ruang

Rencana Pola Ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi serta Ruang Terbuka Hijau, sedangkan kawasan peruntukan budi daya terdiri dari kawasan pertanian, kawasan peruntukan industry, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Persentase ketercapaian rencana struktur ruang sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 38,61%, meningkat 7,68% dari tahun 2021. Capaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi penilaian pelaksanaan indikasi program perwujudan rencana pola ruang dalam RTRW Kota Bogor pada tahun anggaran 2022. Pencapaian kinerja indikator tersebut didukung oleh:

A. Penataan Kawasan Peruntukan Lindung, meliputi:

1. Penataan Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari penataan kawasan sempadan sungai, penataan kawasan sempadan danau/situ, penataan sempadan kawasan sekitar mata air, pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air, perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ, naturalisasi sempadan sungai dan situ, dan pengembangan program



- peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat.
2. Penataan Kawasan Konservasi melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi, dan penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor.
 3. Penataan Ruang Terbuka Hijau melalui pendataan RTH Publik (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi, sistem informasi), peningkatan kualitas RTH, perencanaan dan pembangunan Alun-alun Kota, perencanaan dan pembangunan taman kota, perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan, perencanaan dan pembangunan taman tematik, pembangunan sempadan jalan / Jalur hijau jalan, membangun dan memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi, pendataan TPU, serta pendataan kondisi pohon pelindung dan pemeliharaan pohon pelindung di RTH public wilayah Kota Bogor.

B. Penataan Kawasan Peruntukan Budidaya, meliputi:

1. Penataan Kawasan Pertanian melalui pengembangan sistem pertanian tanaman pangan perkotaan, Kegiatan dukungan keberlanjutan kawasan pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik, Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional, serta Pengembangan kegiatan agrowisata.
2. Penataan Kawasan Industri melalui pendataan kawasan peruntukan Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan), monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan, monitoring dan evaluasi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan, pengembangan promosi hasil industri kecil dan menengah, pengembangan sentra pemasaran hasil industri kecil dan menengah, serta fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan menengah.

3. Penataan Kawasan Pariwisata meliputi pengembangan kluster-kluster wisata, sosialisasi kawasan dan obyek wisata, pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya, penataan wisata kuliner dan belanja, serta penataan wisata sejarah.
4. Penataan Kawasan Perumahan meliputi pendataan perumahan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan dan prasarana sarana utilitas perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan), penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan, Revitalisasi kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan rumah susun, pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan, serta pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan permukiman.
5. Penataan Kawasan Perdagangan Jasa meliputi penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan, serta penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP.
6. Penataan Kawasan Campuran meliputi pemeliharaan dan revitalisasi kawasan perkantoran pemerintahan eksisting, serta rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah.
7. Penataan Kawasan Pendidikan meliputi pendataan Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan), penyusunan Rencana Penambahan Fasilitas Pendidikan dan Rencana Alokasi Lokasi di Kota Bogor, revitalisasi prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK, serta monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi.
8. Penataan Kawasan Kesehatan meliputi pendataan Fasilitas Kesehatan, Revitalisasi pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan, serta monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan.
9. Penataan Kawasan Peribadatan meliputi pendataan Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan), revitalisasi fasilitas peribadatan, serta pembangunan fasilitas peribadatan.



10. Penataan Kawasan Olahraga meliputi pendataan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan, penataan fasilitas olahraga yang ada, serta pembangunan fasilitas olahraga.
11. Penataan Kawasan Transportasi meliputi Penataan Stasiun Kereta Api Bogor, serta Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya.
12. Penataan Kawasan Infrastruktur Perkotaan meliputi Pengembangan Gardu Induk Listrik, Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum, Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu, serta Pengembangan kolam retensi.

Kendala yang dihadapi dari tidak tercapainya target tahun 2022 yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) yang baru terbentuk pada akhir tahun 2022 sehingga berbagai kegiatan pendukung penataan ruang tidak bisa diselenggarakan. FPR merupakan suatu wadah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kota Bogor masih dalam proses penyusunan pada Kementerian ATR/BPN sehingga untuk pemenuhan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak dapat terealisasi dan masih menggunakan keterangan rencana kota. KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. KKPR merupakan salah satu syarat dasar perizinan berusaha berbasis resiko.

Program yang mendukung pencapaian indikator Realisasi Rencana struktur Ruang yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Sasaran 16 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi, diukur melalui indikator Persentase Jalan Berkondisi Baik dan Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Gambar 2.3 52 Capaian Jalan Berkondisi Mantap

Persentase jalan berkondisi baik sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 88,23%. Dari total panjang jalan kota 859.979,84 m, jalan yang berkondisi mantap baru mencapai 758.746,54 m. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meningkat 4,03 poin dan hampir mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 98,03%.



Gambar 2.3.53 Kegiatan Perbaikan Jalan

Tabel 2.3 16 Rincian Panjang Jalan Kota Beserta Kondisi Permukaannya Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kondisi Permukaan Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Tanah Sareal	105.146,96	76.002,1	13.006	2.778,5
2	Bogor Utara	28.931	76.482	12.446	1347
3	Bogor Timur	60.896	11.012	5.505	1336
4	Bogor Selatan	60.430,02	77.047,16	19.361,4	9.285,3
5	Bogor Tengah	32.581	72.741	8.371	119
6	Bogor Barat	51.946	10.5531,3	24.321,1	3.357
Jumlah		858.746,54		83.010,5	18.222,8

Sumber : Dinas PUPR Kota Bogor (2022)

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator jalan yang berkondisi baik yaitu adanya pembangunan jalan sepanjang 438,85 m tahun 2022, dengan rincian pembangunan jalan lanjutan R3-Katulampa sepanjang 162,8 m dan pembangunan simpang jalan manunggal-RE Martadinata sepanjang 276,05 m. Selain itu juga dilaksanakan pembangunan trotoar jalan R3 sepanjang 1.386,5 m, pembangunan trotoar jalan rambut RW 6 Kelurahan Baranangsiang sepanjang 63,24 m, terlaksananya rekonstruksi jalan dan trotoar sepanjang 44.538 m, terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 3.437 m, dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 72 km.

Upaya selanjutnya yang dilaksanakan yaitu adanya pembangunan 2 unit

jembatan sepanjang 87,86 m, adanya rehabilitasi 1 unit jembatan sepanjang 154,4 m, serta adanya pemeliharaan rutin jembatan di 6 kecamatan program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Jalan Berkondisi Mantap yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 12,05 % atau setara Rp. 22.048.617.83.

Cakupan Pelayanan Angkutan Umum



Gambar 2.3 54 Capaian Cakupan Pelayanan Angkutan Umum

Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 42,15% atau tercapai 95,80%. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 39,41 poin dari tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai 95,80%. Capaian indikator tersebut diperoleh dari panjang lintasan trayek angkutan kota sepanjang 378,3 km ditambah panjang lintasan Biskita Trans Pakuan sepanjang 101,4 km dibandingkan dengan luas Wilayah Kota Bogor 111,38 km.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan angkutan umum melalui pelaksanaan program SAUM BisKita Trans Pakuan (sistem Angkutan Umum Massal) dengan skema “Buy The Service”, yaitu layanan angkutan umum berbasis bus rapid transit, yang menerapkan mekanisme subsidi BTS (*Buy The Service*) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Layanan BisKita Trans Pakuan atau “Bus Inovatif Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Anda” sampai dengan tahun 2022 telah beroperasi pada 4 (empat) koridor pelayanan di Kota Bogor, dan direncanakan kedepannya akan tersedia 6 (enam) koridor pelayanan. Melalui program Biskita tersebut, dapat meningkatkan cakupan pelayanan angkutan umum dengan menambah panjang lintasan angkutan umum sebesar 101,4 km sehingga sampai dengan tahun 2022 total panjang lintasan menjadi 479,7 km.

Untuk mendukung pelaksanaan program Biskita, Pemerintah Kota Bogor melakukan konversi angkutan perkotaan (angkot) 3:1, yaitu mereduksi 3 unit angkot menjadi 1 unit bis. Sampai dengan tahun 2022, total angkot yang telah dikonversi sebanyak 108 unit angkot menjadi 49 unit biskita. Selain itu, untuk melaksanakan penataan angkutan umum pada jalur utama, telah dilakukan reduksi angkot 2:1 sebanyak 135 unit angkot, kompensasi sebanyak 38 unit angkot dan penghapusan sebanyak 18 unit angkot.



Gambar 2.3 55 Kegiatan Reduksi, Konversi, dan Kompensasi Angkutan Umum

Program yang mendukung pencapaian indikator persentase cakupan pelayanan angkutan umum yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ).

Tabel 2.3 17 Akuntabilitas Keuangan

MISI 1 MEWUJUDKAN KOTA YANG SEHAT					
SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	569,984,468,346	553,165,633,011	16,818,835,335	97,05	2,95
Sasaran 2 : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	83,599,335,656	79,864,528,077	3,734,807,579	95,53	4,47
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	188,320,923,841	179,138,653,823	9,182,270,018	9,12	4,88
Sasaran 4 : Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan	48,469,439,238	45,556,618,912	2,912,820,326	93,99	6,01
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	19,511,248,323	18,735,200,601	776,047,722	96,02	3,98
MISI 2 MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS					
SASARAN	PAGU	REALISASI	SELISIH	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	277,468,420,056	260,031,681,848	17,436,738,208	93,72	6,28
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Generasi Muda (Smart People)	15,891,383,600	14,463,359,039	1,428,024,561	91,01	8,99

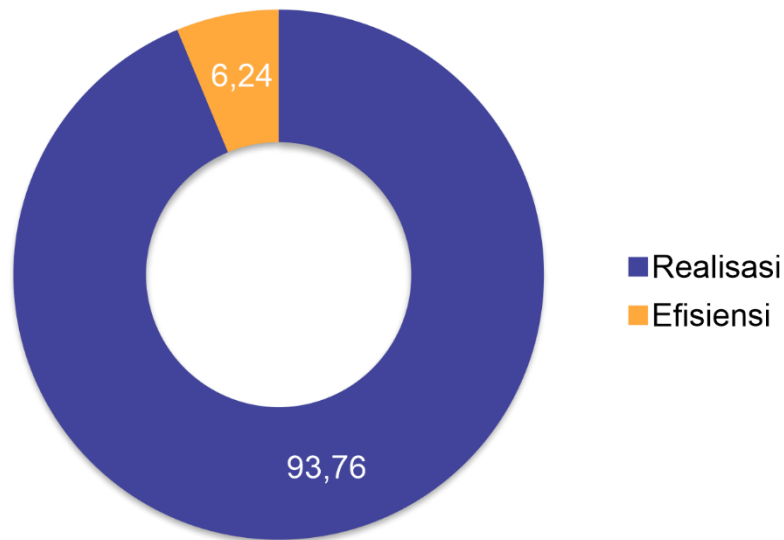


Sasaran 3 : Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	2,248,624,200	2,178,845,400	69,778,800	96,90	3,10
---	---------------	---------------	------------	-------	------

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, Toleransi dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat	67,762,183,909	64,167,380,637	3,594,803,272	94,69	5,31
Sasaran 5 : Terciptanya Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1,530,377,356,135	1,431,587,637,328	98,789,718,807	93,54	6,46
Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)	14,479,286,058	13,383,386,572	1,095,899,486	95,54	4,46
MISI 3 MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA					
SASARAN	PAGU	REALISASI	SELISIH	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
Sasaran 1 : Menurunnya Tingkat Pengangguran	13,848,231,800	10,099,106,925	3,749,124,875	72,93	27,07
Sasaran 2 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3,085,822,743	2,740,908,307	344,914,436	88,82	11,18
Sasaran 3 : Meningkatnya Ketahanan Keluarga	10,781,112,105	7,492,931,445	3,288,180,660	69,5	30,5
Sasaran 4 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	21,180,663,136	19,782,362,876	1,398,300,260	93,40	6,6

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ruang Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	44,569,515,978	38,479,189,700	6,090,326,278	86,34	13,66
Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	274,941,727,088	246,866,909,438	28,074,817,650	89,79	10,21

Grafik 2.3 17 Realisasi Anggaran



Kinerja Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2022 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun secara tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp. 3.186.519.742.212,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.987.734.333.939,- atau sebesar 93,76%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran ke-1 pada Misi ke-1 yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan realisasi sebesar 97,05% dan penyerapan anggaran terendah terdapat pada sasaran ke-3 pada Misi ke-3 yaitu Meningkatkan Ketahanan Keluarga dengan realisasi sebesar 69,5%.

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 16 sasaran, terdapat 11 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup Saat Lahir mencapai 100,27% dan efisiensi anggaran sebesar 3,84%.
2. Sasaran Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih sehat dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga ber-PHBS mencapai 100,03% dan efisiensi anggaran sebesar 1,46% serta indikator kinerja Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga mencapai 116,14 dan efisiensi anggaran sebesar 5%.
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan Indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum yang Layak mencapai 104,24% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,76%, indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum yang Aman mencapai 106,85% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,76%, indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Layak mencapai 102,95% dengan efisiensi sebesar 10,24%, indikator kinerja Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota mencapai 104,72% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,68%, serta indikator kinerja Persentase Reduksi Sampah mencapai 114,71% dengan efisiensi sebesar 5,75%.
4. Sasaran Terkendalinya Sumber-sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air mencapai 103,19% dengan efisiensi anggaran sebesar 16,18%, serta indikator kinerja Indeks Kualitas Udara mencapai 114,24% dengan efisiensi anggaran sebesar 16,18%.

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan dengan indikator kinerja Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik mencapai 100,71% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,99%.
6. Sasaran Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dengan indikator kinerja Kategori Inovasi Daerah mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,1%.
7. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, Toleransi dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender mencapai 101,16% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,4%, serta indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama mencapai 109,33% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,21%.
8. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknomogi (*Smart City*) dengan indikator kinerja Level Kematangan Smart City mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,46%.
9. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 104,77% dengan efisiensi anggaran sebesar 19%.
10. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator kinerja PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) mencapai 100,70% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,99%, indikator kinerja PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) mencapai 117,33% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,99%, serta indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita mencapai 104,54% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,99%.
11. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi dengan indikator kinerja Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap mencapai 102,59% dengan efisiensi anggaran sebesar 12,05%.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi .

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pada poin 11 dijelaskan, bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum

, akan tetapi pada Tahun 2022 tidak ada Tugas Pembantuan yang di limpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Kota Bogor .

3.1.1. Target Kinerja

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Bogor Tidak Menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

3.1.2. Realisasi

Tidak ada realisasi dikarenakan tidak ada Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.2.1. Target Kinerja

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Bogor Tidak Menerima Tugas Pembantuan dari Provinsi Jawa Barat

3.2.2. Realisasi

Tidak ada realisasi dikarenakan tidak ada Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Masih adanya perbedaan pemahaman terkait tugas pembantuan yang sesuai dengan ruang lingkupnya .

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum maka terkait tugas pembantuan akan digali lebih lanjut.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan berdasarkan Permendikbudristek 32 tahun 2022 tentang SPM Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.1 1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15tahun yang berpartisipasi dalam pendidikanDasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupajumlah barang, jasad an sumber daya manusiasesuai denganyang ditetapkandalam standarteknis pelayananminim al bidangpendidikan
		Rata-rata kemampuan literasidan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil duatahun sebelum nya	Setiap tahun				

2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah anak usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan an dasar atau menengah ah yang akan dipenuhi	Setiap tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-Tahun yang berpartisipasi dalam PendidikPAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah anak usia 5-6 Tahun yang akan dipenuhi	Setiap tahun

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 2 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR	2.328.704.666.532			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	491.356.773.395,00	21%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPMPADA SATKER PD	79.019.918.536		3%	16 %
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPMSUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN- LAIN)				
	A. APBN				
	B. APBD	61.891.458.536,0			
	B. DAK	17.128.460.000,0			
	C. LAINNYA (BANKEU PROV JABAR)				

4. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung penyelenggaraan Urusan Pendidikan pada Tahun 2022 sebanyak 122 orang. Berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan dan pejabat struktural.



1) Pendidikan Formal Tabel 4.1.3

Tabel 4.1.3 Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Jumlah		Status Pegawai	
	L	P	PNS	NON PNS
SD/SEDERAJAT				
SMP/SEDERAJAT	1		1	
SMA/SEDERAJAT	32	3	7	28
D-1				
S-1	44	21	35	30
S-2	18	3	19	2
S-3				
Jumlah	95	27	62	60

2) Pangkat golongan Tabel 4.1.4

Tabel 4.1.4 Pangkat golongan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Jenjang Eselon	Jumlah
D3	5	I/c	1	IIB	1
D4	1	II/a	5	IIIA	1
S1	50	II/b	15	IIIB	4
S2	36	II/c	28	IVA	9
S3	1	II/d	18		
SD/SEDERAJAT	2	III/a	19		
SMA/SEDERAJAT	25	III/b	26		
		III/c	4		
		III/d	4		
Jumlah	120	Jumlah	120	Jumlah	15

5. Hasil Capaian SPM Urusan

Tabel 4.1.5 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1	2	3	-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA	100.00 %
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini		



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
• Jumlah yang Harus Dilayani		18,705	18,705	0	100%
:					
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Buku gambar	3	3	0	100.00 %
	2 . Alat mewarnai	3	3	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	18,705	18,705	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	388	388	0	100.00 %
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,026	1,026	0	100.00 %
	JUMLAH	20,125	20,125	0	500.00 %
2 .	Pendidikan Dasar				100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
• Jumlah yang Harus Dilayani		141,557	141,557	0	100%
:					
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
		-1	-2	-3	
	1 . Buku teks pelajaran	141,557	141,557	0	100.00 %
	2 . Perlengkapan belajar	141,557	141,557	0	100.00 %
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	406	406	0	100.00 %



	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1,852	1,852	0	100.00 %
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	5,076	5,076	0	100.00 %
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	34,798	34,798	0	100.00 %
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3,166	3,166	0	100.00 %
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	406	406	0	100.00 %
	JUMLAH	328,818	328,818	0	800.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	9,803	9,803	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
		-1	-2	-3	
	1 . Modul belajar	9,803	9,803	0	100.00 %
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	409	409	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	1,055	1,055	0	100.00 %
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	163	163	0	100.00 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	211	211	0	100.00 %
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	87	87	0	100.00 %
	7 . Perlengkapan belajar	9,803	9,803	0	100.00 %
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	38	38	0	100.00 %
	JUMLAH	21,569	21,569	0	800.00 %

6. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan Penerapan SPM Bidang Pendidikan yang muncul di Kota Bogor :

1. Ketersediaan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan terutama pada jenjang PAUD, hal tersebut nampak pada minimnya satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal C. Pemenuhan penilaian akreditasi satuan pendidikan oleh assessor/pengawas dari Badan Akreditasi Nasional relatif sedikit setiap tahunnya mengingat ketersediaan assessor yang terbatas pun anggaran yang tersedia relatif kecil.
2. Jumlah guru/pendidik pada semua jenjang pendidikan masih kurang sehingga dalam pemenuhan guru/pendidik dengan kualifikasi S-1/D4 masih rendah, khususnya pada jenjang PAUD. Hal ini diakibatkan minimnya rekrutmen Guru pada semua jenjang setiap tahunnya.
3. Pemenuhan biaya personil peserta didik khususnya pada pendidikan kesetaraan melalui Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) masih terbatas hanya bagi peserta didik dengan rentang usia 7-21 tahun, sementara hampir 35% peserta didik pendidikan kesetaraan berusia di atas 25 tahun.

Pemecahan Masalah Penerapan SPM Bidang Pendidikan :

1. Mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui program pemetaan mutu satuan pendidikan yang melibatkan seluruh komponen pendidikan, antara lain Assesor, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda mengusulkan penambahan jumlah satuan pendidikan untuk dilakukan penilaian akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional.
2. Rekrutmen Guru/Pendidik melalui jalur pengangkatan ASN yakni P3K diusulkan ke Kementerian/Instansi terkait sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Guru/Pendidik pada setiap jenjang pendidikan. Hal lain yang dilakukan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan kompetensi atau bahkan kualifikasi Guru/Pendidik pada semua jenjang pendidikan.

3. Optimalisasi anggaran daerah dalam upaya pemenuhan biaya operasional bagi kelompok belajar pendidikan kesetaraan dengan peserta didik di atas 25 tahun

4.2 URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. bahwa Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Tingkat Kabupaten / Kota ada 12 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan kesehatan Balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif (15-59) Tahun;
- g. Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (>60) Tahun;
- h. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis (TBC);
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahdayakan tahanan tubuh manusia *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)

2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Table 4.2 1 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan Tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak Pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya Manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya Manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Table 4.2.2 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR	2,328,704,666,532			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	247,023,003,739	10.61 %		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	30,248,063,245		1.30 %	12.25 %

4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	0			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	B. DAK	15.059.028.995			
	C. LAINYA	0			

4. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada Dinas Kesehatan yang mendukung penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Tahun 2022 sebanyak 86 orang. Berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan dan pejabat struktural.

1) Pendidikan Formal Tabel 4.2.3

Table 4.2 3 Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Status Pegawai	
	PNS	NON PNS
SMP/SEDERAJAT	1	
SMA/SEDERAJAT	5	
D-1	0	
D-3	11	
D-4	3	
S-1	50	
S-2	20	
Jumlah	86	87

2) Pangkat Golongan Tabel 4.2.4

Table 4.2 4 Pangkat Golongan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	L	P
Pembina Utama Muda / Ivc	-	1
Pembina Tingkat I / IV b	0	2
Pembina /IV a	3	19



Penata Tingkat I/ III-d	2	17
Penata/ III-c	0	9
Penata Muda Tingkat I/ III-b	4	7
Penata Muda / III-a	4	14
Pengatur Tingkat I/ II-d	0	2
Pengatur/ II-c	1	1
Jumlah	14	72

3) Jumlah Pejabat Tabel 4.2.5

Table 4.2 5 Jumlah Pejabat

Jenjang Eselon	L Jumlah	
	L	P
Eselon II b	0	1
Eselon III a	0	1
Eselon III b	1	3
Eselon IV a	0	2
Eselon IV b	0	0
Jumlah	1	7

5. Hasil Capaian SPM Urusan

Table 4.2.6 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100.00%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	<i>4810</i>	<i>4810</i>	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	100%
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	17450	17450	0	100.00%
	2 . Tablet tambah darah	4810	4810	0	100.00%
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test	25	25	0	100.00%

	Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin				
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	4810	4810	0	100.00%
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4810	4810	0	100.00%
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	68	68	0	100.00%
	7 . Bidan	68	68	0	100.00%
	8 . Perawat	25	25	0	100.00%
	JUMLAH	20,125	20,125	0	800.00%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	4,086	4,086	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Formulir Partograf	4,086	4,086	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	4,086	4,086	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4,086	4,086	0	100.00 %
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	68	68	0	100.00 %
	5 . Bidan	68	68	0	100.00 %
	6 . Perawat	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	12,419	12,419	0	600.00 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	4,407	4,407	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Vaksin Hepatitis B0	12,728	12,728	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	4,407	4,407	0	100.00 %



	3 . Salep/tetes mata antibiotik	4,407	4,407	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	4,407	4,407	0	100.00 %
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	4,407	4,407	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4,407	4,407	0	100.00 %
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	68	68	0	100.00 %
	8 . Bidan	68	68	0	100.00 %
	9 . Perawat	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	34,924	34,924	0	900.00 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	21,206	21,206	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	21,206	21,206	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	21,206	21,206	0	100.00 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	21,206	21,206	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru	6,416	6,416	0	100.00 %
	5. Vitamin A Merah	62,327	62,327	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	12,763	12,763	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	12,108	12,108	0	100.00 %
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	12,108	12,108	0	100.00 %
	9 . Peralatan Anafilaktik	21,206	21,206	0	100.00 %
	10 . Bidan	68	68	0	100.00 %
	11 . Dokter	68	68	0	100.00 %
	12 . Perawat	25	25	0	100.00 %
	13 . Ahli Gizi	25	25	0	100.00 %
	14 . Guru PAUD	11,313	11,313	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	2,457	2,457	0	100.00 %
	JUMLAH	204,502	204,502	0	1,500.00%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia				100.00%

Pendidikan Dasar					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	119,952	119,952	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Buku raport kesehatanku	119,952	119,952	0	100.00 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	119,952	119,952	0	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	119,952	119,952	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	25	25	0	100.00 %
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	25	25	0	100.00 %
	6 . Dokter/Dokter gigi	25	25	0	100.00 %
	7 . Bidan	68	68	0	100.00 %
	8 . Perawat	25	25	0	100.00 %
	9 . Ahli Gizi	25	25	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	25	25	0	100.00 %
	11 . Guru	1,006	1,006	0	100.00 %
	12 . Kader Kesehatan	2,457	2,457	0	100.00 %
	JUMLAH	363,537	363,537	0	1,200.00%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	4,407	4,407	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25	25	0	100.00 %



	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	25	25	0	100.00 %
	3 .Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	25	25	0	100.00 %
	4 . Dokter	25	25	0	100.00 %
	5 . Bidan	25	25		
	6 . Perawat	25	25	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	25	25	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	25	25	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	225	225	0	900.00 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	11,516	11,516	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	11,516	11,516	0	100.00 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	11,516	11,516	0	100.00 %
	3 . Buku kesehatan lansia	11,516	11,516	0	100.00 %
	4 . Dokter	25	25	0	100.00 %
	5 . Bidan	25	25		
	6 . Perawat	25	25	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	25	25	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	25	25	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	34,698	34,698	0	900.00 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				100.00%



	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	19,684	19,684	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25	25	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	25	25	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	25	25	0	100.00 %
	4 . Dokter	25	25	0	100.00 %
	5 . Bidan	25	25		
	6 . Perawat	25	25	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	175	175	0	700.00 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	5,739	5,739	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	25	25	0	100.00 %
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	25	25	0	100.00 %
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25	25	0	100.00 %
	4 . Dokter	25	25	0	100.00 %
	5 . Bidan	25	25	0	100.00 %
	6 . Perawat	25	25	0	100.00 %



	7 . Ahli Gizi	25	25	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	200	200	0	800.00 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	266	266	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	25	25	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	25	25	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	25	25	0	100.00 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25	25	0	100.00 %
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	125	125	0	500.00 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	6,077	6,077	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	25	25	0	100.00 %

	2 . Reagen Zn TB	25	25	0	100.00 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95		25	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	25	25	0	100.00 %
	5. Catridge tes cepat molekuler	3	3	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	10,34	10,34	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	25	25	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	25	25	0	100.00 %
	9 . Perawat	25	25	0	100.00 %
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	25	25	0	100.00 %
	11 . Penata Rontgen	8	8	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	25	25	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	25	25	0	100.00 %
	JUMLAH	10,601	10,601	0	1,300.00%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	*Jumlah Yang Harus Dilayani :	24,267	24,267	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	
		-1	-2	-3	100.00%
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	25	25	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	25	25	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	25	25	0	100.00 %



4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	25	25	0	100.00 %
5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	25	25	0	100.00 %
6 . Perawat	25	25	0	100.00 %
7 . Bidan	25	25	0	100.00 %
8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	25	25	0	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan masyarakat	25	25	0	100.00 %
10 .Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	25	25	0	100.00 %
JUMLAH	250	250	0	1,000.00%

6. Permasalahan Dan Solusi

PERMASALAHAN

- a. Terlambatnya pelaporan SPM selalu menjadi masalah utama, karena terlambatnya pengumpulan data dari level terbawah atau Puskesmas, sehingga berimbas pada pelaporan di tingkat Dinas Kesehatan.
- b. Perbedaan sasaran atau target capaian yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan berdasarkan data estimasi sehingga perubahan target seringkali terjadi di tengah tahun berjalan.
- c. Data penjangkauan kesehatan untuk kegiatan pelayanan anak usia sekolah dihitung pertahun ajaran baru sehingga pendataan tahun 2022 masih berlangsung sampai dengan bulan juni 2023. Sehingga pengisian data untuk pelayanan anak usia sekolah seringkali baru terisi di triwulan akhir.
- d. Pengumpulan data capaian tidak hanya berasal dari puskesmas namun dari seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor, meliputi Rumah Sakit dan klinik. Seringkali pelaporan tersebut terlambat dilaporkan sehingga pengisian capaian di triwulan akhir lebih besar dari bulan sebelumnya.
- e. Perhitungan pencapaian mutu layanan dihitung berdasarkan pengadaan yang dilakukan oleh program terkait, bila pengadaan tidak dilaksanakan atau tidak ada di Kabupaten/Kota maka capaian dianggap nol.

- f. Perencanaan dan Penganggaran SPM sejalan dengan penganggaran kegiatan, tidak dikhususkan ke dalam anggaran SPM. Namun Kegiatan yang dijalankan sudah sejalan dengan indikator yang ada dalam SPM

SOLUSI

- a. Menyamakan persepsi mengenai data sasaran pada awal tahun, sehingga tidak terjadi perubahan target sasaran di tengah tahun berjalan
- b. Melakukan bimbingan teknis pada puskesmas terkait pelaporan data layanan kesehatan
- c. Peningkatan SDM yang terlatih di bidangnya
- d. Memperkuat serta menyamakan persepsi mengenai DO dan Data dasar Jumlah penduduk untuk Prevalensi Program;
- e. Menyepakati batas waktu pengumpulan Laporan puskesmas untuk semua program sebelum tgl 05

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota ada 2 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.



Tabel 4.3 1 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 2 Alokasi Anggaran

No.	Pendanaan	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR	1,610,365,000			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	0	0.00%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	0		0.00%	0.00%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL	7,457,525,000			

DAN LAIN- LAIN)				
A. APBN	0			
B. APBD	0			
B. DAK	7,057,525,000			
C. LAINNYA	400,000,000			

1. Urusan Air Minum:

- a. DAK Fisik Bidang Air Minum melalui APBD Kota Bogor dari target keuangan sebesar Rp 2.636.325.000 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.431.776.298 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Tujuh Puluh Tujuh Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Delapan Rupiah). Untuk mendukung perencanaan yang baik, maka dimulai tahun ini dilakukan pendataan by name by address terhadap warga yang menggunakan air minum baik itu dari Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat. Sementara ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air minum baik dari Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya akses air minum yang aman terus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Mengingat sub kegiatan yang terkait dengan pengelolaan air minum Bukan Jaringan Perpipaan tidak termasuk kedalam sub kegiatan yang dilaksanakan di kawasan perkotaan, maka pada tahun ini tidak ada kegiatan konstruksi untuk pengembangan dan penambahan sambungan rumah untuk sumber air yang dikelola oleh masyarakat, hal ini dalam rangka pencapaian target akses aman air minum perkotaan.
- b. Keberhasilan pencapaian ini sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:
 - 1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air minum di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan

Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah di kawasan perkotaan.

- 2) Penambahan jumlah pelanggan yang dikelola oleh PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor, apalagi secara umum dalam 5 tahun kedepan PDAM bertekad untuk mencapai target 100-0-100 serta meningkatkan kualitas pelayanan baik yang menyangkut aspek teknis seperti kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta aspek pengelolaan yang lebih transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan.
 - 3) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya pengelola air minum yang baik dan sehat sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang ditimbulkan dari air.
 - 4) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sumber air bersih yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk sub kegiatan optimalisasi dan penambahan sambungan rumah sesuai dengan standar dari PERUMDA Tirta Pakuan sehingga dapat dipenuhi kedalam capaian akses aman air minum Kota Bogor.
 - 5) Secara teknis PERUMDA Tirta Pakuan juga harus mendapat jaminan ketersediaan air baku dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwujudkan dengan surat izin pengusahaan air baku (SIPA).
- c. Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:
- 1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan
 - 2) Kebijakan pendanaan maupun penagihan tarif pelanggan
 - 3) Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat
 - 4) Dukungan pendanaan
 - 5) Jaminan Ketersediaan Air Baku

- 6) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air minum di Kota Bogor

2. Urusan Air Limbah :

- d. Bidang Sanitasi salah satunya urusan air limbah domestik melalui APBD Kota Bogor dan dari APBD murni pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dari target keuangan sebesar Rp. 6.807.056.500 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Lima Puluh Enam Rupiah Lima Ratus Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.734.927.529 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah.).
- e. Mulai tahun ini dilakukan pendataan by name by address terhadap warga yang menggunakan air limbah domestik sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan perencanaan yang baik.
- f. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air limbah domestik.
- g. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik terus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya.
- h. Keberhasilan pencapaian ini sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:
- 1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan:
 - 2) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - 3) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - 4) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

- 5) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - 6) Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja
 - 7) Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
 - 8) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
 - 9) Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik berarti meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
 - 10) Meningkatkan nilai manfaat secara ekonomis dengan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Pengambil kebijakan secara umum dan mempertimbangkan nilai manfaat secara ekonomi dalam menempuh prioritas kegiatan pembangunan.
 - 11) Meningkatkan institusional layanan air limbah domestik kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai operator, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kompetensi dan kapasitas baik itu sumberdaya manusia, manajemen operasi aset, manajemen pelanggan dan manajemen pendapatan, kolaborasi dengan kelompok manajemen masyarakat dan sektor swasta.
 - 12) Menjamin efektivitas dan keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu: peraturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan lembaga operator (intitusi) dan kebijakan terhadap subsidi biaya dan retribusi pelanggan.
 - 13) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya sistem pengelolaan air limbah domestik.
 - 14) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sistem pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh kelompok masyarakat, sehingga adanya keberlanjutan program pembanguna.
- i. Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan ukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:

- 1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan sistem pengelolaan air limbah domestik
- 2) Kebijakan pendanaan maupun retribusi pelanggan layanan air limbah domestik
- 3) Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat
- 4) Dukungan pendanaan
- 5) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air limbah domestik di Kota Bogor
- 6) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan pekerjaan umum, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas PUPR Kota Bogor adalah :

Tabel 4.3.3 Dukungan Personil

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Pangkat/Golongan	Jumlah	Pejabat Struktural
1.	SD/SEDERAJAT	0	Gol I	0	Eselon II
2.	SMP/SEDERAJAT	4	Gol II	4	Eselon III
3.	SMA/SEDERAJAT	16	Gol III	6	Eselon IV
4.	D1	0	Gol IV	0	
5.	D2	0			
6.	D3	5			
7.	S1	5			
8.	S2	1			
9.	S3	0			
JUMLAH		31		10	

5. Hasil Capaian SPM Urusan

Tabel 4.3 4 Hasil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100.00%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayani	100%



	Dilayani	Terlayani		
*Jumlah Yang Harus Dilayani :	203,137	203,137	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8,43%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100%
	-1	-2	-3	
1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	203,137	203,137	0	100.00%
2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1,277	1,277	0	100.00%
3 . Jaringan perpipaan	166,036	166,036	0	100.00%
4 . Jaringan bukan perpipaan	37,137	37,137	0	100.00%
JUMLAH	407,587	407,587	0	500.00%
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				100.00%
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				
*Jumlah Yang Harus Dilayani :	189,646	189,646	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				100%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	-1	-2	-3	
1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	189,646	189,646	0	100.00 %
2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	552	552	0	100.00 %
3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	176,381	176,381	0	100.00 %
4 . Sub-sistem pengangkutan	13,129	13,129	0	100.00 %
5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	13,129	13,129	0	100.00 %
6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	5,468	5,468	0	100.00 %
JUMLAH	398,305	398,305	0	800.00 %

Note : Capaian Perhitungan SPM pada laporan ini berbeda dengan yang diinput pada aplikasi e-SPM. Pada aplikasi yang diinput realisasi capaian yang

dihitung terhadap target pada RPJMD Kota Bogor sebesar 74,60 sedangkan realisasi capaian SPM yang dihitung terhadap target pada Rencana Kerja Tahun 2022 sudah 100%.

6. Permasalahan Dan Solusi

Tabel 4.3.5 Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Data dasar penerima manfaat yang belum lengkap (by name by address)	Identifikasi dan inventarisasi data dasar penerima manfaat SPM di Kota Bogor	1. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat 3. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota.
B.	Pendanaan Untuk kegiatan air minum dan air limbah domestik membutuhkan dana yang sangat besar/ tinggi	Mencari sumber dana lainnya selain dari Pemerintah, dana CSR, Lembaga Keuangan Mikro, Baznas	1. Penyusunan Perencanaan 2. Pengajuan proposal dan kelengkapan persyaratan (Readiness Criteria) untuk pengajuan ke APBN, DAK, APBD Provinsi, sumber dana lainnya.
C.	Lain-Lain 1. Ketersediaan air baku yang semakin menipis 2. Pengembangan layanan pipa untuk jaringan air minum. 3. Pengembangan layanan air limbah domestik.	Identifikasi dan inventarisasi data dasar penerima manfaat SPM di Kota Bogor	1. Penambahan sumber air baku (mata air dan sungai). 2.1 Konservasi sumber air minum 2.2 Penambahan kapasitas dan cakupan layanan air minum 3.1. Penambahan kapasitas dan cakupan layanan air limbah domestik. 3.2 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat di Tingkat Kabupaten / Kota ada 2 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota

2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.4 1 Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlahWarga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yangterkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten /kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
---	---	--	------	--------------	------------------------	---	--------------

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp.3.669.509.550,00 yang dimasukkan ke dalam program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman. Selain dari APBD Kota Bogor terdapat juga anggaran dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp.60.000.000,00.

Tabel 4.4 2 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

No.	Pendanaan	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR	2.521.674.128.932			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	191.858.467.336	7.60%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3.669.509.550		0.15%	1.91%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN- LAIN)	60.000.000			
	A. APBN	60.000.000			
	B. APBD	0			
	B. DAK	0			

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.3 Dukungan Persinil Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1.	7 Orang	S2 : 2 orang SMA : 5 Orang	Gol III : 2 Orang Gol II : 5 Orang	Eselon III : 1 orang	1 orang

5. Hasil Capaian SPM Urusan

Berdasarkan data tersebut dan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, pemenuhan persyaratan administrasi dari pemohon, dan kondisi rumah maka direncanakan target perbaikan rumah korban pasca bencana dalam jangka waktu dua tahun sebagaimana tercantum dalam rencana kerja. Pada tahun 2022 direncanakan perbaikan rumah sebanyak 90 unit, dan sisanya yaitu 14unit direncanakan diperbaiki pada tahun 2023. Dari total 90unit yang direncanakan untuk ditangani pada tahun 2022, seluruh unit direalisasikan untuk ditangani, sehingga target capaiannya adalah 100%. Jenis mutu layanannya adalah seluruh unit rumah direhabilitasi/diperbaiki.

Untuk capaian SPM bagi fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun 2022 Kota Bogor tidak ada program relokasi karena belum dilakukan survey/penelitian tentang lokasi unit rumah yang terletak pada Kawasan yang berpotensi menimbulkan bahaya dan tidak layak untuk dijadikan perumahan. Dengan demikian capaian SPM untuk layanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota tidak terdefinisi.

Tabel 4.4 4 Capaian SPM Urusan perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00%
	PRESENTASE JUMLAH MUTU BARANG/ JASA				20.00%
	PRESENTASE JUMAH PELAYANAN				80.00%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	90	90	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100%
		-1	-2	-3	
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0.00%
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	90	90	0	100.00%
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0	0		
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang				100.00%



terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%	
A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	NA	NA	0	100%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%	
	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	-1	-2	-3		
1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas PenguasaanTanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0.00 %	
2 . Subsidi uang sewa	0	0	0	0.00 %	
3 . Penyediaan rumah layak huni	NA	NA	0	100.00 %	

6. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat pada program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

• Permasalahan

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat pada program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- belum adanya turunan aturan tingkat daerah yang mengatur teknis pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat.
- Belum adanya juknas juknis penanganan pasca bencana dalam rangka pemenuhan SPM tingkat kota sehingga memperlambat penanganan bencana melalui mekanisme standar pelayanan minimal.
- Belum akurat dan komprehensifnya data dan informasi yang diberikan sehingga menyulitkan proses verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang terkena bencana.

- Terjadinya kesalahan penempatan kode rekening belanja pada rencana penganggaran rehabilitasi rumah korban bencana sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat diserap secara optimal dan penanganan rehabilitasi rumah korban bencana masih mengandalkan BSTT pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini menyulitkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM.
- Penanganan bencana masih bersifat responsive terhadap kejadian bencana, belum dilaksanakan mitigasi bencana. Belum dilakukan pendataan secara menyeluruh tentang lokasi permukiman yang berlokasi di tempat yang tidak layak untuk dijadikan Kawasan permukiman karena factor rawan bencana yang sangat tinggi. Dengan demikian penetapan kepala daerah untuk lokasi permukiman yang tidak layak dijadikan Kawasan permukiman belum ada. Pada akhirnya, pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui relokasi program pemerintah Kota Bogor belum ada
- Solusi
Solusi yang tepat untuk permasalahan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan level koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang menangani bencana sehingga dapat diperoleh informasi jumlah kejadian dan jenis layanan langsung yang diberikan kepada korban terdampak
 - Membentuk satgas SPM untuk pelayanan rehabilitasi rumah terdampak bencana sehingga dapat diperoleh tindak lanjut yang lebih cepat
 - Menyusun dasar peraturan untuk mengatur teknis pelaksanaan SPM berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelayanan SPM bidang perumahan rakyat yang dapat dijadikan acuan untuk aparat wilayah dalam membantu tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

- Menyusun regulasi dan aturan yang lebih memudahkan proses penanganan rumah korban bencana serta melakukan penggantian kode rekening belanja untuk belanja rehabilitasi rumah yang terkena bencana yang diarahkan menjadi hibah bansos.
- Segera dibuat pendataan dan kajian atas lokasi-lokasi perumahan dan permukiman yang berada di lokasi yang tidak layak sebagai Kawasan permukiman sebagaimana yang tercantum dalam panduan SPM pada tahun 2023.

4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

1. SUB URUSAN TRANTIBUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.5 1 Target Capaian SPM Urusan Trantibum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100% (sesuai dengan jumlah)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang,

		dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota			daya manusia	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)		jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota
--	--	---	--	--	--------------	---	--	---

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.2 Alokasi Anggaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR	2,530,000,000,000			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	44,865,119,382	0.017		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3,025,528,500		0,0011	0,067
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	0			
	A. APBN	0			
	B. DAK	0			
	C. LAINNYA	0			

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di



lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.3 Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

No	Satpol PP	Data Pol PP		Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan				
		PNS	Non PNS	S2	S1	D3/D2/D1	SLTA	SLTP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Fungsional Satpol PP
1	Laki-laki	196	109	4	37	1	150	3	1	1	135	48	3	1	3	6	26	169
2	Perempuan	5	16	3	2	-				-	-	2	1	-	1	3	1	-
		201	132	7	39	1	150	3	1	1	135	50	4	1	4	9	18	169
Jumlah Keseluruhan 333																		

5. Hasil Capaian SPM Urusan

Tabel 4.5.4 Hasil Capaian SPM Urusan Trantibum

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00%
	PRESENTASE JUMLAH MUTU BARANG/ JASA	KATEGORI TRANTIBUM			20.00%
	PRESENTASE JUMLAH PELAYANAN				80.00%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	29	29	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100%
		-1	-2	-3	
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	3	3	0	100.00%
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	26	26	0	100.00%

3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	14	14	0	100.00%
4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	48	48	0	
5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	507	507	0	100.00%
6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	29	29	0	100.00 %

6. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Rasio Personil PNS Satpol PP terhadap jumlah penduduk Kota Bogor belum ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Jumlah PPNS yang belum memadai
- Kondisi sarana dan prasarana yang terbatas.
- Minimnya dukungan anggaran untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Solusi

Solusi yang tepat untuk permasalahan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Penambahan personil Satpol PP
- Penambahan jumlah PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, melalui Diklat PPNS yang dilaksanakan oleh Bandiklat Pusat yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
Penambahan anggaran bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengingat urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai undang-undang nomor 23

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota.

2. SUB URUSAN BENCANA

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota ada 5 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Keteriban Umum;
- b. Pelayanan Info rmasi Rawan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- e. Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.5 5 Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencananya akan dipenuhi)	Setiap tahun	

2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.6 Alokasi Anggaran Urusan Trantibumlinmas

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR				
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	9.340.027.122			
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2.691.459.948	28,8	28,8	28,8
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)				
	A. APBN				



B. DAK				
C. LAINNYA				

4. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor** sebanyak **76 orang**. Berikut adalah jumlah berdasarkan kualifikasi pendidikan formal, pangkat golongan, pejabat struktural sebagaimana tabel di bawah.

1) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II b			
2	Eselon III a	1		1
3	Eselon III b			
4	Eselon IV a	4		4
5	Eselon IV b			
6	Jabatan Fungsional			
7	Staf	13	1	14
Jumlah		18	1	19

2) Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	18	1	19
2	TKS/Outsourcing	46	11	57
Jumlah		64	12	76

3) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	S3			
2	S2	2	1	3
3	S1	12	6	18
4	D4			
5	D3	4		4
6	D2			
7	D1			
8	SLTA	39	5	44
9	dibawah SLTA	7		7
Jumlah		64	12	76

a
rkan Pangkat / Golongan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin	Jumlah
-----	--------------------	---------------	--------

		Laki-laki	Perempuan	Seluruh
1	Golongan IV	2	-	2
2	Golongan III	9	1	10
3	Golongan II	7		7
4	Golongan I			
Jumlah		18	1	19

5) Berdasarkan Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Diklat Pim IV	2		2
2	Diklat Pim III	1		1
3	Diklat Adum			
4	Diklat Pim II			
5	Diklat Fungsional			
Jumlah		3		3

5. Hasil Capaian SPM Urusan

Tabel 4.5.7 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00%
	PRESENTASE JUMLAH MUTU BARANG/JASA	KATEGORI KEBENCANAAN			100.00%
	PRESENTASE JUMLAH PELAYANAN				
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	185,627	185,627	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	B. JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
		-1	-2	-3	100%
					-4



	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	2	2	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	18	18	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	42	42	0	100.00%
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	15	15	0	100.00%
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	185,627	185,627	0	100.00%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	185,627	185,627	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
		-1	-2	-3	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	50	50	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	57	57	0	100.00 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	9,803	9,803	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
		-1	-2	-3	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang	437	437	0	100.00 %

	terkena/menjadi korban bencana				
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2	2	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	144	144	0	100.00 %

6. Permasalahan Dan Solusi

✓ Permasalahan dan Solusi Kategori Kebencanaan

- Permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terutama pada Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban yaitu
 1. Pelaksanaan kegiatan belum maksimal sehingga belum sampai dibuatnya dokumen yang dapat digunakan sebagai pembuatan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Bogor terutama pada saat pra bencana dengan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
 2. Kurangnya minat dan kesadaran aparatur kelurahan dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
 3. Rendahnya antusias dan kepedulian warga ketika dilakukan sosialisasi dan mitigasi bencana. Mereka menganggap bahwa kejadian banjir ataupun longsor yang terjadi merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Sehingga pada saat terjadi bencana masyarakat tidak siap dan baru mencari informasi penanggulangan terhadap bencana yang terjadi.
 4. Kurangnya fasilitas yang dimiliki relawan Kelurahan Tangguh bencana.
 5. Belum adanya anggaran guna pengadaan fasilitas, pelatihan dan operasional bagi relawan Kelurahan Tangguh bencana.

- Solusi pemecahan masalah dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terutama pada Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban yaitu :
 1. Pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga terbentuknya suatu dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kota Bogor dalam pembentukan kebijakan penanggulangan bencana daengan kegiatannya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
 2. BPBD terus melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa penyuluhan, pelatihan dan simulasi secara langsung maupun tidak langsung (melalui web, twiter, istagram, dan WhatsApp).
 3. Mengidentifikasi penilaian kerusakan (assesment) Untuk penanganan bantuan fisik bangunan (perbaikan bronjong, tembok penahan tanah dan bangunan rumah) dan membantu merekomendasikan dengan OPD teknis.
 4. Berjalannya relawan Kelurahan Tangguh bencana diharapkan dapat didukung oleh berbagai pihak dan didukung dengan adanya fasilitas peralatan dan anggaran yang memadai guna lancarnya upaya pengurangan risiko bencana, karena upaya menuju Kelurahan Tangguh bencana yang selalu siaga dan aman membutuhkan waktu dan ruang.

3. SUB URUSAN KEBAKARAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten / Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%

Tabel 4.5.8 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran

	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaranyang akan dipenuhi)	Setiap tahun
--	--	--	------	--------------	---	---	--------------

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Damkar Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.9 Alokasi Anggaran Sub Urusan Damkar

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR	2,530,000,000,000			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKERPERANGKAT DAERAH	15,187,365,856	0,00006		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	15,187,365,856		0,00006	0,00006
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	0			
	A. APBN	0			



B. DAK	0			
C. LAINNYA	0			

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Tramtibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor adalah sebagai berikut :

NO	DPKP	Data DPKP				Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan		
		PNS	TKK	PKWT	Non PNS	S2	S1	D3/ D1	SLTA	SLTP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1	Laki Laki	69	1	24	3	6	8	0	45	2	5	5	49	10	5	1	3	3
2	Perempuan	3	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
JUMLAH		72	1	27	3	9	8	0	79	2	5	5	49	11	7	1	3	6
Jumlah Keseluruhan = 103																		

5. Hasil Capaian SPM Urusan

Tabel 4.5 10 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian %
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100,00%
	PRESENTASE JUMLAH MUTU BARANG/JASA	KATEGORI DAMKAR			20,00 %
	PRESENTASE JUMLAH JUMLAH PELAYANAN				80,00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (100%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %

	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	955	955	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	95	95	0	100.00%
	2 Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	70	70	0	100.00%
	3 Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	80	80	0	100.00%
	4 Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	102	102	0	100.00%

6. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Tramtibumlinmas Sub Urusan Kebakaran terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kondisi gedung pos pemadam kebakaran, kondisi kendaraan serta sarana dan prasarana yang tidak layak sesuai dengan standar baik secara kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas pemadam kebakaran yang sebagian besar belum mengikuti Diklat Dasar Pemadam Kebakaran merupakan beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2022.

b. Solusi

Solusi yang tepat untuk permasalahan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan anggaran bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, khususnya untuk sub urusan kebakaran, mengingat urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, peraturan Menteri PAN & RB nomor 16 tahun 2019 tentang Jabatan

Fungsional Pemadam Kebakaran, permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi Gedung/pos pemadam kebakaran, kondisi kendaraan unit pemadam kebakaran, pengadaan sarana prasarana peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pendidikan dasar pemadam kebakaran bagi petugas.

4.6 URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100 % (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan, Perubahan Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59

Tahun 2021 Target Standar Pelayanan Minimal 100% (seratus persen)
selama 1 Tahun.

Tabel 4.6.1 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantayang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	Indikator mutu Minimal layanan dasar Berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar Panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	korban bencana kabupaten / kotayang akan	Setiap tahun	



3. Alokasi Anggaran

Tabel 4.6 2 Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No.	Pendanaan	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR	0			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	13,868,602,030	0.00%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,388,801,243		0.00%	17.22%
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN- LAIN)	0			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	C. LAINNYA	0			

4. Dukungan Personil

Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor pada Awal Tahun 2022 yang berstatus PNS sebanyak 42 orang .

Untuk Pegawai Non PNS sebagai Mitra Dinas Sosial terdiri dari :

- Pendamping PKH di 6 kecamatan sebanyak 67 orang
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1 Orang;
- Satuan Bakti Pekerja Sosial 1 orang;
- Pendamping Disabilitas 4 orang;

- Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) BPNT 1 orang ;
- Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 75 orang ;
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10 orang

5. Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

Tabel 4.6 3 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00%
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	1,341	1,341	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	1 .Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	102	102	0	100.00%
	2 . Layanana Rujukan	15	15	0	100.00%
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	6	6	0	100.00%
	4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	6	6	0	100.00%
	5. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	6	6	0	100.00%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00%



	Jumlah Yang Harus Dilayani :	884	884	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	1. Layanan data dan pengaduan	266	266	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	6	6	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	168	168	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	266	266	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	30	30	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	23	23	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	228	228	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	90	90	0	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	8	8	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan	5	5	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	97	97	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	166	166	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	336	336	0	100.00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	6	6	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	6	6	0	100.00%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00%
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	148	148	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	1. Layanan data dan pengaduan	30	30	0	100.00%



	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	6	6	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	60	60	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	15	15	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	5	5	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	15	15	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	112	112	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	15	15	0	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	4	4	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan	5	5	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	30	30	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	30	30	0	100.00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	6	6	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	60	60	0	100.00%
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00%
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	2,361	2,361	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	1. Penyediaan permakanan	2,361	2,361	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	31	31	0	100.00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	167	167	0	100.00%



4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	67	67	0	100.00%
5 . Pelayanan dukungan Psikososial	35	35	0	100.00%

6. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan internal yang dihadapi meliputi kurangnya fasilitas pendukung terkait penanganan Disabilitas terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis dalam penanganan membantu fasilitas kesehatan seperti mobil ambulan, dan mobil penjakuan serta mobil untuk pengantran/reunifikasi kepada keluarga dan alat kebutuhan penunjang lainnya.

Kebutuhan terhadap pengadaan sandang dan kebutuhan dasar keterkaitan penanganannya untuk klien dalam penanganan rehabsos seperti (pempers, underpad, Pakaian satu stell, kasur medis) serta belum adanya rumah singgah yang layak dan mampu menangani perlindungan dasar dan pemenuhan dasar bagi orang terlantar.

Permasalahan intern yang dihadapi meliputi kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang Pekerjaan Sosial yang berlatar belakang disiplin ilmu Pekerjaan Sosial dan secara langsung berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah sosial. Jumlah tenaga pendamping lapangan baik PKH, Tagana, Sakti Peksos dan TKSK belum bisa berperan secara optimal mengingat sasaran garapannya belum sebanding dengan jumlah para pendamping yang ada.

Diluncurkannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialihkan menjadi bantuan SEMBAKO yang realisasi capaiannya dilaporkan setiap bulan telah menambah tugas pokok TKSK dilapangan sehingga tugas pokok dan fungsi utama seringkali terabaikan.

Secara eksternal terdiri dari permasalahan penanganan gelandangan psikotik yang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya :

- Belum adanya regulasi penanganan gelandangan psikotik secara khusus sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan;
- Saling kirim antar wilayah perbatasan tetap terjadi dan seolah-olah belum ada penyelesaian yang jelas;
- Belum adanya instalasi jiwa secara khusus pada RSUD Kota Bogor untuk penampungan sementara ODGJ;
- Persediaan anggaran yang maksimal untuk penanganan gelandangan psikotik hingga ybs dikatakan sembuh belum teralokasikan;

Untuk penanganan masalah sosial dengan sumber dana dari APBD masih sangat terbatas karena perhatian pemerintah daerah saat ini lebih focus pada penanganan fakir miskin baik di perkotaan maupun pedesaan dengan jumlah sasaran yang semakin meningkat.

Solusi untuk menangani hal-hal tersebut yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat terutama dalam hal pengadaan stok kebencanaan maupun program perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang bersifat rehabilitasi sosial, karena di Kota Bogor tidak terdapat Panti Rehabilitasi, maka upaya kita adalah memfasilitasi para PPKS untuk di rehabilitasi ke Panti-panti milik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 4.7.1 Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN		SERAPAN
					PELAKSANAAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BOGOR				11.428.000.000	11.428.000.000	100%
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				2.016.500.000	2.016.500.000	100%
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD			556.500.000	556.500.000	100%



		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	100%	
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	300.000.000	300.000.000	100%	
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	40.875.000	40.875.000	100%	
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	215.625.000	215.625.000	100%	
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	100%	
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	100%	
		JUMLAH INDIKATOR				556.500.000	556.500.000	100%
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan				650.000.000	650.000.000	100%
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100%	
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	140.000.000	140.000.000	100%	
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	140.000.000	140.000.000	100%	
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0		
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	270.000.000	270.000.000	100%	
		JUMLAH INDIKATOR				650.000.000	650.000.000	100%
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan				0	0	100%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1	Pendidik dan tenaga kependi	0	0	100%	

			(satu) tahun	dikan				
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	100%	
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	100%	
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	100%	
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	100%	
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	100%	
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik	0	0	100%	
		JUMLAH INDIKATOR				0	0	100%
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)				810.000.000	810.000.000	100%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	200.000.000	200.000.000	100%	
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	340.000.000	340.000.000	100%	
		3	10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	270.000.000	270.000.000	100%	
		JUMLAH INDIKATOR				810.000.000	810.000.000	100%
		JUMLAH PROGRAM				2.016.500.000	2.016.500.000	100%
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				9.336.500.000	9.336.500.000	100%	
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM				94.500.000	94.500.000	100%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	100%	
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	94.500.000	94.500.000	100%	



	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	100%
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	100%
JUMLAH INDIKATOR				94.500.000	94.500.000	100%
6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			12.000.000	12.000.000	100%
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	100%
	2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	12.000.000	12.000.000	100%
JUMLAH INDIKATOR				12.000.000	12.000.000	100%
7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			9.230.000.000	9.230.000.000	100%
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	50.000.000	50.000.000	100%
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	9.100.000.000	9.100.000.000	100%
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	80.000.000	80.000.000	100%
JUMLAH INDIKATOR				9.230.000.000	9.230.000.000	100%
8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			0	0	0%
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%



		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			0	0	0%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	JUMLAH PROGRAM				9.336.500.000	9.336.500.000	0%
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				75.000.000	75.000.000	100%
	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)			0	0	0%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	0%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)			75.000.000	75.000.000	100%



		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan	75.000.000	75.000.000	100%
			penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru				
	JUMLAH INDIKATOR				75.000.000	75.000.000	100%
	JUMLAH PROGRAM				75.000.000	75.000.000	100%

4.7.2 URUSAN KESEHATAN

Tabel 4.7 2 Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BOGOR				728.440.100	708.213.913	97,22 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				728.440.100	708.213.913	97,22 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			728.440.100	708.213.913	97,22 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatanibu Hamil	Orang	146.959.700	141.251.700	96,12
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatanibu Bersalin	Orang	111.959.800	106.881.800	95,46
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatanBayi Baru Lahir	Orang	35.010.000	35.010.000	100,00
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatanBalita	Orang	34.999.800	34.369.800	98,20
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar	Orang	34.999.900	34.999.900	100,00
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatanpada Usia Produktif	Orang	30.000.000	29.948.000	99,83
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatanpada Usia Lanjut	Orang	85.219.200	82.428.835	96,73
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	29.999.900	29.666.900	98,89
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	79.300.800	77.710.000	97,99
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	13.840.000	13.733.678	99,23
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	10.480.000	10.465.900	99,87
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	50.000.000	48.617.000	97,23
	JUMLAH INDIKATOR				728.440.100	708.213.913	97,22 %



	JUMLAH PROGRAM	728.440.100	708.213.913	97,22 %
--	----------------	-------------	-------------	---------

4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 4.7.3 Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					6	7	
	KOTA BOGOR				8,867,890,000	8,653,412,456	97.58 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2,636,325,000	2,431,776,298	92.24 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K20220131033558			2,636,325,000	2,431,776,298	92.24 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	Top of Form 2,636,325,000 Bottom of Form	Top of Form 2,431,776,298 Bottom of Form	92.24 %
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%



		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					2,636,325,000	2,431,776,298	92.24 %
	JUMLAH PROGRAM					2,636,325,000	2,431,776,298	92.24 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				6,231,565,000	6,221,636,158	99.84 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234			6,231,565,000	6,221,636,158	99.84 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	Top of Form 1,155,835,000 Bottom of Form	Top of Form 1,147,793,186 Bottom of Form	99.30 %
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	Top of Form 3,760,000,000 Bottom of Form	Top of Form 3,759,264,098 Bottom of Form	99.98 %
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%

		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	Top of Form 1,315,730,000 Bottom of Form	Top of Form 1,314,578,874 Bottom of Form	99.91 %
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	Top of Form 0 Bottom of Form	Top of Form 0 Bottom of Form	0%
	JUMLAH INDIKATOR				6,231,565,000	6,221,636,158	99.84 %
	JUMLAH PROGRAM				6,231,565,000	6,221,636,158	99.84 %
	KEGIATAN LAINNYA						
3.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA						

4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 4.7.4 Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DISPERUMKIM KOTA BOGOR					3.729.509.550	2.603.177.362	69,80%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.426.829.550	1.300.497.362	53,59%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			493.478.150	492.071.700	99,71%	
		1	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen	99.999.790	99.608.400	99,61%	



		2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	dokumen	96.739.390	96.484.500	99,74%
		3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	dokumen	99.999.790	99.719.400	99,72%
		4	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	99.999.790	99.774.900	99,78%
		5	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	dokumen	96.739.390	96.484.500	99,74%
	2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			194.036.600	53.660.800	27,65%
		1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	orang	43.804.000	36.333.800	82,95%
		2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas tanah dan Bangunan	orang	43.804.000	3.052.000	6,97%
		3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	orang	43.804.000	3.052.000	6,97%
		4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	orang	22.625.000	3.000.000	13,26%
		5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	dokumen	19.999.800	4.441.500	22,21%
		6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	dokumen	19.999.800	3.781.500	18,91%
		3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.657.804.800	748.764.862	45,17%
		1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	unit	649.999.800	3.300.000	0,51%
		2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	unit	250.000.000	-	0,00%
		3	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	unit	757.805.000	745.464.862	98,37%
	4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			81.510.000	6.000.000	7,36%
		1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	laporan	42.160.000	3.000.000	7,12%
		2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	39.350.000	3.000.000	7,62%
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.302.680.000	1.302.680.000	100,00%
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			1.302.680.000	1.302.680.000	100,00%
		1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terkena bencana	unit	1.242.680.000	1.242.680.000	100,00%
		2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terkena bencana (BSPS)	unit	60.000.000	60.000.000	100,00%

Rincian alokasi anggaran penerapan SPM pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut

Penjelasan secara rinci atas pelaksanaan program dan kegiatan pendukung

pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

1.1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Anggaran direncanakan sebesar Rp.493.478.150,00 besar serapan sebesar Rp. 492.071.700,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) atau 99,71%.

1.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Anggaran direncanakan sebesar Rp. 194.036.600,00 dengan serapan sebesar Rp. 53.660.800,00 (*Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) atau 27,65%.

1.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran direncanakan sebesar Rp. 1.657.804.800, diserap sebesar Rp. 748.764.862,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar 45,17%.

Pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah membangun prasarana sarana dan utilitas umum berupa jalan drainase dan tembok penahan tanah pada permukiman pada wilayah relokasi program Double-Track milik PT. KAI di kecamatan Bogor Selatan.

Kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana batal dilaksanakan pada sub kegiatan yang tercantum dalam kegiatan tersebut di atas karena terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja sehingga anggaran yang ada tidak dapat dimanfaatkan.

2. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan yang menunjang penyediaan layanan minimal untuk pelayanan terhadap rumah korban terkena bencana dengan mutu layanan rehabilitasi terhadap rumah korban terkena bencana adalah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Target capaian rumah terkena bencana yang direncanakan untuk diperbaiki sebanyak 90 unit. Ada dua sumber dana untuk rehabilitasi



rumah terkena bencana yaitu melalui APBD Kota Bogor melalui Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) dan APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Besar anggaran yang digunakan untuk perbaikan rumah terkena bencana dari APBD Kota Bogor sebesar Rp.1.242.680.000,00 dan dari BPSPS sebesar Rp.60.000.000,00. Total anggaran yang digunakan sebesar Rp. 1.302.680.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

4.7.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS 1. SUB URUSAN TRANTIBUM

Tabel 4.7.5 Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				44.865.119.382	44.231.520.640	98.66 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.025.528.500	2.798.856.280	92.51 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.726.959.200	2.524.543.299	92.60 %
		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	162.799.800	162.799.800	100%
		2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	179.999.600	36.460.000	20.3%
		3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	2.007.159.800	2.002.632.800	99.80%
		4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Orang	30.000.000	25.600.000	85.00%

	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	250,000,000	239,533,600	95,80 %
	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Laporan	60.000.000	57.517.000	95,90%
	7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	37,000,000	0	0 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			288.569.400	264.913.080	91,80%
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	24.999.900	24.999.900	100%
	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	263.569.500	239.913.180	91,20%
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			9,999,900	9,999,400	94,00 %
	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	9,999,900	9,999,400	94,00 %

2. SUB URUSAN KEBENCANAAN

Tabel 4.7.6 Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2022

1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)						%
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					2,7%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	100 %
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	29.541	0	3%
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					100,00 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2	100	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	3.195	100	1%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	68.302	0	6%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	3	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	3	0	100,00 %



		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	100.00 %
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	2	0	25%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					0 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	1	1	100%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	600	600	100 %
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	10	10	100 %
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	10	10	100 %
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	1	1	100%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	0	0.00 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	21	21	100%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%

3. SUB URUSAN KEBAKARAN

Tabel 4.7.7 Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Urusan Tramtibumlinmas Sub Urusan Damkar Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BOGOR				15,187,365,856	14,757,781,507	97.17 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATANKEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				567,630,219	549,895,940	96,87 %

	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			538,017,719	522,645,940	97,14 %
		1	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	444,997,719	434,780,970	97,70 %
		2	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	93,020,000	87,864,970	94,46 %
	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			29,612,500	27,250,000	92,02 %
		1	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	29,612,500	27,250,000	92,02 %

4.7.6 URUSAN SOSIAL

Tabel 4.7.8
Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Urusan Sosial Tahun 2022

Tabel 4.7.8 Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Urusan Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket (Realisasi) %
1	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	988.959.425	908.028.555	91.82%
2	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	237.606.000	211.893.800	88.474%
3	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	225.570.818	211.893.800	93.94%



4	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar	91.139.900	30.489.900	33,45%
5	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Program Penanganan Benacna Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	300.426.000	280.185.500	93.26%
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	149.612.900	148.592.900	99,30%
JUMLAH			2.388.801.243	2.112.437.062	89.34%

BAB V

P E N U T U P

Alhamdulillah patut kita syukuri situasi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya sepanjang tahun 2022 di Kota Bogor berlangsung dengan kondusif dan sangat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Hampir dapat dikatakan tidak ada kejadian atau peristiwa yang menghambat, merusak atau dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 disusun sebagai bentuk laporan capaian kinerja kepala daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tahun 2022 adalah tahun ke 4 (empat) dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024. Berbagai program dan kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kota Bogor untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024.

Secara umum pembangunan di Kota Bogor berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian-capaian kinerja yang tertuang dalam BAB –BAB sebelumnya. Adapun program serta indikator yang masih belum tercapai akan menjadi evaluasi bersama sebagai pijakan untuk penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan yang lebih baik di Tahun mendatang. Mudah-mudahan di akhir pelaksanaan RPJMD 2019-2024, semua target yang ditetapkan dapat dituntaskan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Langkah yang masih panjang dalam upaya pencapaian target yang tertuang dalam visi dan misi RPJMD Kota Bogor. Pencapaian selama Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Bogor, pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, termasuk Akademisi dan seluruh masyarakat Kota Bogor beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Oleh karena itu sinergitas dan kolaborasi dari seluruh stakeholder Kota Bogor sangat kami harapkan baik melalui karya, inovasi,



saran dan kritik membangun serta dukungan yang nyata lainnya agar harapan dan cita-cita menuju Kota Bogor yang lebih baik sesuai dengan RPJMD Kota Bogor dapat kita realisasikan tepat pada waktunya.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022. Harapannya kedepan bahwa kinerja dalam pembangunan di tahun mendatang akan lebih baik . Semoga Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan meridhoi seluruh langkah serta niat baik kita dalam membangun Kota Bogor yang mampu memberikan dampak manfaat luas bagi masyarakat dalam kehidupan yang nyaman dan sejahtera.